

STATISTIK PEMUDA INDONESIA 2007

ISBN. 978-979-724-599-3 :
No. Publikasi : 04220.
Katalog BPS : 4616.
Ukuran Buku : 21 Cm x 28 Cm
Jumlah Halaman : 160 halaman

Naskah:
Sub Direktorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial

Gambar Kulit:
Sub Direktorat Publikasi Statistik

Diterbitkan oleh:
Badan Pusat Statistik, Jakarta – Indonesia

Dicetak oleh

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

<http://www.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Pemuda bagian penduduk usia produktif merupakan tulang punggung pembangunan sekaligus menjadi penanggung beban ketergantungan penduduk usia tidak produktif. Sepertiga lebih penduduk Indonesia merupakan kelompok pemuda (penduduk usia 15-35 tahun). Oleh karena itu ketersediaan data yang akurat dengan cakupan yang lebih luas serta gambaran kondisi terbaru merupakan tuntutan yang harus dipenuhi agar implikasi yang diterapkan dalam pembangunan dapat tepat guna dan tepat sasaran.

Dalam upaya membantu menyediakan data dan informasi tentang keadaan sosial ekonomi pemuda maka secara berkala Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan publikasi "Statistik Pemuda". Gambaran pemuda Indonesia tahun 2007 yang disajikan dalam publikasi ini antara lain memuat informasi mengenai struktur demografis pemuda, pendidikan pemuda, ketenagakerjaan dan kesehatan pemuda. Sumber data dalam publikasi ini seluruhnya berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2007. Data yang disajikan diharapkan dapat bermanfaat dalam merumuskan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan kepemudaan.

Publikasi Statistik Pemuda Tahun 2007 ini mungkin masih mempunyai banyak kekurangan/keterbatasan, baik dalam kelengkapan data maupun kedalaman uraian, karenanya masih diperlukan survei khusus untuk melengkapi keterbatasan tersebut.

Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini diucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat diharapkan untuk perbaikan publikasi dimasa datang.

Jakarta, Nopember 2008
Kepala Badan Pusat Statistik

DR. Rusman Heriawan
NIP. 340003999

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Sistematika Penyajian	4
BAB II METODOLOGI	9
2.1. Sumber Data	9
2.1.1. Ruang Lingkup	10
2.1.2. Kerangka Sampel	11
2.1.3. Rancangan Penarikan Sampel	12
2.1.4. Metode Pengumpulan Data	12
2.1.5. Petugas Lapangan	13
2.2. Konsep dan Definisi	13
2.2.1. Tipe Daerah	13
2.2.2. Blok Sensus	15
2.2.3. Rumah Tangga dan Anggota Rumah Tangga	16
2.3. Keterbatasan Data	21
2.4. Metode Analisis	21

BAB III	PROFIL DEMOGRAFIS PEMUDA	25
	3.1. Jumlah Pemuda	26
	3.2. Struktur Pemuda Menurut Jenis Kelamin	27
	3.3. Struktur Pemuda Menurut Tipe Daerah	29
	3.4. Struktur Pemuda Menurut Kelompok Umur	32
	3.5. Struktur Perkawinan Pemuda	33
	3.6. Pemuda Sebagai Kepala Rumah Tangga	36
BAB IV	PENDIDIKAN PEMUDA	41
	4.1. Partisipasi Pendidikan Pemuda	43
	4.2. Angka Buta Huruf	49
	4.3. Rata-rata Lama Sekolah	52
	4.4. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	54
BAB V	KETENAGAKERJAAN	61
	5.1. Partisipasi dalam Kegiatan Ekonomi	63
	5.2. Lapangan Usaha	67
	5.3. Status Pekerjaan	69
	5.4. Pengangguran	73
	5.5. Tingkat Pengangguran Terbuka	74
BAB VI	KESEHATAN PEMUDA	81
	6.1. Keluhan Kesehatan	83
	6.2. Angka Kesakitan	87
	6.3. Lama Sakit	88
	6.4. Cara Berobat	90
	6.5. Partisipasi Pemuda dalam Program Keluarga Berencana (KB)	95
	6.6. Umur Perkawinan Pertama	97
BAB VII	HASIL STUDI MENDALAM PEMUDA	101

Tabel Lampiran

107

DAFTAR PUSTAKA

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
3.4.1	Persentase Pemuda menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah Tahun 2007	33
3.5.1	Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinana Tahun 2007	34
3.5.2	Persentase Pemuda menurut Status Perkawinan Tipe ` Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007	35
3.6.1	Persentase Pemuda Kepala Rumah Tangga menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2007	37
4.1.1	Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah dan Status Sekolah Tahun 2007	45
4.3.1	Rata-rata Lama Sekolah menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007 (dalam Tahun)	53
4.4.1	Persentase Pemuda menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Tahun 2007	55
5.1.1	TPAK Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007	63
5.1.2	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2007	66

Gambar		Halaman
5.4.1	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu dan Jenis Kelamin, Tahun 2007	74
5.5.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2007	75
6.1.1	Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2007	85
6.2.1	Persentase Pemuda yang Sakit menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007	88
6.3.1	Persentase Pemuda yang Sakit menurut Jenis Kelamin dan Lama Sakit Tahun 2007	90
6.4.1	Persentase Pemuda yang Sakit dan Mengobati Sendiri menurut Jenis Pengobatan dan Tipe Daerah Tahun 2007	91
6.5.1	Persentase Pemuda Perempuan yang Berstatus Kawin menurut Partisipasi KB dan Tipe Daerah Tahun 2007	96

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
3.1.1	Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal, Tahun 2007	27
3.2.1	Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2003-2007	28
3.3.1	Persentasi Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2003-2007	30
3.3.2	Persentase Pemuda menurut Pulau/Kepulauan dan Jenis Kelamin Tahun 2007	31
3.5.1	Persentase Pemuda yang Pernah Kawin menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2007	36
3.6.1	Persentase Pemuda yang Berstatus Kepala Rumah Tangga menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah dan Jenis kelamin, Tahun 2007	38
4.1.1	Persentase Pemuda menurut Jenis kelamin dan Status Sekolah Tahun 2003-2007	44
4.1.2	Angka Partisipasi Sekolah Pemuda menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2007	48
4.2.1	Persentase Pemuda yang Buta Huruf menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2003-2007	50
4.2.2	Persentase Pemuda yang Buta Huruf menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Tahun 2007	51
4.4.1	Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007	56

Tabel		Halaman
5.1.1	TPAK Pemuda menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, Tahun 2007	65
5.2.1	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Tipe Daerah, Tahun 2007	68
5.2.2	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin, Tahun 2007	69
5.3.1	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Tipe Daerah, Tahun 2007	70
5.3.2	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin, Tahun 2007	71
5.3.3	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Pendidikan yang Ditamatkan , Tahun 2007	72
5.5.1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, Tahun 2007	76
6.1.1	Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Keluhan, Tahun 2007	86
6.3.1	Persentase Pemuda yang Sakit menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah, Tahun 2007	89
6.4.1	Persentase Pemuda yang Mengobati Sendiri Sakitnya menurut Jenis Obat, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, Tahun 2007	92
6.4.2	Persentase Pemuda Sakit yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat dan Jenis Kelamin, Tahun 2007	94

Tabel		Halaman
6.5.1	Persentase Pemuda Perempuan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Alat/Cara KB yang Digunakan dan Tipe Daerah Tahun 2007.	97
6.6.1	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur Saat Perkawinan Pertama, Tahun 2007.	98

<http://www.bps.go.id>

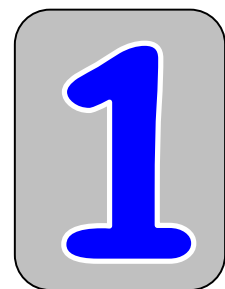
DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Tabel		Halaman
3.1	Jumlah Pemuda menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2007	101
3.2	Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2007	102
3.3.1-3.3.3	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kelompok Umur, Tahun 2007	103-105
3.4.1-3.4.3	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Perkawinan, Tahun 2007	106-108
4.1.1 - 4.1.3	Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Pendidikan, Tahun 2007	109 - 111
4.2.1 - 4.2.3	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Pendidikan Tahun 2007	112-114
4.3	Persentase Pemuda yang Melek Huruf menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2007	115
4.4.1-4.4.3	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007	116-118
5.1.1-5.1.3	Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2007	119-121
5.2.1-5.2.3	Persentase Angkatan Kerja Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2007	122-124
5.3.1 - 5.3.3	Persentase Pemuda Bukan Angkatan Kerja menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2007	125-127
5.4.1-5.4.3	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, Tahun 2007	128 - 130

Tabel		Halaman
5.5.1 - 5.5.3	Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Status pekerjaan Utama, Tahun 2007	131-133
5.6.1-5.6.3	Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2007	134-136
5.7.1 - 5.7.3	Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2007	137-139
5.8.1 - 5.8.3	Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar menurut Provinsi dan Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan, Tahun 2007	140-142
6.1	Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2007	143
6.2.1-6.2.3	Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Jenis Keluhan, Tahun 2007	144-146
6.3.1 - 6.3.3	Persentase Pemuda yang Sakit Selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, Tahun 2007	147 - 149
6.4.1 - 6.4.3	Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Provinsi dan Umur saat Perkawinan Pertama, Tahun 2007	150 - 152
6.5	Proporsi Pemuda Perempuan Berstatus Kawin yang Pernah Menggunakan Alat/Cara KB menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2007	153
6.6	Persentase Pemuda Perempuan Berstatus Kawin menurut Provinsi Tipe Daerah dan Partisipasi dalam Program KB, Tahun 2007	154
6.7.1-6.7.3	Persentase Pemuda Perempuan Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Provinsi dan Jenis Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan, Tahun 2007	155-157

PENDAHULUAN

<http://www.bps.go.id>



Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pemuda adalah nafas zaman, harapan bangsa yang kaya akan kritik, dan imajinasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemuda memegang peranan penting dalam hampir setiap transformasi sosial dan perjuangan meraih cita-cita. Sejarah kebangkitan Eropa (Sekuler/Kapitalis) dengan fragmen Revolusi Prancis yang menumbangkan monarki dan gerejawan di abad pertengahan (1789) digerakkan oleh kaum intelektual. Pemuda Rosseau, Montesquieu, Descartes, Condorcet, Olympe de Gouges menjadi motor penggerak masyarakat yang berujung pada revolusi menandai zaman baru dan mengilhami bangkitnya

renaissance di Eropa (Bahrul Umum Ilham: 'Menyongsong Kebangkitan Cendekiawan Muslim Muda'. Rabu 21 Maret 2007)

Demikian pula halnya dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, pemuda selalu menempati peran yang sangat strategis dalam setiap peristiwa penting yang terjadi. Bahkan pemuda menjadi tulang punggung dari keutuhan perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang ketika itu. Peran tersebut juga tetap disandang oleh pemuda Indonesia hingga kini; selain sebagai pengontrol independen terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, pemuda Indonesia juga secara aktif berpartisipasi dalam pembangunan menyosong era globalisasi.

Peran strategis pemuda tidak dapat diabaikan dari paradigma pemuda sebagai "*social Category*" yang mengindikasikan adanya pengakuan/penghargaan terhadap potensi pemuda baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, pemuda berjumlah 75 juta jiwa atau 33,18 persen dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini merupakan aset pembangunan. Dalam potensi kualitatif pemuda memiliki berbagai macam talenta dibidang pendidikan, kewirausahaan, budaya dan pariwisata serta teknologi tepat guna, yang jika dikembangkan secara optimal dan terarah akan menjadi sumber pembangunan nasional.

Saat ini bangsa Indonesia mengalami berbagai macam permasalahan, baik permasalahan internal yang berkaitan dengan masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun permasalahan eksternal yang berkaitan dengan interaksi antar bangsa sebagai bagian dari proses globalisasi. Pemuda sebagai aset dan mentor pembangunan diharapkan mampu berperan dalam merespon berbagai persoalan yang tengah dihadapi. Untuk itu pemuda harus memiliki akhlak yang mulia, rasa solidaritas, integritas diri dan wawasan kebangsaan serta memiliki komitmen untuk bangsanya.

Menjawab tuntutan tersebut, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga sebagai wadah yang bertanggung jawab dalam pemberdayaan dan pengembangan pemuda telah menyusun Visi Kementerian Negara Pemuda dan

Olah raga (Kemenegpora), yaitu “terwujudnya kualitas sumber daya pemuda dan olahraga dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan, kepemimpinan yang berakhlak mulia, mandiri, sehat, cerdas, terampil, berprestasi dan berdaya saing yang dilandasi iman dan taqwa”. Terkandung keseriusan pemerintah dalam meningkatkan harkat dan martabat pemuda, terutama bila dicermati dari misinya yang antara lain adalah

- a. Mengembangkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan partisipasi pemuda dan olahraga dalam pembangunan manusia Indonesia yang unggul dan berdaya saing global yang dilandasi iman dan taqwa;
- b. Mempersiapkan kader pemimpin bangsa yang berakhlak mulia yang didasarkan pada pendidikan berkualitas agar memiliki wawasan kebangsaan serta peduli terhadap lingkungan;
- c. Pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga untuk membentuk pemuda yang memiliki jiwa wirausaha dan mengembangkan industri olahraga serta meningkatkan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha;
- d. Mewujudkan sistem manajemen kepemudaan dan olahraga yang terpadu untuk pemberdayaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas jaringan kerja;

Perumusan kebijakan pembangunan dan pemberdayaan pemuda tersebut perlu didukung oleh tersedianya data statistik yang akurat dan mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang harus dicapai dalam upaya peningkatan kualitas pemuda. Sehubungan dengan itu, tersedianya publikasi dan data yang mampu memberikan gambaran secara makro mengenai kondisi situasi pemuda Indonesia baik pada tingkat nasional maupun regional sangat dibutuhkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan publikasi Statistik Pemuda Tahun 2007 ini secara umum adalah untuk memperoleh gambaran secara rinci dan menyeluruh tentang profil pemuda di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun tingkat regional. Kondisi dan perkembangan pemuda dalam publikasi ini akan dilihat dari aspek demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan sosial budaya. Indikator penting yang dicakup dalam aspek demografi menyangkut perkembangan jumlah pemuda, rasio jenis kelamin dan angka ketergantungan yang menjadi beban pemuda. Aspek pendidikan dan ketenagakerjaan digambarkan oleh tingkat pendidikan yang ditamatkan, angkatan kerja dan tingkat pengangguran. Selanjutnya aspek kesehatan dan lingkungan menyangkut keluhan kesehatan, olah raga, kebiasaan tidur, buang air serta kebiasaan merokok dan penggunaan zat berbahaya.

Secara keseluruhan, publikasi ini menyajikan informasi berbagai aspek mengenai kepemudaan yang sangat bermanfaat sebagai bahan kebijakan pembangunan kepemudaan. Dalam jangka pendek, informasi yang disajikan dapat digunakan sebagai alat bantu dalam penyusunan berbagai upaya dalam rangka pemberdayaan pemuda sebagai generasi penerus bangsa.

1.3. Sistematika Penyajian

Publikasi statistik pemuda ini secara sistematis disajikan dalam tujuh bagian dan satu ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif di bagian awal publikasi dimaksudkan untuk memberikan gambaran ringkas dan menyeluruh kepada pembaca tentang keseluruhan isi publikasi. Kemudian uraian rinci diatur dalam bab-bab sesuai dengan tema besar bahasan dari publikasi. Pada bagian pertama (Bab I) disajikan latar belakang mengenai kepemudaan, tujuan termasuk ruang lingkup yang membatasi fokus dan cakupan analisis, dan sistematika penyajian. Bagian kedua (Bab II) menyajikan metodologi yang mencakup sumber data, konsep dan definisi, serta metode analisis. Empat

bagian berikutnya secara berturut-turut menyajikan gambaran mengenai kondisi dan perkembangan pemuda dari berbagai aspek diantaranya demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan dan lingkungan.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

METODOLOGI

<http://www.bps.go.id>



Metodologi

2.1. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2007. Jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data Kor Susenas Tahun 2007, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai kondisi dan potensi penduduk dari sisi demografi, kesehatan, ketenagakerjaan dan pendidikan.
- b. Data Modul Perumahan dan Kesehatan, sebagai dasar untuk memperoleh gambaran makro mengenai keterangan penguasaan bangunan tempat tinggal, kondisi fisik bangunan, fasilitas dan perlengkapan bangunan tempat

tinggal, kondisi lingkungan tempat tinggal dan akses dari tempat tinggal ke fasilitas umum

- c. Khusus untuk masalah ketenagakerjaan (Bab V), sumber data yang digunakan berasal dari Survey Ketenagakerjaan Nasional (Sakernas) Tahun 2007.

Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang cakupannya relatif sangat luas, meliputi keseluruhan aspek sosial dan ekonomi. Susenas dilaksanakan oleh BPS hampir setiap tahun sejak tahun 1963. Mulai tahun 1992 Susenas mengumpulkan data kor (keterangan pokok) dan data modul (keterangan khusus). Data kor dikumpulkan setiap tahun sedangkan data modul dikumpulkan setiap 3 tahun sekali. Data modul mencakup modul konsumsi dan pengeluaran rumah tangga, modul pendidikan dan sosial budaya serta modul perumahan dan kesehatan. Sesuai dengan gilirannya modul susenas tahun 2007 adalah perumahan dan kesehatan. Namun, dengan adanya Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang diselenggarakan oleh Departemen Kesehatan, modul Susenas Tahun 2007 hanyalah modul perumahan.

2.1.1 Ruang Lingkup

Sampel Susenas tahun 2007 mencakup 285.904 rumah tangga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang dicacah dengan menggunakan kuesioner kor (VSEN2007.K). Dengan jumlah sampel tersebut, estimasi data kor Susenas tahun 2007 dapat dilakukan hingga level kabupaten/kota tetapi tidak dapat disajikan menurut daerah perkotaan atau perdesaan. Sedangkan sampel rumah tangga data modul perumahan dan permukiman yang dicacah dengan menggunakan kuesioner VSEN2007.MP, mencakup 68.800 rumahtangga sehingga estimasinya hanya dapat dilakukan hingga level propinsi dan dapat disajikan menurut daerah perkotaan atau perdesaan. Susenas tahun 2007 tidak mencakup rumah tangga yang tinggal dalam blok sensus khusus seperti asrama, penjara dan sejenisnya yang berada di blok sensus biasa.

2.1.2 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan dalam Susenas tahun 2007 terdiri dari : 1) kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus. 2) kerangka sampel untuk pemilihan sub blok sensus (khusus untuk blok sensus yang mempunyai jumlah rumahtangga lebih besar dari 150 rumahtangga atau blok sensus yang telah dibuat sub-blok sensusnya pada saat *up-dating* sketsa peta blok sensus dalam rangka kegiatan Sensus Pertanian 2003), dan 3) kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga.

Kerangka sampel blok sensus dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perkotaan adalah daftar seluruh blok sensus biasa yang terdapat di daerah perkotaan di setiap kabupaten/kota, sedangkan kerangka sampel untuk pemilihan blok sensus di daerah perdesaan adalah daftar seluruh blok sensus biasa yang terdapat di daerah perdesaan di setiap kabupaten/kota.

Kerangka sampel untuk pemilihan sub-blok sensus adalah daftar sub-blok sensus dalam blok sensus terpilih yang mempunyai jumlah rumahtangga lebih besar dari 150 rumahtangga.

Kerangka sampel untuk pemilihan rumah tangga adalah daftar rumah tangga yang terdapat dalam daftar pendaftaran rumah tangga (VSEN2007.L Blok IV, hasil pendaftaran rumah tangga di lapangan).

2.1.3 Rancangan Penarikan Sampel

Kor

Sampel **Kor** Susenas tahun 2007 didesain untuk estimasi sampai tingkat kabupaten/kota. Rancangan sampel Susenas 2007 adalah rancangan sampel bertahap dua baik untuk daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Pemilihan sampel untuk daerah perkotaan dan daerah perdesaan dilakukan secara terpisah. Prosedur penarikan sampel Susenas tahun 2007 untuk suatu kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- 1 Tahap pertama, dari kerangka sampel blok sensus dipilih n_h blok sensus ($h = 1$, untuk perkotaan; $h = 2$, untuk perdesaan) secara *PPS* - sistematis dengan *size* banyaknya rumah tangga hasil pencacahan P4B (April 2003). Pendaftaran rumah tangga/*listing* dilakukan pada setiap blok sensus terpilih.
- 2 Tahap kedua, memilih $\bar{m} = 16$ rumah tangga pada setiap blok sensus terpilih secara sistematis.

Untuk blok sensus yang muatannya lebih dari 150 rumah tangga, maka perlu dilakukan pemilihan satu sub blok sensus secara *PPS* - sistematis dengan *size* banyaknya rumah tangga hasil pencacahan P4B.

Modul Perumahan dan Permukiman

Sampel modul merupakan subsampel dari sampel terpilih untuk estimasi data tingkat kabupaten/kota, baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Subsampel tersebut dipilih secara *Linear Systematic Sampling* dari daftar blok sensus terpilih di setiap kabupaten/kota baik untuk daerah perkotaan maupun perdesaan. Selanjutnya blok sensus terpilih (subsampel) tersebut disebut blok sensus kor-modul, karena di samping dicacah dengan kuesioner modul, juga dicacah dengan kuesioner kor. Dengan kata lain, blok sensus yang akan digunakan untuk estimasi di tingkat provinsi (blok sensus kor-modul) dipilih secara *Linear Systematic Sampling* dari daftar blok sensus terpilih di setiap kabupaten/kota (blok sensus kor). Blok sensus yang tidak terpilih kor-modul 2007 disebut blok sensus kor.

2.1.4 Metode Pengumpulan Data

Setiap rumah tangga yang terpilih dalam Susenas, dikunjungi oleh petugas pencacah yang diberikan tanggung jawab untuk mewawancarai responden. Wawancara dilakukan langsung terhadap kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga (selain kepala rumah tangga) yang dianggap mengetahui keadaan rumah tangga yang bersangkutan.

Sebelum pelaksanaan pengumpulan data, terlebih dahulu para petugas pengumpul data dilatih tentang tata cara pengisian kuesioner dan konsep/definisi. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi bias yang diakibatkan oleh faktor *non-sampling error*.

2.1.5 Petugas Lapangan

Dalam survei BPS berskala besar seperti Susenas, staf BPS Kabupaten/Kota atau Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dilibatkan sebagai pengawas (PMS), sedangkan yang menjadi pencacah (PCL) adalah mitra statistik, yaitu petugas yang direkrut dari luar BPS. Kualifikasi pendidikan mitra statistik adalah tamat SLTA dan dinyatakan lulus dalam pelatihan petugas PCL.

2.2. Konsep dan Definisi

2.2.1. Tipe Daerah

Untuk menentukan apakah suatu desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau perdesaan digunakan indikator komposit (indikator gabungan) berdasarkan skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses fasilitas umum. Penentuan skor suatu desa/kelurahan adalah seperti pada Tabel A. Kolom (1) menunjukkan variabel/klasifikasi yang digunakan, dan Kolom (2) menunjukkan nilai skor untuk setiap variabel.

Tabel A. Variabel, Klasifikasi, Skor & Kriteria Desa 2000

Variabel/Klasifikasi	Skor	Variabel/Klasifikasi	Skor
(1)	(2)	(1)	(2)
Total Skor		B) Sekolah Menengah Pertama	
● Skor Minimum	2	● Ada atau $\leq 2,5$ Km	1
● Skor Maksimum	26	● $> 2,5$ Km	0
1. Kepadatan		C) Sekolah Menengah Umum	

Penduduk/Km ² < 500	1	● Ada atau ≤ 2,5 Km	1
500 - 1 249	2	● > 2,5 Km	0
1 250 - 2 499	3	D) Pasar	
2 500 - 3 999	4	● Ada atau ≤ 2 Km	1
4 000 - 5 999	5	● > 2 Km	0
6 000 - 7 499	6	E) Bioskop	
7 500 - 8 499	7	● Ada atau ≤ 5 Km	1
8 500 +	8	● > 5 Km	0
2.Persentase Rumah Tangga Pertanian		F) Pertokoan	
70,00 +	1	● Ada atau ≤ 2 Km	1
50,00 – 69,99	2	● > 2 Km	0
30,00 – 49,99	3	G) Rumah Sakit	
20,00 – 29,99	4	● Ada atau ≤ 5 Km	1
15,00 – 19,99	5	● > 5 Km	0
10,00 – 14,99	6	H) Hotel/Bilyard/Dis- kotek/Panti pijat/ Salon	
5,00 – 9,99	7	● Ada	1
< 5,00	8	● Tidak ada	0
3.Akses Fasilitas Umum	0,1,2,.....10	I) Persentase Rumah Tangga Telepon	
		● ≥ 8,00	1
		● < 8,00	0
A) Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK)		J) Persentase Rumah Tangga Listrik	
● Ada atau ≤ 2,5 Km	1	● ≥ 90,00	1
● > 2,5 Km	0	● < 90,00	0

Cara perhitungan skor adalah sebagai berikut:

- a. Variabel kepadatan penduduk mempunyai skor antara 1-8, satu bagi desa dengan kepadatan kurang dari 500 orang per km², dua bagi desa dengan kepadatan kurang dari 500 - 1 249 orang per km² dan seterusnya sampai dengan 8 bagi desa dengan kepadatan lebih besar atau sama dengan 8 500 orang per km².
- b. Skor persentase rumah tangga pertanian berkisar 1 - 8, satu bila desa memiliki 70 persen atau lebih rumah tangga tani, dua bila 50 - 69,99 persen, dan seterusnya sampai dengan 8, bila desa mempunyai 5 persen atau kurang

- c. Variabel akses fasilitas umum merupakan kombinasi antara keberadaan dan akses untuk mencapai fasilitas perkotaan
- d. Skor untuk akses fasilitas umum adalah 1 dan 0. Desa-desa yang tidak memiliki fasilitas perkotaan tetapi jaraknya relatif dekat dengan fasilitas perkotaan dan atau mudah mencapainya, maka desa tersebut dianggap setara dengan desa yang memiliki fasilitas dan diberi skor 1, dengan pertimbangan mudahnya akses kepada perkotaan tersebut serupa dengan memiliki.
- e. Jumlah skor dari ketiga variabel tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Desa dengan skor gabungan 9 atau kurang digolongkan sebagai desa perdesaan, sedangkan desa dengan skor gabungan mencapai 10 atau lebih digolongkan sebagai desa perkotaan.
- f. Dalam pelaksanaannya penentuan apakah suatu desa/kelurahan termasuk daerah perkotaan atau perdesaan dilakukan oleh BPS Pusat dengan menggunakan hasil pendataan Potensi Desa (PODES) Sensus Penduduk 2000.

2.2.2. Blok Sensus

Blok sensus adalah bagian dari desa/kelurahan yang merupakan daerah kerja dari seorang petugas pencacah survei/sensus dengan pendekatan rumah tangga yang dilaksanakan BPS. Sesuai dengan rancangan sampel, blok sensus terpilih Susenas 2007 sudah ditentukan oleh BPS pusat segera setelah rancangan sampel selesai. Setiap blok sensus harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Seluruh blok sensus dalam setiap desa/kelurahan membagi habis wilayah desa/kelurahan bersangkutan.
2. Blok sensus harus mempunyai batas-batas yang jelas/mudah dikenali, baik batas alam maupun buatan. Batas satuan lingkungan setempat (SLS seperti: RT, RW, dusun, lingkungan dsb) diutamakan sebagai batas blok sensus bila batas SLS tersebut jelas (batas alam atau buatan).
3. Satu blok sensus harus terletak dalam satu hamparan.

Ada 3 jenis blok sensus yaitu:

Blok sensus biasa (B) adalah blok sensus yang muatannya antara 80 sampai 120 rumah tangga atau bangunan sensus tempat tinggal atau bangunan sensus bukan tempat tinggal atau gabungan keduanya dan sudah jenuh.

Blok sensus khusus (K) adalah blok sensus yang mempunyai muatan sekurang-kurangnya 100 orang, kecuali lembaga pemasyarakatan yang muatannya tidak dibatasi. Tempat-tempat yang bisa dijadikan blok sensus khusus, antara lain:

- Asrama militer (tangsi)
- Daerah perumahan militer dengan pintu keluar masuk yang dijaga

Blok sensus persiapan (P) adalah blok sensus yang kosong seperti sawah, kebun, tegalan, rawa, hutan, daerah yang dikosongkan (digusur) atau bekas permukiman yang terbakar.

Blok sensus khusus dan blok sensus persiapan bukan merupakan bagian dari kerangka sampel Susenas

2.2.3. Rumah tangga dan Anggota Rumah Tangga

Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa.

Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat pindah.

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah (akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih).

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap **dianggap** sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah tersebut.

Pemuda adalah penduduk berumur 15-35 tahun

Kawin adalah mempunyai isteri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri.

Cerai hidup adalah berpisah sebagai suami-isteri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi mengaku pernah hamil, dianggap sebagai cerai hidup.

Cerai mati adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi.

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara penduduk pria dan wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk pria per 100 wanita.

Buta Huruf adalah tidak dapat membaca surat atau kalimat sederhana dengan suatu huruf, termasuk huruf Braille. Orang cacat yang pernah dapat membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf.

Angka Partisipasi Sekolah adalah nilai perbandingan (dalam persen) banyaknya penduduk yang bersekolah terhadap total penduduk, menurut batasan umur sekolah pada setiap jenjang pendidikan formal.

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang sudah ditamatkan oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki dan ditamatkan oleh seseorang yang masih bersekolah

Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah adalah sekolah dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, sekolah dasar pamong).

Sekolah lanjutan pertama (SLTP)/Madrasah Tsanawiyah/sederajat/kejuruan adalah sekolah lanjutan tingkat pertama baik umum maupun kejuruan, madrasah tsanawiyah atau yang sederajat (MULO, HBS 3 tahun, sekolah luar biasa menengah pertama, sekolah kepandaian putri atau SKP, sekolah menengah ekonomi pertama/SMEP, sekolah tehnik (ST), sekolah kesejahteraan keluarga pertama/SKKP, sekolah ketrampilan kejuruan, sekolah usaha tani, sekolah pertanian menengah pertama, sekolah guru Bantu/SGB, pendidikan guru agama/PGA, kursus pegawai administrasi atau KPA, pendidikan pegawai urusan peradilan agama).

SM/Sekolah menengah umum (SMU)/ Sekolah menengah kejuruan (SM Kejuruan)/ Madrasah Aliyah/sederajat adalah sekolah menengah umum (SMU), sekolah kejuruan setingkat SMU(SMEA, SMPS, SGO dll), Madrasah Aliyah atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA)).

Dipl/Sarjana adalah program DI/DII/DIII atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda, program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi, program pendidikan pasca sarjana (master atau doctor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi.

Angkatan Kerja adalah penduduk 10 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun sementara tidak bekerja, atau yang sedang mencari pekerjaan.

Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas yang selama seminggu sebelum pencacahan hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya. Dapat juga berarti tidak melakukan kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi).

Menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja tetapi tidak bekerja

Mencari Pekerjaan adalah kegiatan dari mereka yang bekerja tetapi karena suatu hal masih mencari pekerjaan; atau mereka yang dibebaskan tugas dan akan dipanggil kembali tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila seseorang telah/sedang

melakukan tindakan nyata seperti mengumpulkan modal atau alat, mencari lokasi, mengurus surat ijin usaha, dsb.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$$

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas. Namun untuk publikasi ini umur terbatas 15-35 tahun.

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja

Status Pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, berusaha dibantu buruh tetap, atau buruh/karyawan.

Jam Kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.

Tingkat Pengangguran adalah persentase angkatan kerja yang aktif mencari pekerjaan dan tidak sedang mempunyai pekerjaan, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Orang yang Mencari Pekerjaan}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan baik karena penyakit, kecelakaan, kriminal dll.

Sakit adalah menderita penyakit baik akut maupun kronis atau gangguan kesehatan lainnya yang menyebabkan aktifitas kerja terganggu. Orang yang mempunyai keluhan kesehatan (misalnya masuk angin atau pilek) tetapi kegiatan sehari-harinya tidak terganggu dianggap tidak sakit.

2.3. Keterbatasan Data

Disadari ada keterbatasan data yang digunakan dalam penyajian publikasi ini. Penjelasan berikut diharapkan dapat lebih memperjelas dan mempermudah bagi pengguna dan pembaca publikasi ini dalam menafsirkan data yang disajikan. Survei-survei dengan pendekatan rumah tangga yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) termasuk Susenas hanya mencakup populasi yang tinggal di suatu rumah tangga biasa. Penduduk yang tinggal di rumah tangga khusus tidak di cakup.

2.4. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana dan visualisasi berupa gambar/grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan serta antar wilayah provinsi. Selain itu disertakan juga analisis tren dalam upaya memperoleh gambaran secara rinci mengenai kecenderungan perkembangan kegiatan sosial budaya selama beberapa periode waktu. Pada bagian akhir publikasi ini dilengkapi pula dengan tabel lampiran untuk melihat data pada tingkat provinsi.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

*PROFIL DEMOGRAFIS
PEMUDA*

<http://www.usaid>



Profil Demografis Pemuda

Pemuda mempunyai peran yang sangat penting dan strategis pada semua aspek pembangunan. Jumlah pemuda yang sangat besar merupakan potensi yang sangat besar sebagai modal pembangunan. Disisi lain jumlah pemuda yang sangat besar juga dapat menjadi beban bagi pembangunan, bila jumlah pemuda yang besar tersebut tidak terserap dalam proses pembangunan.

Berkaitan dengan hal ini maka dalam setiap tahapan pembangunan, pemuda selalu dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan, pemuda merupakan pelaku pembangunan dan sebagai objek pembangunan pemuda merupakan sasaran pembangunan yang secara terus menerus dan sistematis dilakukan upaya peningkatan kualitas. Semua upaya pembangunan tersebut dalam rangka mempersiapkan pemuda sebagai

penggerak pembangunan dan sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan nasional.

Pada tulisan ini, batasan untuk mendefinisikan pemuda adalah berdasarkan umur yaitu 15-39 tahun. Batasan ini berbeda beberapa negara, secara internasional WHO menyebut pemuda sebagai *young people* dengan batas usia 10-24 tahun, sedangkan usia 10-19 tahun disebut *adolesceneae* atau remaja. Negara Canada memberikan batasan *after age 24, youth are no longer eligible for adolescent social services*, sehingga batasan pemuda paling tinggi 24 tahun. Dalam kategori ini, dibedakan antara remaja (13-19 tahun) dan dewasa muda (20-24 tahun) sesuai dengan perkembangan sosial, psikologi dan kesehatan. Sedangkan secara harfiah, kamus *Websters, Princeton* mengartikan bahwa *youth* yang diterjemahkan sebagai pemuda, adalah *the time of life between childhood and maturity; early maturity; the state of being young or immature or inexperienced; the freshness and vitality characteristic of a young person*. Dari semua definisi ini, dapat diinterpretasikan bahwa pemuda merupakan individu dengan karakter yang dinamis, bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil. Pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun kultural (Dra. Titin Supenti, MA. Kondisi Tenaga Kerja Pemuda).

Kondisi pemuda di Indonesia secara lebih rinci dapat dilihat secara kuantitas maupun kualitasnya. Secara kuantitas, dapat dilihat melalui komposisi jumlah penduduk usia 15-35 tahun dengan berbagai karakteristiknya. Pada bagian ini akan dilihat gambaran mengenai struktur demografis pemuda dari beberapa karakteristik seperti jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan hubungan dengan kepala rumah tangga, sedangkan kualitas pemuda dapat dilihat pada pendidikan, ketenagakerjaan dan kesehatan yang dibahas pada bab-bab berikutnya.

3.1. Jumlah Pemuda

Generasi muda atau pemuda merupakan bagian dari kelompok penduduk usia produktif yang sangat potensial bagi penunjang kegiatan ekonomi. Sepertiga lebih penduduk Indonesia merupakan kelompok pemuda. Jumlah pemuda yang relatif banyak, merupakan potensi/aset yang besar sebagai sumber daya manusia, yang dapat diandalkan dalam pembangunan. Pemuda akan menempati posisi penting dan strategis, sebagai insan pelopor penggerak pembangunan maupun sebagai sumber daya manusia, diharapkan pemuda mampu menghadapi berbagai tantangan dan mampu memanfaatkan peluang dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil Susenas 2007 diperkirakan pemuda Indonesia berjumlah sekitar 79 juta jiwa atau 35,07 persen dari jumlah penduduk Indonesia secara keseluruhan yang saat ini berjumlah lebih dari 225 juta orang (Tabel 3.1.1). Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga dari seluruh penduduk Indonesia didominasi oleh golongan penduduk muda usia. Dibandingkan dengan komposisi kelompok penduduk usia lainnya, persentase jumlah penduduk yang berumur kurang dari 15 tahun dan lebih dari 35 tahun masing-masing hanya sebesar 29,30 persen dan 35,63 persen.

Tabel 3.1.1. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Daerah Tempat Tinggal Tahun 2007

Kelompok Umur (Tahun)	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
< 15	12,06	17,22	29,30 (65.974.292)
15 - 35	16,40	18,67	35,07 (78.973.728)
> 35	15,26	20,36	35,63 (80.229.438)
Total	43,74	56,26	100,00 (225.177.458)
10 +	44,18	55,82	100,00 (182.112.442)
15 +	44,78	55,22	100,00 (159.203.166)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

3.2. Struktur Pemuda Menurut Jenis Kelamin

Jumlah penduduk yang besar bukan jaminan keberhasilan suatu pembangunan, peningkatan pertumbuhan penduduk yang besar tanpa adanya peningkatan kesejahteraan justru bisa menjadi bencana, yang pada gilirannya dapat menimbulkan gangguan terhadap program-program pembangunan yang sedang dilaksanakan. Pemerintah berupaya menekan laju pertumbuhan melalui Program Keluarga Berencana yang dicanangkan di akhir tahun 1960-an, yang tujuan mempercepat penurunan angka kelahiran, mengatasi masalah peledakan penduduk. Upaya telah berhasil, hal ini salah satunya ditunjukkan dengan menurunnya beban/angka ketergantungan muda, struktur dalam keluarga (jumlah keluarga mengecil) dan orangtua mulai mendapatkan kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas anak-anaknya.

Sejalan dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk, jumlah pemudapun meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tabel 3.2.1, secara umum terlihat persentase komposisi pemuda dari tahun 2003 sampai dengan 2007. Gambaran pemuda di daerah perkotaan dan perdesaan menunjukkan bahwa persentase pemuda perempuan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda laki-laki. Tahun 2007 ini persentase pemuda perempuan sebesar 50,57 persen sedangkan pemuda laki-laki sebesar 49,43 persen. Pola yang sama terjadi di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan dengan persentase yang tidak jauh berbeda.

Tabel 3.2.1. Persentase Pemuda Menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Tahun 2003-2007

Jenis Kelamin	2003		2005		2007	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	48,91	51,09	49,01	50,99	48,99	51,01
Perdesaan	49,41	50,59	49,79	50,21	49,82	50,18
Kota + Desa	49,19	50,81	49,42	50,58	49,43	50,57

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2003-2007

Tabel 3.2 lampiran menunjukkan bahwa jumlah pemuda laki-laki sedikit lebih rendah dibanding perempuan yang tercermin dari rasio jenis kelamin yang kurang dari 100. Rasio jenis kelamin pemuda pada tahun 2007 adalah sebesar 97,75 yang menunjukkan bahwa secara rata-rata untuk setiap 100 pemuda perempuan hanya terdapat sekitar 98 pemuda laki-laki. Hal ini mengisyaratkan agar dalam setiap penyusunan kebijakan senantiasa mempertimbangkan faktor gender. Sebaran rasio jenis kelamin pemuda menurut provinsi Tahun 2007, menunjukkan bahwa beberapa provinsi memiliki rasio jenis kelamin pemuda lebih dari 100, artinya jumlah pemuda laki-laki lebih besar dibandingkan pemuda perempuan. Provinsi yang memiliki rasio jenis kelamin lebih dari 100 adalah Lampung (107,37), Bangka Belitung (107,25), DI Yogyakarta (106,74), Kaltim 104,29), Kalbar (103,82), Riau (103,36), Sulawesi Utara (102,96), Kalimantan Tengah (102,74), Sumatera Selatan (102,68) dan NTB (101,01), dan Jabar (100,27).

3.3. Struktur Pemuda Menurut Tipe Daerah

Keadaan geografis serta luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) turut berperan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan, kesenjangan terhadap hasil pembangunan sangat terasa terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari pusat kota. Pola hidup penduduk yang berbeda antara yang tinggal di pusat kota dan yang jauh dari pusat kota serta tingkat kemajuan ekonomi, menjadi daya tarik tersendiri untuk tinggal diperkotaan. Ini hanyalah salah satu faktor yang menyebabkan orang melakukan urbanisasi, faktor lainnya seperti keinginan mengembangkan diri (peningkatan pendidikan), kota dianggap menjanjikan kehidupan yang lebih baik, tersedianya lapangan kerja/usaha yang lebih luas dan tersedianya fasilitas pendidikan maupun fasilitas-fasilitas lain. Disisi lain di daerah perkotaan penuh dengan tantangan/persaingan hidup, sedangkan di perdesaan peluang untuk bekerja di sektor pertanian kurang begitu diminati walaupun tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan pendidikan formal tinggi.

Walaupun daerah perkotaan memberikan gambaran menjanjikan, namun demikian untuk pemuda, dilihat perkembangannya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007, ternyata pemuda masih lebih banyak tinggal di daerah perdesaan seperti yang disajikan pada Tabel 3.3.1. Persentase pemuda di daerah perdesaan (53,25 persen) lebih besar dari pada di daerah perkotaan (46,75 persen). Pola yang sama terjadi baik pada pemuda laki-laki maupun pemuda perempuan. Sekitar 53,66 persen pemuda laki-laki tinggal di daerah perdesaan, dan 46,34 persen tinggal di daerah perkotaan. Sementara itu, persentase pemuda perempuan di daerah perdesaan sebesar 52,84 persen sedangkan di daerah perkotaan hanya sebesar 47,16 persen.

Tabel 3.3.1. Persentase Pemuda Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2003-2007

Jenis Kelamin	2003		2005		2007	
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	45,02	54,98	46,62	53,38	46,34	53,66
Perempuan	45,52	54,48	47,39	52,61	47,16	52,84
Laki-laki + Perempuan	45,28	54,72	47,01	52,99	46,75	53,25

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2003-2007

Seperti yang sudah dikemukakan diatas, penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan salah satu permasalahan dalam proses pembangunan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebaran penduduknya tidak merata. Kondisi ini terjadi pula pada kelompok penduduk berusia muda seperti yang disajikan pada Tabel 3.3.2. Penduduk Indonesia sebagian besar berada di pulau Jawa, pemuda sebagai komponen terbesar penduduk juga lebih banyak terkonsentrasi di pulau Jawa (56,95 persen).

Ini berarti hampir 60 persen pemuda berada di pulau Jawa, sisanya berturut-turut tersebar di pulau Sumatera (22,28 persen), Sulawesi (7,31 persen), Kalimantan (4,54 persen) dan pulau-pulau lainnya seperti Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (8,93 persen).

Penyebaran pemuda yang tidak merata, menunjukkan bahwa tingkat kepadatan pemuda pada masing-masing wilayah berbeda. Hal ini berimplikasi pada keseimbangan potensi yang tidak merata.

Tabel 3.3.2 Persentase Pemuda Menurut Pulau/Kepulauan dan Jenis Kelamin Tahun 2007

Pulau/ Kepulauan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)

Sumatera	22,43	22,13	22,28
Jawa	56,94	56,95	56,95
Kalimantan	4,62	4,47	4,54
Sulawesi	7,20	7,41	7,31
Kepulauan Lainnya	8,82	9,04	8,93
Indonesia	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

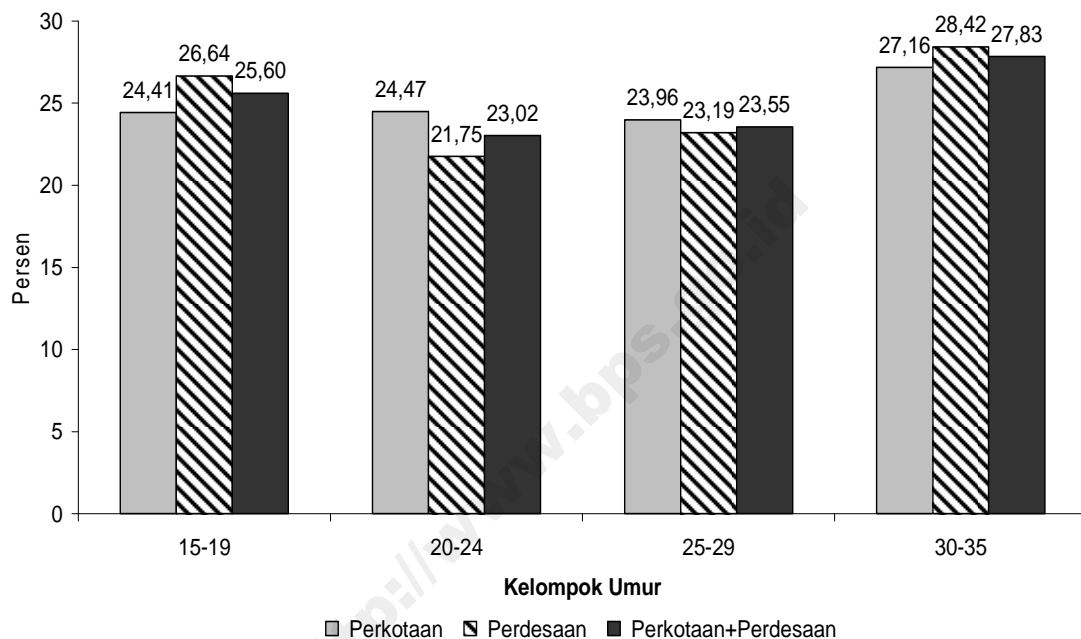
Dilihat dari distribusi provinsi (Tabel 3.1 lampiran), tiga provinsi yang memiliki jumlah pemuda terbanyak yaitu Jawa Barat (14,09 juta), Jawa Timur (11,84 juta) dan Jawa Tengah (10,32 juta), sedangkan tiga provinsi yang memiliki jumlah pemuda paling sedikit yaitu Irian Jaya Barat (0,26 juta), Gorontalo (0,34 juta) dan Maluku Utara (0,35 juta).

3.4. Struktur Pemuda Menurut Kelompok Umur

Distribusi penduduk menurut umur memperlihatkan dampak pengendalian angka kematian bayi dan perkembangan usia harapan hidup yang biasa digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Pada tulisan ini struktur umur pemuda pada tahun 2007 disajikan pada Gambar 3.4.1, komposisi pemuda menurut kelompok umur hampir sama, komponen terbesar pemuda berada pada kelompok umur 30-35 tahun dengan persentase sebesar 27,83 persen, kemudian kelompok 15-19 tahun sekitar 25,60 persen, kelompok 25-29 tahun 23,56 persen dan kelompok 20-24 tahun 23,02 persen. Pola yang sama terjadi di daerah perdesaan. Di daerah perdesaan pemuda berada pada kelompok umur 30-35 tahun dengan persentase sebesar 28,42 persen, kemudian kelompok 15-19 tahun 26,64 persen, kelompok 25-29 tahun 23,19 persen dan kelompok 20-24 tahun 21,75 persen. Demikian pula untuk daerah perkotaan, persentase

pemuda yang berada pada kelompok umur 30-35 tahun sebesar 27,16 persen, kemudian kelompok 20-24 tahun 24,47 persen, kelompok 15-19 tahun 24,41 persen dan kelompok 25-29 tahun 23,96 persen.

Gambar 3.4.1. Persentase Pemuda menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, Tahun 2007



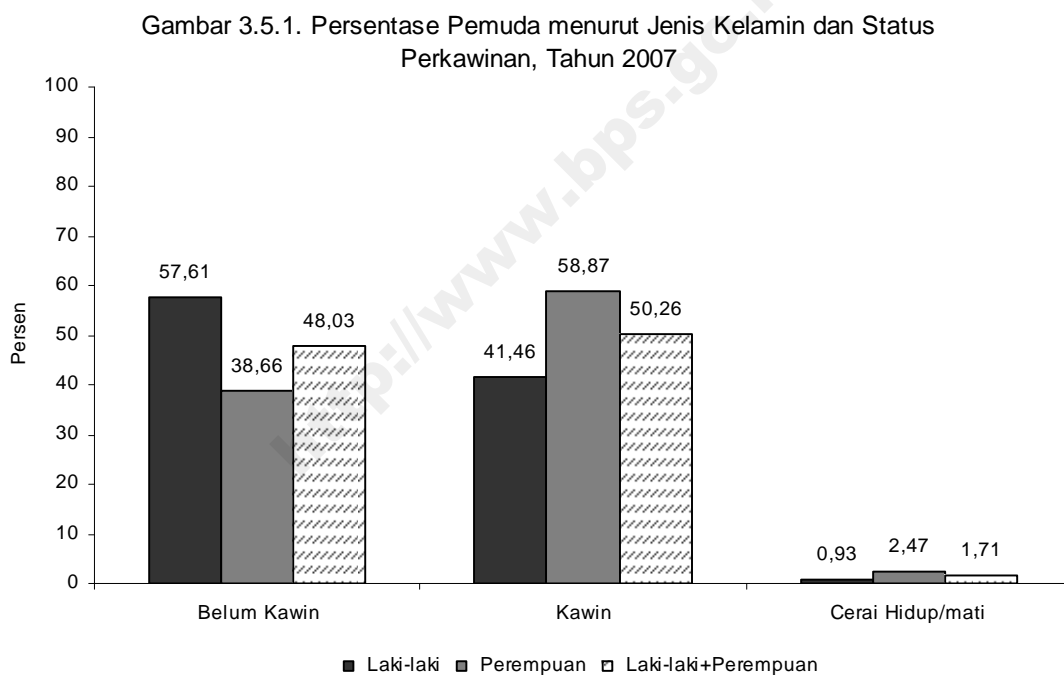
Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

3.5. Struktur Perkawinan Pemuda

Tingkat pendidikan dan budaya suatu wilayah mempengaruhi umur perkawinan pertama suatu masyarakat. Dalam UU No. 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, kenyataan masih terdapat perkawinan diusia muda yang umumnya terjadi di daerah perdesaan terutama pada penduduk perempuan.

Hasil Susenas tahun 2007 memperlihatkan bahwa hampir separuh pemuda (50,26 persen) berstatus kawin seperti yang terlihat pada Gambar 3.5.1. Selain itu, persentase pemuda yang berstatus belum kawin juga relatif besar (48,03 persen) dan hanya berbeda sedikit dengan pemuda yang berstatus kawin (50,26 persen). Sisanya adalah mereka yang berstatus cerai hidup/mati (1,71 persen).

Gambar 3.5.1 memberikan gambaran persentase pemuda menurut status perkawinan dan jenis kelamin. Terlihat pada gambar tersebut adanya perbedaan pola perkawinan antara pemuda laki-laki dan pemuda perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pola perkawinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

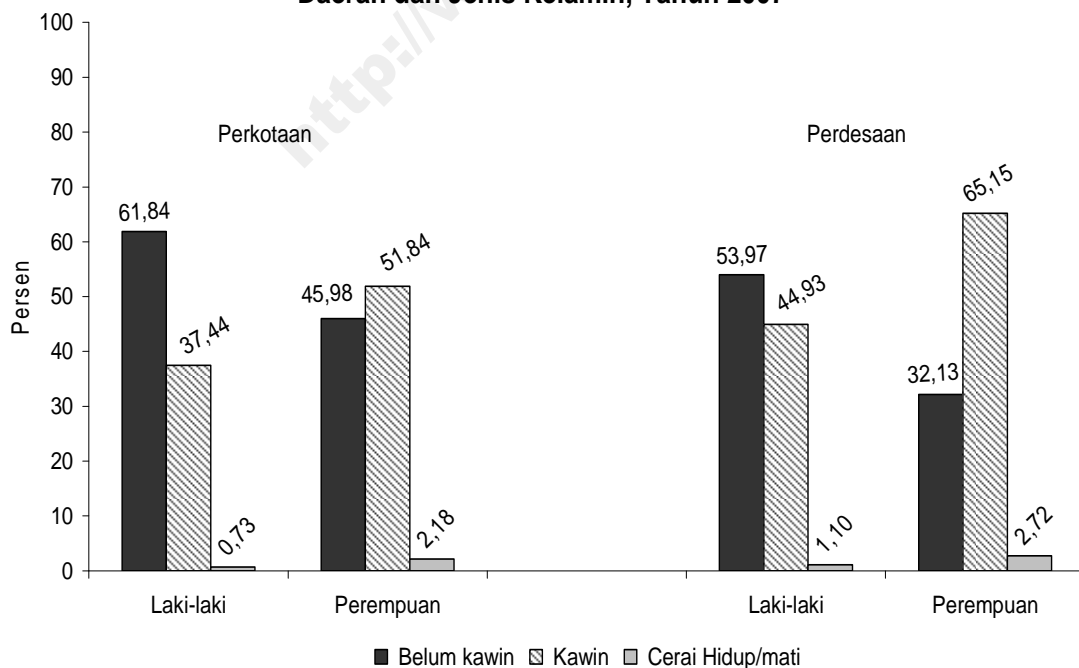
Lebih dari separuh pemuda perempuan yaitu sebanyak 58,87 persen berstatus kawin, sedangkan pemuda laki-laki hanya 41,46 persen. Sementara itu, untuk pemuda laki-laki sebagian besar (57,62 persen) berstatus belum kawin, sedangkan pemuda perempuan yang belum kawin hanya sebesar 38,66

persen. Perbedaan kedua angka ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemuda perempuan pada umumnya lebih cepat menikah dan lebih banyak yang sudah berkeluarga dibandingkan dengan pemuda laki-laki.

Gambar 3.5.2. menunjukkan persentase pemuda menurut status perkawinan, tipe daerah dan jenis kelamin. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa di daerah perkotaan, perbandingan pemuda laki-laki dan perempuan yang berstatus kawin sangat mencolok. Persentase pemuda yang berstatus kawin hanya sebesar 37,44 persen sedangkan untuk pemuda perempuan mencapai 61,84 persen. Pola yang sama terjadi di daerah perdesaan .

Sementara itu, di daerah perdesaan tampak pemuda perempuan yang berstatus kawin (65,15 persen) cukup significant jika dibandingkan dengan pemuda perempuan yang berstatus belum kawin (32,13 persen). Jika diperhatikan hal ini sesuai dengan pola budaya kita dimana perkawinan muda umumnya terjadi pada penduduk perempuan dan juga lebih banyak terjadi di daerah perdesaan.

Gambar 3.5.2. Persentase Pemuda menurut Status Perkawinan, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2007



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Selanjutnya bila diperhatikan menurut kelompok umur pada pemuda berstatus pernah kawin (berstatus kawin, dan cerai hidup maupun cerai mati) pada kelompok umur muda (15-19 tahun) di daerah perdesaan mencapai 8,17 persen, sedangkan di daerah perkotaan hanya sebesar 3,53 persen. Padahal mereka seharusnya masih mengenyam pendidikan di bangku sekolah.

Pada tabel tersebut terlihat pula bahwa pemuda perempuan di daerah perdesaan yang menikah pada usia muda (15-19 tahun) jauh lebih besar dibandingkan pemuda laki-laki yaitu 15,05 persen berbanding 2,02 persen. Kondisi seperti ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, persentase pemuda perempuan usia 15-19 tahun yang pernah kawin persentasenya lebih kecil dibandingkan daerah perdesaan yaitu sebesar 5,78 persen, sedangkan pemuda laki-laki hanya 1,26 persen.

Tabel 3.5.1 .Persentase Pemuda yang Pernah Kawin Menurut Kelompok Umur, Tipe daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007

Kelompok Umur	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15 - 19	1,26	5,78	3,53	2,02	15,05	8,17	1,69	10,78	6,10
20 - 24	14,22	39,64	27,36	25,23	67,10	46,51	19,80	53,34	36,99
25 - 29	51,00	75,53	63,53	66,48	90,02	78,68	59,06	83,18	71,47
30 - 35	81,91	90,74	86,42	90,27	95,79	93,09	86,45	93,49	90,05

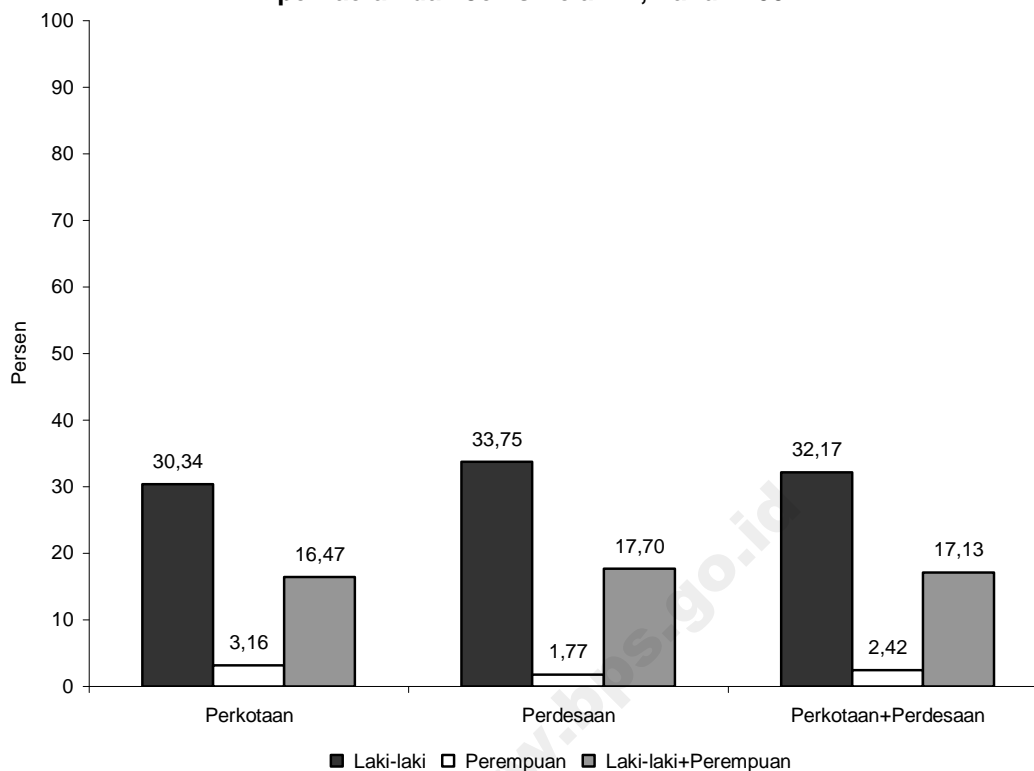
Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

3.6. Pemuda sebagai Kepala Rumah Tangga

Dalam sebuah rumah tangga, kesejahteraan, kebahagiaan dan kedamaiannya tidak terlepas dari peran serta seluruh anggota rumah tangga, terutama kepala rumah tangganya. Sosok kepala rumah tangga sangat berperan dalam menentukan arah dan kelangsungan sebuah rumah tangga. Kepala rumah tangga bertanggung jawab secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota rumah tangganya, karenanya kepala rumah tangga banyak berperan dalam pengambilan keputusan di dalam rumah tangganya. UU No. 1 thn 1974 tentang Perkawinan, pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; (2).masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;(3).Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Peran kepala rumah tangga adalah sebagai penguasa utama rumah tangga yang memiliki hak-hak istimewa dan otoritas terbesar dalam keluarga. Anggota keluarga lain termasuk isteri harus tunduk kepada penguasa utama tersebut. Laki-laki dalam posisinya sebagai suami dan ayah merupakan figur sentral dalam keluarga. Kewibawaan, harga diri, dan status sosial ayah atau suami harus dijaga oleh anggota keluarga karena atribut-atribut tersebut sangat menentukan status dan kedudukan keluarga dalam masyarakat (Kusujiarti, dalam Abdullah, 1997).

Gambar 3.6.1. Persentase Pemuda Kepala Rumah Tangga menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2007



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Laki-laki sebagai kepala rumah tangga sangat mendominasi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil Susenas 2007 menunjukkan bahwa dari seluruh pemuda di Indonesia, sekitar 17,13 persen diantaranya berstatus sebagai kepala rumah tangga. Persentase pemuda laki-laki sebagai kepala rumah tangga (32,17 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan pemuda perempuan kepala rumah tangga (2,42 persen). Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan (Gambar 3.6.1).

Berdasarkan kelompok umur tampak bahwa semakin tua umur pemuda, semakin tinggi persentase yang menjadi kepala rumah tangga, kondisi ini sejalan dengan pemuda berstatus kawin. Pemuda sebagai kepala rumah tangga pada kelompok umur 15-19 tahun kurang dari satu persen, kelompok umur 20-

24 tahun sebesar 7,18 persen, kelompok umur 25-29 tahun sebesar 21,01 persen dan sebesar 37,08 persen merupakan kelompok umur 30-35 tahun. Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan (Tabel 3.6.1)

Tabel 3.6.1 Persentase Pemuda yang Berstatus Kepala Rumah Tangga Menurut Kelompok Umur, Tipe daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007

Kelompok Umur	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan+Pedesaan		
	Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P	Laki-laki	Perempuan	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15 - 19	1,19	1,27	1,23	0,64	0,28	0,48	0,88	0,74	0,81
20 - 24	11,75	5,07	8,30	11,46	0,87	6,08	11,60	2,98	7,18
25 - 29	36,59	2,99	19,43	44,59	1,84	22,44	40,76	2,39	21,01
30 - 35	68,05	3,22	34,94	75,78	3,67	38,88	72,25	3,47	37,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

*PENDIDIKAN
PEMUDA*

<http://www.usaid>



Pendidikan Pemuda

Pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan Pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa di masa depan, bahkan lebih penting lagi sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan antarbangsa yang berlangsung sangat ketat. Dengan demikian, pendidikan menjadi syarat

mutlak yang harus dipenuhi karena ia merupakan faktor determinan bagi suatu bangsa untuk bisa memenangi kompetisi global.

Berbagai studi menunjukkan, pendidikan bukan saja penting untuk membangun masyarakat terpelajar yang menjelma dalam wujud massa kritis (*critical mass*), tetapi juga dapat menjadi landasan yang kuat untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja yang memiliki pengetahuan, menguasai teknologi, dan mempunyai keahlian dan keterampilan. Tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan yang memadai akan memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas nasional. Generasi muda atau pemuda merupakan kelompok usia produktif adalah aset pembangunan tidak terlepas dari tuntutan tersebut, pemuda harus memiliki pendidikan yang berkualitas sebagai bekalnya untuk berperan aktif dalam pembangunan.

Memenuhi kebutuhan akan pendidikan yang berkualitas terutama bagi generasi muda, pemerintah merumuskan pembangunan pendidikan merujuk pada konvensi internasional mengenai pendidikan atau berkaitan dengan pembangunan pendidikan {seperti pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*), *Millenium Development Goals* (MDGs), dan *World Summit on Sustainable Development*} dan dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, kebijakan pembangunan Pendidikan pada tahun 2007 mencakup (i) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (ii) peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, dan (iii) pemantapan *good governance*, yang dirinci antara lain sebagai berikut: Memperluas akses pendidikan dasar bermutu yang lebih merata dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada penduduk miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan terpencil, daerah konflik, wilayah kepulauan, dan masyarakat penyandang cacat melalui penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS), pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan termasuk pembangunan SD-SMP dan MI-MTs satu atap, serta pembangunan asrama murid dan mess guru di daerah terpencil. Meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan menengah seluas-luasnya baik melalui jalur formal maupun non formal, yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui

penyediaan beasiswa untuk siswa miskin, penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan, dan pengembangan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri sejalan dengan upaya meningkatkan relevansi pendidikan menengah dengan kebutuhan pasar kerja.

Pada bab ini akan dibahas mengenai partisipasi pendidikan pemuda, untuk melihat kualitas pemuda, akses dan partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan. Indikator pendidikan yang akan diteliti antara lain mencakup angka partisipasi sekolah, angka buta huruf, rata-rata lama sekolah dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

4.1. Partisipasi Pendidikan Pemuda

Melihat sedemikian penting peranan pendidikan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf pendidikan, namun demikian pembangunan pendidikan masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan terutama berkaitan dengan perluasan akses dan pemerataan pendidikan pada jalur formal. Oleh karenanya peran serta masyarakat untuk memperluas akses pendidikan bagi segala lapisan masyarakat sangat diperlukan. Demikian halnya dengan pemuda, peran aktif pemuda dalam partisipasi pendidikan begitu dominan dalam keberhasilan sebuah pembangunan. Partisipasi pendidikan pemuda berupa akses pemuda pada kegiatan pendidikan (formal) biasa dilihat melalui indikator status bersekolah, sedangkan partisipasi pendidikan pemuda berupa peran serta dan kontribusi pemuda dalam kegiatan pendidikan (formal) pada umumnya dilihat melalui indikator angka partisipasi sekolah.

Besarnya akses pemuda pada kegiatan sekolah ditunjukkan oleh persentase pemuda yang tidak pernah sekolah terhadap populasi pemuda secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase pemuda yang tidak pernah sekolah menunjukkan akses pemuda pada kegiatan sekolah yang semakin rendah, dan sebaliknya. Sementara itu, persentase pemuda yang masih sekolah

menunjukkan tingkat perluasan kesempatan bagi pemuda untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Semakin tinggi persentase pemuda yang masih bersekolah menunjukkan semakin luasnya kesempatan bagi para pemuda untuk memperoleh pendidikan, dan sebaliknya. Hasil Susenas 2007 menunjukkan bahwa dari 100 orang pemuda ada 82 orang pemuda yang tidak bersekolah lagi, 2 orang yang tidak/belum pernah sekolah dan hanya 16 orang yang berstatus masih sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya akses dan kesempatan pemuda untuk memperoleh pendidikan belum cukup berarti.

Sasaran pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2009 adalah meningkatnya akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat, yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dapat dilihat melalui tiga aspek utama yaitu pemerataan berdasarkan tipe daerah, jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

Tabel 4.1.1. Persentase Pemuda Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Tahun 2003-2007

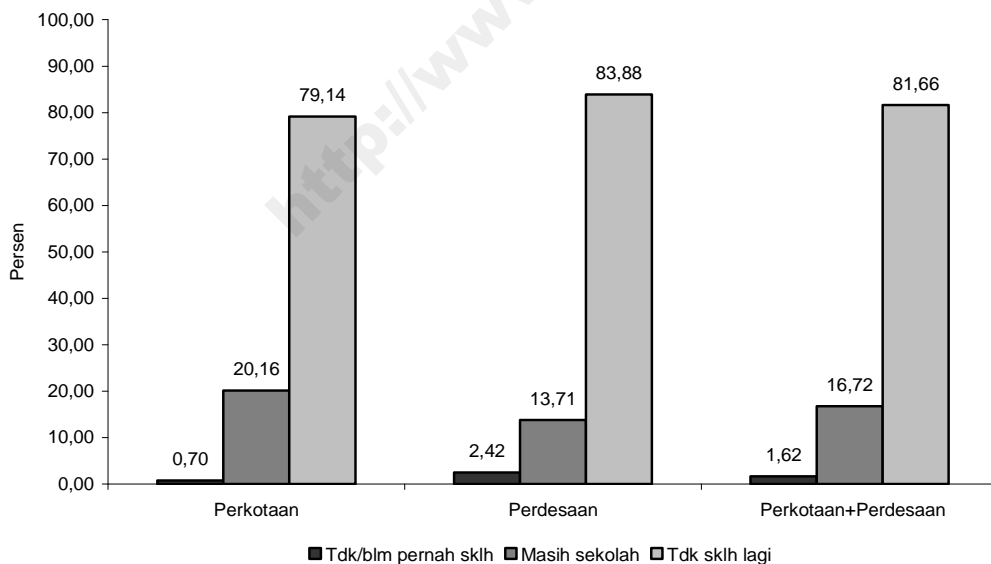
Jenis Kelamin	2003			2005			2007		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tdk/blm prnh sklh	1,42	2,62	2,03	1,32	2,14	1,74	1.27	1.95	1.62
Masih Sekolah	16,90	14,80	15,83	17,25	15,51	16,37	17.48	15.98	16.72
Tdk sklh lagi	81,68	82,58	82,13	81,44	82,35	81,90	81.25	82.06	81.66

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2003-2007

Dari Tahun 2003 hingga pada tahun 2007 diperoleh gambaran bahwa pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi laki-laki dan

perempuan sesuai dengan RPJM 2004-2009 masih belum mencapai hasil yang diharapkan seperti yang terlihat pada Tabel 4.1.1. Secara nasional pendidikan pemuda laki-laki terlihat lebih tinggi dibandingkan pemuda perempuan. Selama tahun 2003 hingga tahun 2007 ditunjukkan masih lebih tingginya persentase pemuda perempuan yang tidak pernah sekolah dibandingkan dengan persentase pemuda laki-laki. Begitu pula dengan pemuda perempuan yang tidak bersekolah lagi mempunyai persentase yang lebih besar daripada pemuda laki-laki. Sementara itu, persentase pemuda perempuan yang masih bersekolah terlihat lebih rendah dari persentase pemuda laki-laki. Pada Tahun 2003 pemuda yang tdk belum/ pernah sekolah persentasenya sebesar 2,03 persen kemudian pada tahun 2007 turun menjadi 1,62 persen, demikian pula halnya dengan pemuda yang tidak bersekolah lagi, pada tahun 2003 persentasenya sebesar 82,13 persen turun menjadi 81,66 persen pada tahun 2007.

Gambar 4.1.1. Persentase Pemuda menurut Tipe Daerah dan Status Sekolah, Tahun 2007



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Bila dilihat berdasarkan tipe daerah, secara umum terlihat adanya perbedaan yang cukup significant antara partisipasi pendidikan pemuda di

perkotaan dan di perdesaan, hal ini membuktikan indikasi belum meratanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan antara daerah perkotaan dan perdesaan. Seperti yang terlihat pada Gambar 4.1.1, partisipasi sekolah pemuda di daerah perkotaan masih jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Persentase pemuda yang masih bersekolah di perkotaan adalah sebesar 20,16 persen, sedangkan di daerah perdesaan hanya sebesar 13,71 persen. Di sisi lain, persentase pemuda yang tidak pernah/belum bersekolah di daerah perdesaan tiga kali lipat lebih besar (2,42 persen) dibandingkan dengan mereka yang tidak pernah sekolah di perkotaan yang hanya sebesar 0,70 persen.

Dilihat sebarannya per provinsi, status pendidikan pemuda di berbagai provinsi menunjukkan persentase yang bervariasi (Tabel Lampiran 4.2). Persentase pemuda yang tidak/belum pernah sekolah angkanya berkisar antara 0,40 persen hingga 6,16 persen kecuali di provinsi Papua yaitu sebesar 21,09 persen. Persentase pemuda yang tidak sekolah lagi sebarannya berkisar antara 70,10 persen hingga 87,31 persen kecuali di provinsi Papua terjadi sebaliknya dimana persentase pemuda yang tidak sekolah lagi persentasenya paling rendah yaitu sebesar 61,19 persen.

Untuk melihat seberapa banyak penduduk yang berusia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang dikenal dengan angka partisipasi sekolah. Meningkatnya angka partisipasi sekolah berarti menunjukkan adanya keberhasilan dibidang pendidikan, utamanya yang berkaitan dengan upaya memperluas jangkauan pelayanan pendidikan. Dalam kajian ini menggunakan Angka Partisipasi Sekolah (APS) yaitu persentase pemuda yang masih bersekolah terhadap jumlah populasi pemuda secara keseluruhan tanpa memperhatikan jenjang atau tingkat pendidikan yang sedang dijalannya.

Tabel 4.1.2. secara rinci menyajikan APS menurut kelompok usia sekolah, tipe daerah dan jenis kelamin. Secara umum akses masyarakat pada pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin atau gender. APS

pemuda laki-laki lebih tinggi dibanding pemuda perempuan. Jika dilihat menurut kelompok umur nampak bahwa pada usia 15 tahun APS perempuan sedikit lebih tinggi dibanding APS laki-laki. Sebaliknya pada kelompok umur di atasnya, APS untuk laki-laki cenderung lebih tinggi dari perempuan. Kecenderungan makin menurunnya APS penduduk perempuan pada usia yang semakin tinggi ini diduga berkaitan dengan kurang tersedianya sarana maupun prasarana untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi di lokasi sekitar tempat tinggal mereka. Untuk dapat bersekolah, mereka harus menggunakan alat transportasi untuk mencapai sekolah. Faktor lain yang juga turut mempengaruhi kondisi tersebut adalah adanya “*sex preference*” yang cenderung mengutamakan anak laki-laki untuk bersekolah dibandingkan dengan perempuan (BPS, 2002). Bila dilihat menurut tipe daerah, APS pemuda yang tinggal di daerah perkotaan (20,16 persen) lebih tinggi dibanding APS pemuda daerah perdesaan (13,71 persen).

APS pemuda laki-laki secara keseluruhan tercatat sebesar 17,48 persen, sedangkan untuk pemuda perempuan sebesar 15,98 persen. Kesenjangan APS antar gender juga ditemukan baik di perkotaan maupun perdesaan. APS pemuda laki-laki di perkotaan tercatat sebesar 20,97 persen, sedangkan di daerah perdesaan hanya mencapai 14,46 persen. Begitu pula APS pemuda perempuan yang tinggal di perkotaan telah mencapai 19,38 persen, sedangkan di perdesaan hanya sebesar 12,95 persen.

Selanjutnya bila ditelaah lebih lanjut, ternyata faktor umur mempengaruhi tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sekolah. Pada Tabel 4.1.2 terlihat bahwa semakin meningkatnya umur maka angka partisipasi sekolah cenderung semakin menurun. Kondisi ini terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan serta di daerah perkotaan maupun perdesaan. APS pemuda yang berusia 15 tahun tercatat sebesar 76,93 persen. Kemudian, APS pemuda pada kelompok umur di atasnya makin menurun, yaitu untuk pemuda usia 16-18 tahun sebesar 54,61 persen, lalu untuk pemuda usia 19-24 tahun sebesar 12,20 persen dan untuk pemuda usia 25-35 tahun hanya sebesar 1,04 persen.

Tabel 4.1.2 Angka Partisipasi Sekolah Pemuda Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Tahun 2007

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Laki-laki	85,61	70,64	76,70
	Perempuan	83,12	72,79	77,16
	L+P	84,38	71,66	76,93
16-18	Laki-laki	67,07	45,30	54,71
	Perempuan	65,09	45,37	54,51
	L+P	66,08	45,33	54,61
19-24	Laki-laki	18,63	6,60	12,47
	Perempuan	17,79	6,09	11,95
	L+P	18,20	6,34	12,20
25-35	Laki-laki	1,98	0,68	1,29
	Perempuan	1,16	0,50	0,80
	L+P	1,56	0,59	1,04
Jumlah (15 - 35)	Laki-laki	20,97	14,46	17,48
	Perempuan	19,38	12,95	15,98
	L+P	20,16	13,71	16,72

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Pola penurunan APS serupa ini merupakan pola umum yang banyak ditemukan dalam berbagai penelitian yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Pola umum tersebut antara lain dipengaruhi oleh kecenderungan bahwa pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi memerlukan biaya pendidikan yang semakin mahal serta adanya kecenderungan pada sebagian besar penduduk untuk menikah atau bekerja pada usia yang semakin tinggi.

4.2. Angka Buta Huruf

Ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan, adalah kemampuan baca tulis atau kemelek-aksaraan (*literacy*) penduduk dewasa, kemelek-aksaraan adalah salah satu indikator keberhasilan dalam bidang

pendidikan. Upaya pemerintah atau keseriusan dan komitmennya terhadap kemelekaksanaan tertuang dalam PP No. 7 tahun 2005 tentang RPJM 2004-2009 bahwa salah satu target pembangunan pendidikan adalah menurunnya angka buta aksara penduduk 15 tahun ke atas menjadi 5 persen di tahun 2009. Secara operasional perhatian khusus mengenai buta aksara ditindak lanjuti dalam Inpres RI No. 5 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GN-PWPPBA). Selain itu informasi/data persentase penduduk buta aksara merupakan komponen penting dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jika buta aksara masih tetap tinggi, maka IPM tetap rendah. Sebaliknya, jika buta aksara rendah menandakan IPM naik. Dengan semakin berkurangnya penduduk yang mengalami buta huruf, menandakan taraf pendidikan masyarakat yang semakin maju sekaligus menunjukkan taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat.

Berbagai kebijakan pemerintah dalam hal pemberantasan buta aksara telah dilakukan diantaranya adalah kursus A-B-C, Program Pemberantasan Buta Huruf Fungsional, Kejar Paket A, dan saat ini yang paling populer yaitu melalui program Keaksaraan Fungsional yang dijalankan oleh pemerintah sejak tahun 1995. Program ini dimaksudkan untuk memberantas kebutaaksaraan dengan fokus kegiatan melalui diskusi, membaca, menulis, berhitung dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam aktifitas yang berkaitan dengan kebutuhan keseharian. Untuk memotivasi dan adanya rasa penghargaan atas mereka yang mengikuti kegiatan keaksaraan, pemerintah bahkan sekarang telah memberikan sertifikat "SUKMA" (Surat Keterangan Melek Aksara) bagi yang telah selesai mengikuti kegiatan keaksaraan fungsional.

Berdasarkan data hasil Susenas dari tahun 2003-2007, persentase pemuda buta huruf menurut tipe daerah dan jenis kelamin seperti yang disajikan pada Tabel 4.2.1. Dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase pemuda yang buta huruf selama kurun waktu 2003 hingga 2007 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2003 sebesar 2,36 persen, tahun 2005 sebesar 1,85 persen kemudian turun kembali pada tahun 2007 menjadi sebesar 1,75 persen. Rendahnya angka buta huruf pemuda menunjukkan semakin

membaliknya kemampuan minimal yang dimiliki pemuda, dalam hal ini kemampuan membaca dan menulis.

Dari Tabel 4.2.1 juga dapat diketahui pula bahwa kemampuan membaca dan menulis pemuda di daerah perkotaan lebih baik dibandingkan dengan pemuda di daerah perdesaan. Dilihat perkembangannya dari tahun 2003 hingga 2007 persentase pemuda di perkotaan yang buta huruf berada di bawah 1 persen sedangkan di perdesaan persentasenya masih sekitar 3 persen hingga 2,75 persen pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa hampir 100 persen pemuda di perkotaan sudah melek huruf. Keadaan tersebut terjadi di seluruh provinsi Indonesia yang dapat dilihat pada tabel Lampiran 4.3.

Tabel 4.2.1. Persentase Pemuda yang Buta Huruf Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2003-2007

Jenis Kelamin	2003			2005			2007		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Perkotaan	0,69	1,14	0,92	0,52	0,92	0,72	0,47	0,75	0,61
Perdesaan	2,55	4,53	3,55	2,23	3,45	2,84	2,20	3,30	2,75
Perkotaan + Perdesaan	1,71	2,98	2,36	1,43	2,25	1,85	1,40	2,10	1,75

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2003-2007

Dilihat menurut jenis kelamin, secara umum pada tahun 2007, angka buta huruf pemuda perempuan lebih tinggi yaitu hampir 2 kali lipat dari angka buta huruf pemuda laki-laki (2,10 persen berbanding 1,40 persen). Keadaan tersebut berlaku baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan hanya sekitar 0,47 persen pemuda laki-laki yang buta huruf sedangkan untuk pemuda perempuan mencapai sebesar 0,75 persen. Begitu

pula di daerah perdesaan untuk pemuda laki-laki yang buta huruf sebesar 2,20 persen sedangkan pemuda perempuan persentasenya lebih tinggi yaitu sebesar 3,30 persen. Pola dimana angka buta huruf pemuda perempuan lebih tinggi dari angka buta huruf pemuda laki-laki menunjukkan adanya indikasi bahwa masih terdapat kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam belajar atau menuntut ilmu.

Tabel 4.2.2. Persentase Pemuda yang Buta Huruf Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin dan Tipe Daerah Tahun 2007

Kelompok Umur	Jenis Kelamin	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15-24	Laki-laki	0.37	1.69	1.08
	Perempuan	0.46	1.96	1.24
	L+P	0.41	1.82	1.16
25-35	Laki-laki	0.57	2.71	1.71
	Perempuan	1.02	4.49	2.88
	L+P	0.80	3.63	2.31
Jumlah (15 - 35)	Laki-laki	0.47	2.20	1.40
	Perempuan	0.75	3.30	2.10
	L+P	0.61	2.75	1.75

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Di sisi lain, nampak bahwa umur pemuda merupakan faktor yang juga turut mempengaruhi pola angka buta huruf pemuda. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.2.2, angka buta huruf pemuda cenderung semakin meningkat sejalan dengan makin meningkatnya kelompok umur pemuda. Angka buta huruf pemuda pada kelompok umur 15-24 tahun adalah sebesar 1,16 persen. Pada kelompok umur yang lebih tua yaitu kelompok umur 25-35 tahun, angkanya lebih tinggi yaitu sebesar 2,31 persen. Kecenderungan makin meningkatnya angka buta huruf pemuda pada usia yang semakin tinggi ini secara umum juga

ditemukan, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan serta baik untuk pemuda laki-laki maupun pemuda perempuan.

4.3. Rata-rata Lama Sekolah

Indikator pendidikan lainnya yang biasanya digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat keberhasilan program pembangunan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*). Indikator rata-rata lama sekolah merupakan indikator output pendidikan yang dikembangkan UNDP pada tahun 1990 dalam rangka penyusunan komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indikator rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Penghitungan rata-rata lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang memerlukan waktu yang lebih cepat atau lebih lambat dalam menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Sesuai dengan konsep tersebut maka lama sekolah untuk seseorang yang tamat SD adalah 6 tahun, SLTP kelas 1 adalah 7 tahun, tamat SLTP adalah 9 tahun dan seterusnya.

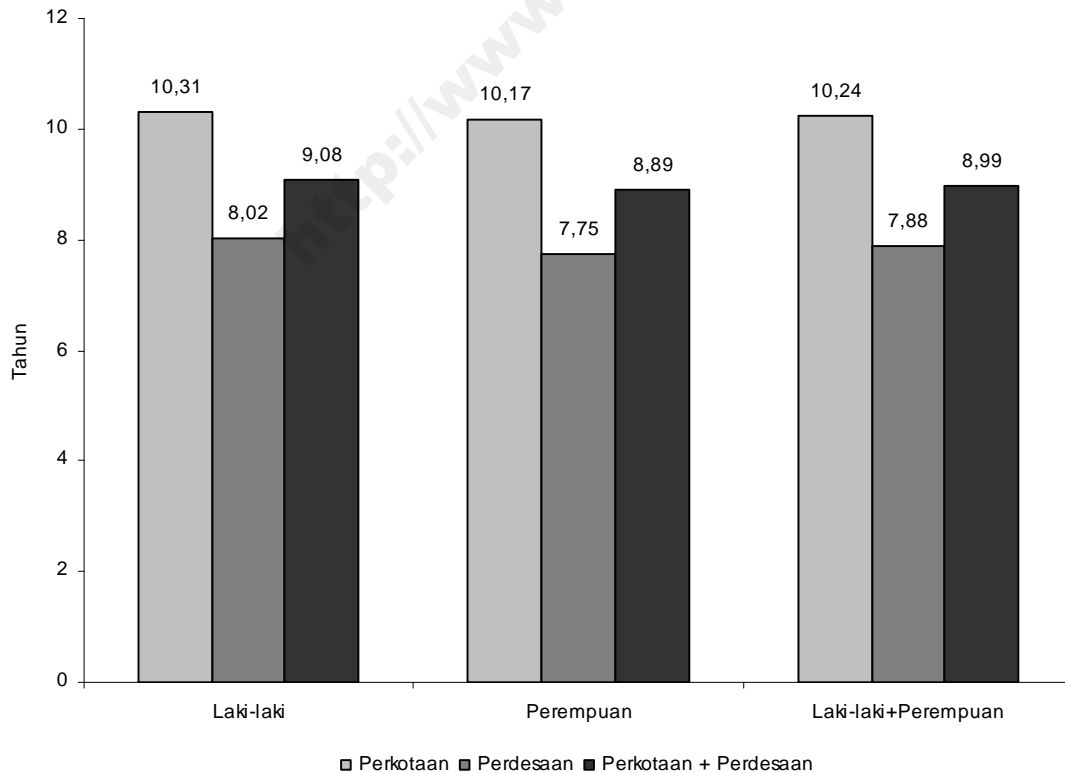
Salah satu sasaran pemerintah dalam bidang pendidikan adalah dicanangkannya gerakan nasional penuntasan wajib belajar 9 tahun. Pencapaian sasaran tersebut untuk para pemuda pada tahun 2007 dapat dikatakan telah mencapai hasil yang diharapkan. Secara nasional rata-rata lama sekolah pemuda mencapai 8,99 seperti yang terlihat pada Gambar 4.3.1 Angka ini mengandung arti bahwa para pemuda hingga tahun 2007 telah berhasil mencapai rata-rata pendidikan maksimal kelas 3 SLTP atau hampir menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Bila dilihat menurut tipe daerah, rata-rata lama sekolah pemuda di daerah perkotaan telah berhasil melampaui sasaran program wajib belajar 9 tahun yaitu 10,24 tahun. Di sisi lain, rata-rata lama sekolah untuk pemuda yang berada di daerah pedesaan masih belum mencapai hasil yang diharapkan yaitu sebesar 7,88 tahun. Sejalan dengan kenyataan itu, program wajib belajar 9

tahun seyogyanya lebih difokuskan pada masyarakat yang tinggal di perdesaan termasuk juga para pemudanya.

Selain itu, yang menjadi perhatian adalah pemerataan pendidikan dengan memperhatikan kesetaraan gender. Hal ini diperlukan karena masih adanya perbedaan rata-rata lama sekolah antara pemuda laki-laki dengan pemuda perempuan meskipun perbedaannya relatif kecil, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.3.1. Rata-rata lama sekolah untuk pemuda laki-laki sebesar 9,08 tahun masih lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda perempuan yang hanya sebesar 8,89 tahun. Pola tersebut berlaku baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Rata-rata lama sekolah pemuda di perkotaan masing-masing adalah sebesar 10,31 tahun untuk laki-laki dan sebesar 10,17 tahun untuk perempuan, sementara di daerah perdesaan berturut-turut untuk laki-laki dan perempuan tercatat sebesar 8,02 tahun dan 7,75 tahun.

Gambar 4.3.1. Rata-rata Lama Sekolah menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2007 (dalam Tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

4.4. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

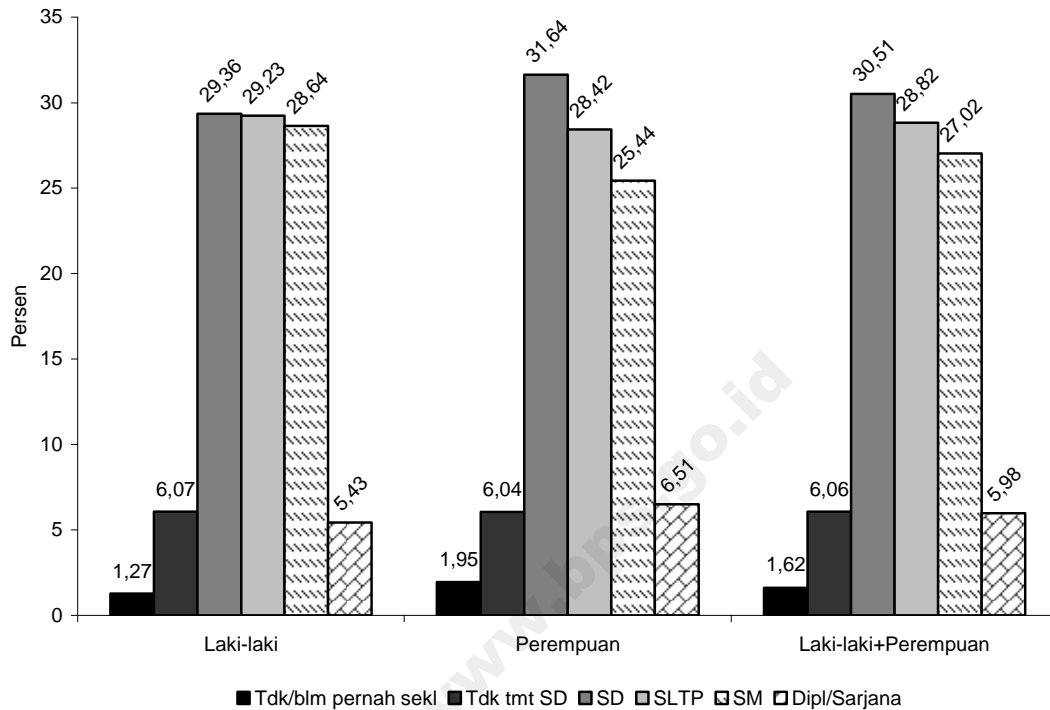
Gambaran mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas pendidikannya, semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang, mencerminkan semakin tinggi pula tingkat pengetahuan yang dimiliki sekaligus menunjukkan kualitas yang semakin baik, dan sebaliknya. Dengan demikian pendidikan tertinggi yang ditamatkan seseorang secara langsung menunjukkan tingkat pendidikan yang mampu dicapainya, tingkat pendidikan yang dicapai tersebut juga mencerminkan tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh yang sekaligus menentukan ukuran kualitas SDM.

Gambar 4.4.1 menyajikan persentase pemuda menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan dan jenis kelamin, dari gambar tersebut terlihat bahwa secara umum pendidikan yang dicapai oleh sebagian besar pemuda hanya sampai pada tingkat atau jenjang pendidikan dasar dan menengah yaitu sebesar 30,51 persen (SD) dan 28,82 persen (SLTP), sedangkan pemuda yang berhasil menamatkan pendidikannya pada perguruan tinggi persentasenya masih kurang dari 6 persen. Dari gambar tersebut juga terlihat bahwa pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi, persentase pemuda yang tamat sekolah semakin kecil. Keadaan ini mencerminkan masih rendahnya tingkat pendidikan pemuda di Indonesia, disamping itu, masih terdapat pula pemuda yang tidak/belum pernah sekolah (1,62 persen) dan tidak/belum tamat SD (6,06 persen). Dibandingkan dengan tahun 2003 telah terjadi peningkatan di bidang pendidikan baik bagi penduduk laki-laki maupun perempuan, artinya semakin banyak orang yang bisa menikmati pendidikan dan mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Dilihat menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan yang ditamatkan pemuda laki-laki dan pemuda perempuan masing-masing mempunyai pola yang berbeda. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan pemuda laki-laki untuk tingkat SD, SLTP maupun SM, persentasenya relatif tidak jauh berbeda yaitu masing-masing sebesar 29,36 persen, 29,23 persen dan 28,64 persen. Dilain pihak, untuk pemuda perempuan semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan, semakin

rendah persentasenya. Persentase pemuda perempuan yang tamat SD sebesar 31,64 persen, tamat SLTP sebesar 28,42 persen dan tamat SM 25,44 persen.

Gambar 4.4.1. Persentase Pemuda menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, Tahun 2007



Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Sehingga jika dilihat perbandingan antara pemuda laki-laki dan perempuan, nampak bahwa pemuda perempuan yang tamat SD lebih besar dibandingkan pemuda laki-laki (34,28 persen berbanding 31,77 persen). Namun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, persentase pemuda laki-laki masih lebih besar daripada pemuda perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang ditamatkan pemuda laki-laki masih lebih tinggi dari pemuda perempuan. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa laki-laki lebih diprioritaskan dalam mengenyam pendidikan dari pada perempuan, meskipun jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Dilihat perbedaannya menurut tipe daerah, seperti yang disajikan pada Tabel 4.4.1 pada umumnya sebagian besar pemuda baik di daerah perkotaan

maupun perdesaan menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SLTP dan SM). Pada tahun 2007, persentase pemuda yang tamat SD sebesar 30,51 persen, tamat SLTP sebesar 28,82 persen dan tamat SM 27,02 persen. Sedangkan mereka yang berhasil menamatkan pendidikan di perguruan tinggi masih berkisar dibawah 6 persen.

Tabel 4.4.1. Persentase Pemuda Menurut Tipe daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan						Jumlah
	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD	SLTP	SM	Akademi/ Perguruan Tinggi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perkotaan							
Laki-laki	0,61	3,16	18,50	28,83	39,75	9,15	100,00
Perempuan	0,79	3,20	20,71	28,43	36,27	10,60	100,00
L + P	0,70	3,18	19,63	28,63	37,97	9,89	100,00
Perdesaan							
Laki-laki	1,84	8,59	38,74	29,56	19,05	2,22	100,00
Perempuan	2,99	8,57	41,39	28,42	12,77	2,86	100,00
L + P	2,42	8,58	40,07	28,99	17,40	2,54	100,00
Perkotaan+ Perdesaan							
Laki-laki	1,27	6,07	29,36	29,23	28,64	5,43	100,00
Perempuan	1,95	6,04	31,64	28,42	25,44	6,51	100,00
L + P	1,62	6,06	30,51	28,82	27,02	5,98	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Seperti yang terlihat pada Tabel 4.4.1, pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (SLTP, SM dan PT), persentase pemuda di perkotaan yang menyelesaikan pendidikan nampak lebih besar dari persentase pemuda di perdesaan, yaitu masing-masing SLTP 28,63 persen, SM 37,97 persen dan PT 9,89 persen untuk perkotaan dan SLTP 28,93 persen, SM 16,87 persen dan PT 1,82 persen untuk perdesaan. Sebaliknya, persentase pemuda di perdesaan yang menamatkan pendidikan yang lebih rendah (SD) dua kali lipat lebih besar dari persentase pemuda di perkotaan (40,07 persen berbanding 18,50 persen),

begitu pula dengan mereka yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak/belum tamat SD.

Tabel 4.4.1 juga menunjukkan bahwa pemuda di perkotaan yang menamatkan pendidikan, persentasenya terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada jenjang SM, kemudian menurun pada jenjang perguruan tinggi. Sebaliknya, di perdesaan jenjang pendidikan yang tertinggi persentasenya adalah SD, dan pada jenjang yang lebih tinggi persentase tersebut terus menurun.

Namun demikian nampak bahwa status pendidikan pemuda di daerah perkotaan masih lebih baik dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perdesaan. Kesenjangan tersebut terlihat cukup mencolok pada jenjang pendidikan SM dan Perguruan Tinggi baik untuk pemuda laki-laki maupun perempuan. Kesenjangan antara keduanya di tingkat SM lebih dari 2 kali lipat, sedangkan di akademi/perguruan tinggi hampir mencapai empat kali lipat. Begitu pula untuk jenjang pendidikan yang rendah terdapat kesenjangan yang relatif cukup besar antara perdesaan dan perkotaan. Baik yang belum tamat SD maupun yang tamat SD terdapat perbedaan lebih dari 2 kali lipat. Sedangkan di tingkat SLTP kesenjangan relatif kecil antara perkotaan dan perdesaan.

Dilihat sebarannya menurut provinsi, seperti yang disajikan pada Tabel Lampiran 4.3 pendidikan tertinggi yang ditamatkan para pemuda pada masing-masing provinsi bervariasi. Jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan pemuda menurut urutan persentase tertinggi adalah tamat SD, SLTP dan SM. Persentase tertinggi pemuda yang tamat SD ditemukan di provinsi Sulawesi Barat (38,88) dan Nusa Tenggara Timur (37,81 persen). Untuk yang tamat SLTP, persentase tertinggi terdapat di provinsi Lampung (33,88 persen), Jawa Tengah (32,51 persen), dan Sumatera Utara (32,35 persen). Sedangkan untuk yang tamat SM, persentase tertinggi di provinsi Kepulauan Riau (48,61 persen) DI. Yogyakarta (45,90 persen), dan DKI.Jakarta (42,40 persen).

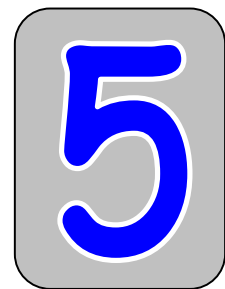
<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

KETENAGAKERJAAN

<http://www.bps.go.id>



Ketenagakerjaan

Pekerjaan merupakan salah satu alat untuk mencukupi kebutuhan manusia, baik secara materi maupun non materi. Sebagai alat, pada pekerjaan selalu melekat simbol-simbol status yang mendasari pandangan seseorang terhadap pekerjaan tersebut. Disatu sisi, jika masyarakat tradisional dengan mudah dikaitkan dengan pekerjaan pertanian, maka disisi lain ciri-ciri pada masyarakat kota adalah dengan modernitasnya, seperti menurut *Henry Pirenne (dalam Kuntowijoyo, 2005)*, ialah dominasi kegiatan non pertanian sebagai sumber mata pencaharian. Lebih spesifiknya kota-kota, menurut Kuntowijoyo, hidup dari perdagangan dan industri, sedangkan perdesaan dari pertanian. Terlepas dari simbol-simbol tersebut di atas, pekerjaan itu sendiri merupakan kebutuhan asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam amandemen UUD 1945 tentang ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28d UUD 1945. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk itu perlu perencanaan di bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut.

Perencanaan dan pembangunan di bidang ketenagakerjaan tidak terlepas dari isu generasi muda atau pemuda karena merupakan salah satu kelompok penting dalam masyarakat yang dinamis dan energik yang memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan karakteristiknya, dilihat dari segi usia, tenaga dan kemampuan berfikir, kelompok pemuda relatif lebih berpotensi dalam memasuki dunia ketenagakerjaan dibandingkan dengan kelompok penduduk lainnya. Pemuda memiliki peluang yang lebih luas dan merupakan generasi pewaris masa depan bangsa. Oleh karena itu isu tentang pemuda ini perlu menjadi pemikiran dan menjadi prioritas dalam agenda pembangunan melalui penyusunan berbagai kebijakan dan program di bidang ketenagakerjaan, khususnya upaya peningkatan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan baru, secara strategis dan efektif yang diprioritaskan pada upaya pemberdayaan pemuda. Hal ini menjadi fokus perhatian karena bila tidak ditangani dengan baik akan merugikan perkembangan suatu negara di masa yang akan datang.

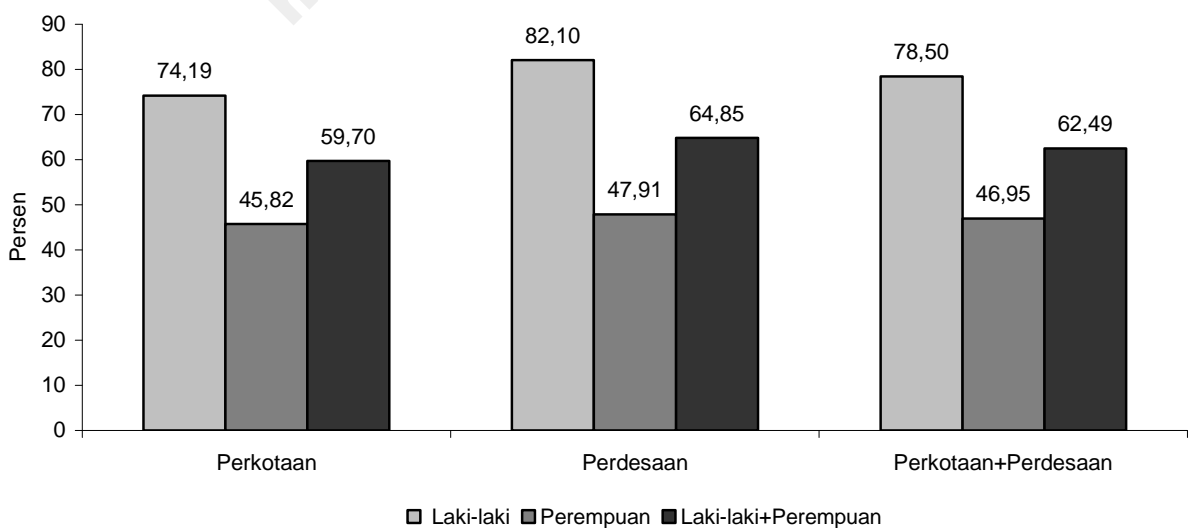
Guna mendukung penyusunan program dan kebijakan ketenagakerjaan pemuda, pada bab ini akan dibahas partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi, tingkat pengangguran, lapangan usaha, status pekerjaan, dan kualitas pendidikan pekerja. Pembahasan kondisi dan situasi ketenagakerjaan pemuda pada bagian ini akan memberikan gambaran secara makro mengenai peranan dan kontribusi pemuda dalam kegiatan pembangunan ekonomi. Peranan dan kontribusi mereka antara lain dapat dilihat dari status pekerjaan, tingkat optimalisasi sumberdaya dilihat dari jumlah jam kerja dalam seminggu, dan besarnya sumber daya pemuda yang belum terpakai (tingkat pengangguran).

5.1. Partisipasi dalam Kegiatan Ekonomi

Berdasarkan kegiatan sehari-harinya, penduduk usia kerja termasuk juga para pemuda secara keseluruhan diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan kelompok penduduk usia kerja yang aktif melakukan kegiatan ekonomi yang mencakup mereka yang melakukan kegiatan bekerja dan mereka yang aktif mencari pekerjaan. Sejalan dengan itu, peranan dan kontribusi pemuda dalam kegiatan ekonomi sangat ditentukan oleh partisipasi para pemuda dalam kegiatan angkatan kerja

Salah satu indikator yang biasa digunakan dalam ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Indikator TPAK merupakan salah satu ukuran yang sering dipakai untuk melihat fluktuasi yang terjadi dalam suatu masyarakat yang berkenaan dengan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK didefinisikan sebagai perbandingan antara penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau disebut angkatan kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) terhadap seluruh penduduk usia kerja (berumur 10 tahun ke atas).

Gambar 5.1.1. TPAK Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2006



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Keterlibatan pemuda dalam pembangunan ekonomi pada tahun 2007 relatif cukup besar, hal ini dapat dilihat dari TPAK pemuda yang mencapai 62,49 persen. Angka ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 pemuda, sekitar 62 orang diantaranya aktif melakukan berbagai kegiatan ekonomi. Gambar 5.1.1 juga menunjukkan bahwa TPAK pemuda di daerah perkotaan tercatat sebesar 59,70 persen, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 64,85 persen. Angka tersebut menggambarkan bahwa partisipasi dalam kegiatan ekonomi untuk pemuda di perdesaan tampak lebih tinggi dibandingkan pemuda di perkotaan.

Sementara itu, faktor jenis kelamin juga mempengaruhi pola partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi. TPAK pemuda laki-laki (78,50 persen) hampir dua kali lipat lebih tinggi dari pemuda perempuan (46,95 persen). Kecenderungan serupa juga ditemukan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di perkotaan, TPAK pemuda laki-laki tercatat sebesar 74,19 persen, sedangkan untuk pemuda perempuan hanya 45,15 persen. Begitu pula di daerah perdesaan, TPAK pemuda laki-laki (82,16 persen) lebih besar dari pemuda perempuan (47,91 persen). Kesenjangan yang terjadi antara TPAK pemuda perempuan dengan TPAK pemuda laki-laki, kemungkinan disebabkan perempuan lebih memilih tugas sebagai ibu rumah tangga sehingga kurang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, tingkat pendidikan perempuan yang rata-rata lebih rendah dari laki-laki lebih membatasi peluang perempuan untuk bersaing dengan laki-laki di pasar kerja. Bahkan masih ada indikasi bias gender di bidang ketenagakerjaan.

Tabel 5.1.2 menyajikan TPAK pemuda menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Bila diperhatikan menurut kelompok umur, TPAK pemuda tertinggi berada pada kelompok umur 30-35 tahun yaitu sebesar 73,38 persen, sedangkan terendah pada kelompok umur 15-19 tahun sebesar 37,75 persen. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada kecenderungan semakin meningkatnya usia pemuda, TPAK pemuda semakin meningkat pula. Hal ini wajar, mengingat pada usia yang lebih tua seorang pemuda sudah mulai produktif bekerja mencari nafkah bagi keluarganya. Di lain pihak, mereka yang

berada pada kelompok umur yang lebih muda (15-19 tahun) merupakan kelompok usia sekolah dan mereka bukan sebagai penanggung jawab utama dalam usaha mencari nafkah bagi keluarganya, tanggung jawab mereka yang utama adalah meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan untuk kehidupan mereka di masa depan.

Pola yang sama terlihat pada pemuda laki-laki, dimana pada kelompok umur 15-19 tahun tercatat TPAKnya sebesar 43,27 persen dan meningkat terus sampai dua kali lipat pada kelompok umur 30-35 tahun (95,83 persen), sedangkan untuk pemuda perempuan sedikit berfluktuasi, namun mengalami peningkatan dibanding kelompok umur muda.

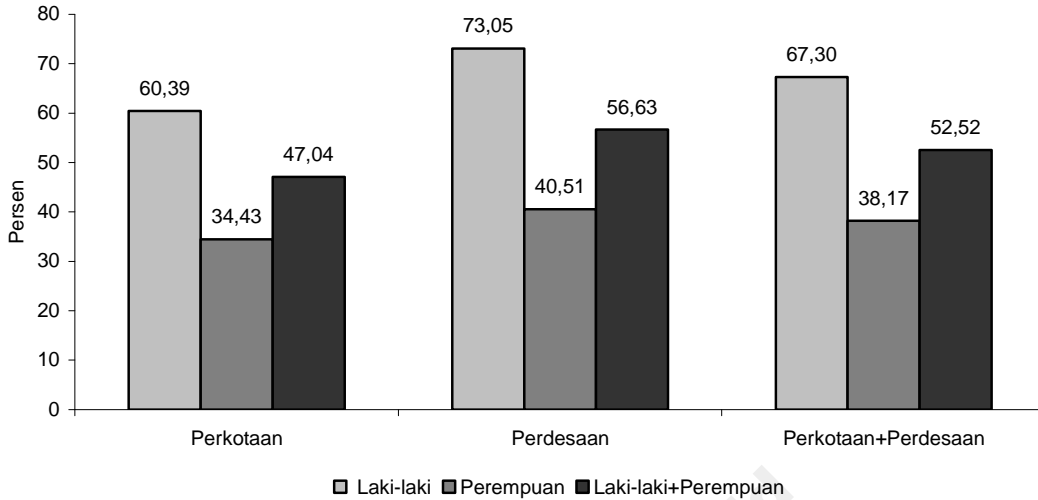
Tabel 5.1.2 TPAK Pemuda Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2007

Jenis Kelamin	Kelompok Umur (tahun)				Jumlah
	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 35	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Laki-laki	43,27	83,74	93,47	95,83	78,50
Perempuan	30,81	51,25	51,45	52,56	46,95
Laki-laki + Perempuan	37,35	67,32	71,18	73,38	63,49

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Pada Tabel 5.1.2 juga menunjukkan bahwa pada setiap kelompok umur, TPAK pemuda laki-laki cenderung lebih tinggi dari pemuda perempuan. Selain itu terlihat pula kesenjangan TPAK antara pemuda laki-laki dengan perempuan yang semakin besar seiring dengan meningkatnya umur. Pada kelompok umur 15-19 tahun kesenjangan TPAK pemuda laki-laki dengan pemuda perempuan hampir mencapai 10 persen, sedangkan pada kelompok umur 30-35 tahun kesenjangan meningkat menjadi lebih dari 50 persen.

Gambar 5.1.2. Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2006



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Pada Gambar 5.1.2 ditunjukkan bahwa dari seluruh populasi pemuda terdapat 52,52 persen pemuda yang bekerja. Secara geografis, di daerah perdesaan persentase pemuda yang bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda di daerah perkotaan (56,63 persen berbanding 47,64 persen).

Tingginya persentase pemuda yang bekerja di daerah perdesaan, diduga karena struktur perekonomian di daerah perdesaan yang masih didominasi oleh sektor pertanian. Sektor ini lebih banyak menyerap tenaga kerja terutama para pemuda, karena tidak terlalu menuntut kualifikasi atau persyaratan tertentu bagi tenaga kerja yang akan memasuki pasar kerja seperti pendidikan, ketrampilan maupun keahlian khusus. Berbeda dengan jenis pekerjaan yang ada di perkotaan yang lebih banyak terkonsentrasi pada sektor sekunder (perdagangan, industri, konstruksi, dll). Sehingga tidak semua pemuda di perkotaan dapat terserap, karena pada sektor-sektor tersebut dituntut spesifikasi keterampilan dan tingkat pendidikan tertentu bagi para pekerjanya.

Dari Gambar 5.1.2 juga ditunjukkan bahwa persentase pemuda laki-laki yang bekerja dua kali lipat lebih tinggi dari pada pemuda perempuan (67,30 persen berbanding 38,17 persen). Kondisi ini berlaku baik di daerah perkotaan

maupun perdesaan. Seperti halnya pada angka TPAK, dari fenomena tersebut juga terlihat adanya ketidaksetaraan gender.

5.2. Lapangan Usaha

Pengembangan sumber daya manusia sebagai sumber daya pembangunan serta pelaku pembangunan, harus memiliki etos kerja yang produktif, keterampilan, kreativitas, disiplin dan profesionalisme, serta mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai IPTEK. Oleh karenanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia menjadi tuntutan yang sangat mendesak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini mutlak diperlukan agar sumber daya manusia yang siap memasuki pasar kerja dapat terserap dan berorientasi kepada lapangan usaha atau lapangan kerja yang ada. Disatu sisi komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha mencerminkan struktur perekonomian dan potensi perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Informasi tersebut juga dapat memberikan gambaran kasar mengenai kualitas sumber daya penduduk, terutama tingkat ketrampilan yang dikuasai. Semakin tinggi ketrampilan yang dikuasai, semakin tinggi minat mereka untuk bekerja diluar sektor pertanian yang menghasilkan upah/gaji lebih tinggi, dan sebaliknya.

Dari hasil Susenas 2007, lapangan usaha pertanian mempunyai peran yang sangat strategis bagi ketenagakerjaan Indonesia, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pekerja Indonesia yang masih sangat terkonsentrasi pada profesi petani, seperti ditunjukkan pada Tabel 5.2.1 bahwa secara rata-rata 35,90 persen pekerja diantaranya bekerja atau berusaha di lapangan usaha pertanian. Implikasi kebijaksanaan dari fakta ini jelas, adalah tidak realistis jika lapangan usaha pertanian diabaikan dalam kerangka perencanaan pembangunan makro. Lebih dari itu, lapangan usaha pertanian terbukti paling lentur dan telah menjadi semacam katup pengaman bagi "kelebihan" tenaga kerja di sektor formal bukan pertanian yang mengalami pukulan keras dari krisis ekonomi.

Tabel 5.2.1 Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Tipe Daerah Tahun 2007

Lapangan Usaha	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	7,29	56,21	35,90
Perdagangan	32,64	13,66	21,54
Industri	23,60	11,31	16,42
Jasa	16,36	6,16	10,39
Transportasi & Komunikasi	8,86	5,26	6,76
Konstruksi	6,60	5,33	5,86
Keuangan	3,53	0,54	1,78
Pertambangan & Galian	0,85	1,39	1,17
Listrik, Gas, & Air	0,27	0,13	0,19
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Sektor berikutnya yang juga banyak menyerap tenaga kerja pemuda adalah sektor perdagangan dan sektor industri, yaitu masing-masing sebesar 29,54 persen dan 16,42 persen, sedangkan sektor-sektor yang relatif sedikit menyerap tenaga kerja pemuda adalah sektor listrik, gas dan air (0,19 persen) pertambangan dan galian (1,17 persen) dan keuangan (1,78 persen). Tabel 5.2.1 juga menunjukkan bahwa sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja pemuda di perkotaan berturut-turut adalah sektor perdagangan, industri dan jasa yaitu masing-masing sebesar 32,64 persen, 23,60 persen dan 18,36 persen. Sementara itu, sektor yang mempunyai peran cukup besar dalam menunjang kegiatan perekonomian di daerah perdesaan adalah sektor pertanian. Dari seluruh pemuda di perdesaan, 56,21 persen bekerja pada sektor pertanian, sedangkan pemuda yang bekerja pada sektor perdagangan dan industri, masing-masing hanya sebesar 13,66 persen dan 11,31 persen.

Tabel 5.2.2 Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin Tahun 2007

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+ Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	36,76	34,42	35,90
Perdagangan	17,90	27,77	21,54
Industri	14,49	19,72	16,42
Jasa	8,30	13,97	10,39
Transportasi & Komunikasi	9,84	1,48	6,76
Konstruksi	8,97	0,54	5,86
Keuangan	0,25	1,67	1,78
Pertambangan & Galian	1,64	0,35	1,17
Listrik, Gas, & Air	0,25	0,08	0,19
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Sementara itu, bila dilihat menurut jenis kelamin, secara umum menunjukkan hanya ada sedikit perbedaan antara pemuda laki-laki dan perempuan, kecuali pada sektor transportasi/komunikasi dan konstruksi terlihat bahwa pemuda laki-laki memiliki perbandingan persentase cukup besar dibanding pemuda perempuan. Pemuda laki-laki yang bekerja pada sektor transportasi/komunikasi dan konstruksi masing-masing sebesar 9,84 persen dan 8,97 sedangkan pemuda perempuan masing-masing hanya 1,48 persen dan 0,54 persen. Di sisi lain, terdapat perbedaan yang cukup berarti dari pemuda laki-laki pada sektor perdagangan, industri dan jasa dimana persentase pemuda perempuan jauh lebih tinggi yaitu masing-masing sebesar 27,77 persen, 19,72 persen dan 13,97 persen.

5.3. Status Pekerjaan

Dalam pembangunan terjadi suatu proses perubahan mendasar yang bersifat struktural. Perubahan ini dapat mencakup kependudukan dan ketenagakerjaan yang disebabkan oleh kemajuan dibidang ekonomi serta ilmu

pengetahuan dan teknologi (Iptek). Dibidang ekonomi sendiri dimasa akan datang diperkirakan akan terjadi pergeseran yang mulanya didominasi sektor pertanian beralih ke sektor non pertanian, yang pada akhirnya akan mempengaruhi pula pergeseran struktur sosial dibidang ketenagakerjaan, salah satunya adalah perubahan penyebaran tenaga kerja.

Pola penyebaran tenaga kerja yang diserap oleh lapangan pekerjaan sangat tergantung dari kualitas SDM nya. SDM yang berkualitas tinggi baik dari segi kesehatan, pendidikan, keahlian dan ketrampilan akan mempunyai tingkat produktivitas yang lebih baik dibandingkan dengan SDM yang kurang berkualitas. Sebagai tolok ukur tingkat produktivitas kerja salah satunya dapat dilihat dari status pekerjaan. Distribusi pemuda yang bekerja menurut status pekerjaan menggambarkan jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan. Status pekerjaan dibagi menjadi enam, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu dengan buruh tidak tetap, berusaha dibantu buruh tetap, buruh/karyawan, pekerja bebas, dan pekerja tidak dibayar. Distribusi pemuda yang bekerja menurut status pekerjaan dan tipe daerah disajikan pada Tabel 5.3.1.

Tabel 5.3.1 Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Tipe Daerah Tahun 2007

Status Pekerjaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	19,79	17,77	18,61
Berusaha dibantu Buruh Tdk Tetap	6,60	16,08	12,15
Berusaha dibantu Buruh Tetap	2,59	1,59	2,00
Buruh/Karyawan	55,20	21,06	35,24
Pekerja Bebas	6,52	13,40	10,52
Pekerja Tidak Dibayar	9,30	30,13	21,48
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Dari Tabel 5.3.1 diperoleh informasi bahwa dari pemuda yang bekerja, sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan (35,24 persen), berusaha

sendiri (18,61 persen) dan pekerja tidak dibayar (21,48 persen). Bila dilihat menurut tipe daerah, mayoritas pemuda di perkotaan bekerja sebagai buruh/karyawan (55,20 persen) dan 19,79 persen berusaha sendiri. Sedangkan di daerah perdesaan, selain sebagai pekerja tidak dibayar (30,13 persen), status sebagai buruh/karyawan (21,06 persen) juga masih mendominasi para pekerja pemuda. Selain itu banyak pula pemuda di perdesaan yang berusaha sendiri yaitu sebesar 17,17 persen.

Sementara itu, bila dilihat menurut jenis kelamin, tidak ada perbedaan yang signifikan baik pekerja pemuda laki-laki maupun pemuda perempuan sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan. Seperti yang disajikan pada Tabel 5.3.2, pemuda laki-laki yang bekerja sebagai buruh/karyawan mencapai 35,37 persen. Begitu pula bagi pemuda perempuan yang bekerja sebagai buruh/karyawan persentasenya mencapai 35,00 persen. Selain status pekerjaan sebagai buruh/karyawan, status pekerjaan lainnya yang juga mempunyai persentase tinggi adalah berusaha sendiri dan sebagai pekerja keluarga.

Tabel 5.3.2 Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2007

Status Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	20,76	14,92	18,91
Berusaha dibantu Buruh Tdk Tetap	13,86	9,22	12,15
Berusaha dibantu Buruh Tetap	2,59	0,99	2,00
Buruh/Karyawan	35,37	35,00	35,24
Pekerja Bebas	12,80	6,63	11,52
Pekerja Keluarga	14,61	33,23	21,48
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Disamping itu dari tabel diatas terdapat perbedaan pola status pekerjaan antara pemuda laki-laki dan pemuda perempuan. Pemuda laki-laki, selain banyak yang bekerja sebagai buruh/karyawan, banyak pula yang bekerja dengan status berusaha sendiri yaitu sebesar 20,76 persen. Sedangkan untuk pemuda perempuan, persentase yang juga cukup tinggi selain bekerja sebagai buruh/karyawan adalah mereka yang bekerja sebagai pekerja keluarga sebesar 33,23 persen.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi produktivitas seorang pekerja selain keahlian, pengalaman kerja dan faktor usia. Secara umum dalam kondisi yang sama dapat dikatakan bahwa pekerja yang berpendidikan lebih tinggi akan menghasilkan produktivitas kerja yang lebih baik dibanding dengan pekerja yang berpendidikan lebih rendah. Dengan kata lain, pendidikan yang ditamatkan oleh pemuda yang bekerja sangat menentukan status pekerjaannya disamping juga mutu dari pekerjaan yang dihasilkannya.

Tabel 5.3.3 Persentase Pemuda yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2007

Status Pekerjaan	Tdk/Blm Prnh skl	Tdk Tamat SD	SD/ sederajat	SLTP/ sederajat	SM/ sederajat	Akademi/ PT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha Sendiri	18,59	20,83	20,32	20,17	17,08	5,60
Dibantu Buruh Tdk Tetap	20,11	16,40	14,79	11,89	9,23	2,82
Dibantu Buruh Tetap	0,55	1,38	1,62	1,97	2,73	2,51
Buruh/Karyawan	8,80	16,56	22,29	31,19	52,79	85,10
Pekerja Bebas	10,61	16,65	15,24	10,69	4,17	0,52
Pekerja Tidak Dibayar	41,75	28,19	25,74	24,08	14,01	3,46
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

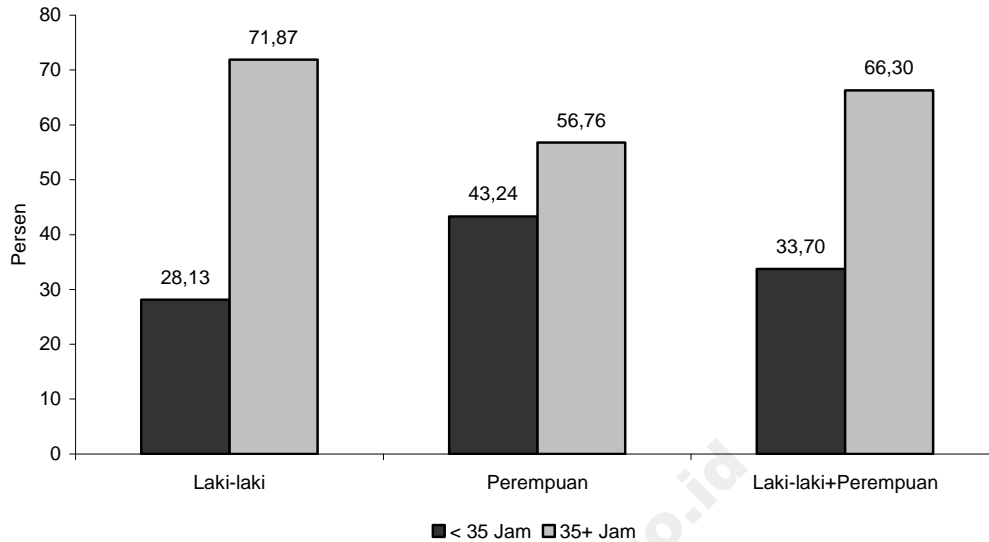
Dari Tabel 5.3.3 untuk pemuda yang berstatus buruh/karyawan terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikannya maka semakin tinggi persentasenya dengan kata lain semakin tinggi tingkat pendidikannya semakin banyak tenaga kerja yang terserap sebagai buruh/karyawan. Khususnya yang berpendidikan SM keatas persentase pemuda yang terserap lebih dari 50 persen (SM 52,79 persen, PT 85,10 persen). Hal sebaliknya terjadi pada pemuda yang bekerja sebagai pekerja tidak dibayar, semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan, maka persentasenya makin rendah. Kondisi ini mungkin karena pemuda yang berpendidikan rendah lebih mempunyai kesempatan cukup besar untuk dapat bekerja di beberapa jenis pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan khusus.

5.4. Pengangguran

Banyak cara untuk mengukur tingkat produktivitas seorang pekerja, salah satunya yang secara umum biasa digunakan adalah jam kerja. Ada beberapa batasan yang banyak dipakai para analis dan pakar ketenagakerjaan untuk melihat produktif tidaknya pekerja, namun dalam bahasan ini dibatasi pada mereka yang bekerja < 35 jam selama seminggu dan mereka yang bekerja 35 jam atau lebih. Pemuda yang jumlah jam kerja selama seminggu kurang dari 35 jam, dapat dikatakan termasuk dalam setengah pengangguran.

Gambar 5.4.1 menyajikan distribusi pemuda yang bekerja menurut jumlah jam kerja dan jenis kelamin. Persentase pemuda yang bekerja normal atau lebih dari 35 jam per minggu ada sebanyak 66,30 persen, sedangkan mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu atau termasuk dalam kategori setengah pengangguran tercatat sebesar 33,70 persen.

Gambar 5.4.1. Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Jumlah Jam Kerja dalam Seminggu dan Jenis Kelamin, Tahun 2006



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Bila ditinjau berdasarkan jenis kelamin, tampak bahwa produktivitas pekerja pemuda perempuan secara umum masih lebih rendah dari pekerja pemuda laki-laki. Kecenderungan ini dapat dilihat dari persentase pemuda perempuan yang termasuk kategori setengah pengangguran atau bekerja kurang dari 35 jam seminggu mencapai sebesar 43,24 persen. Persentase tersebut relatif cukup besar jika dibandingkan dengan pemuda laki-laki yang hanya 28,13 persen, sebaliknya persentase pemuda perempuan yang bekerja normal (35 jam atau lebih) cenderung lebih kecil dibandingkan pemuda laki-laki (56,76 persen berbanding 71,87 persen). Fenomena tersebut mungkin karena pemuda perempuan lebih banyak bekerja pada pekerjaan-pekerjaan paruh waktu (*part time*) atau sebagai pekerja keluarga.

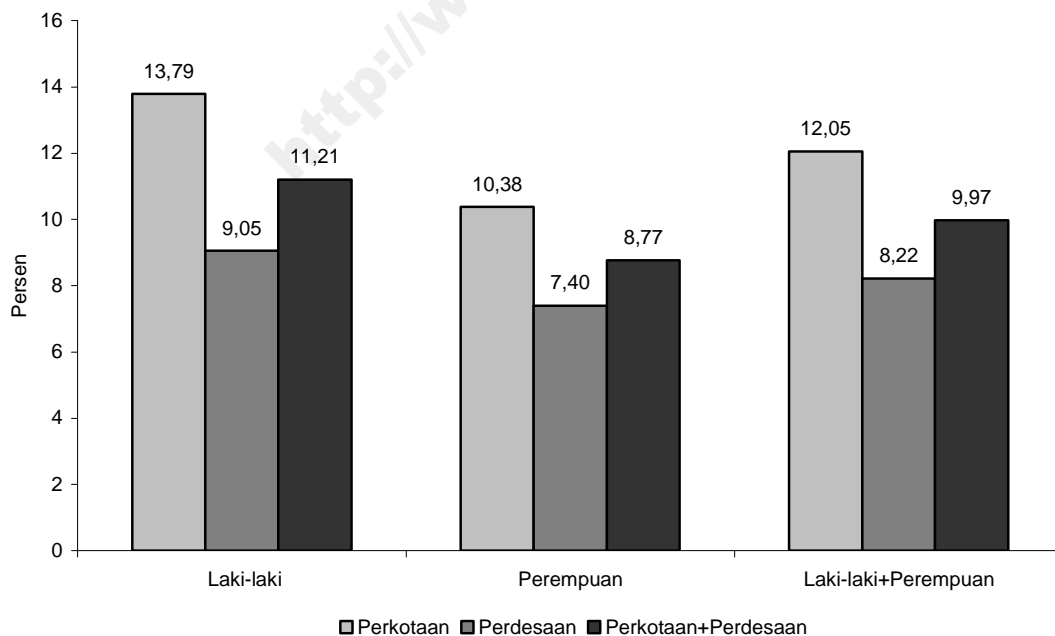
5.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indonesia cukup berhasil dalam menurunkan angka kelahiran dan kematian secara berkesinambungan. Namun hal ini justru berdampak pada

pertumbuhan penduduk usia kerja yang jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk secara keseluruhan. Fakta ini menunjukkan bahwa ada tekanan kuat dalam sisi penyediaan tenaga kerja. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi secara nasional masih terlalu rendah untuk dapat menyediakan lapangan kerja baru secara memadai akibatnya muncul masalah pengangguran. Banyak faktor yang menjadi pemicu masalah pengangguran. Penyebab utama masalah ini antara lain adalah keterbatasan kesempatan kerja dan kualitas tenaga kerja yang rendah. Keterbatasan kesempatan kerja disebabkan oleh rendahnya investasi dan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Indikator ini merupakan rasio antara banyak orang yang tak bekerja tetapi mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, tidak mencari pekerjaan karena tak mungkin mendapatkan pekerjaan termasuk putus asa, atau sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja terhadap penduduk angkatan kerja.

Gambar 5.5.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2007



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tingkat pengangguran terbuka pemuda di Indonesia pada tahun 2007 sebesar 9,97 persen (Gambar 5.5.1). Angka pengangguran terbuka antara lain disebabkan oleh kondisi perekonomian yang masih mengalami kelesuan sehingga permintaan tenaga kerja semakin berkurang, sementara jumlah tenaga kerja yang tersedia semakin meningkat. Bila dilihat menurut tipe daerah, angka pengangguran pemuda di daerah perkotaan (12,05 persen) lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan (8,22 persen). Dilihat dari jenis kelamin, tampak bahwa tingkat pengangguran terbuka pemuda laki-laki (11,21 persen) lebih tinggi dibandingkan dengan pemuda perempuan (8,77 persen). Keadaan ini berlaku baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 5.5.1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe daerah Tahun 2007

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tdk/Blm Pernah sekolah	0,22	0,85	0,50
Tidak Tamat SD	2,23	4,74	3,35
SD/ sederajat	13,61	28,64	20,33
SLTP/ sederajat	19,57	28,38	23,51
SM/ sederajat	51,60	31,79	42,74
Akademi/PT	12,77	5,62	9,57
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 5.5.1 menyajikan tingkat pengangguran terbuka pemuda menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tipe daerah. Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa sebagian besar pemuda yang menganggur adalah mereka yang tamat SM (42,74 persen), kemudian tamat SLTP (23,51 persen) dan SD (20,33 persen). Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya SDM tenaga

kerja pemuda yang tersedia sementara lowongan pekerjaan yang ada saat ini cenderung lebih banyak ditujukan bagi tenaga yang berpendidikan tinggi, seperti buruh/karyawan dibayar.

Tabel 5.1.1-5.1.3 (Lampiran) menyajikan persentase pemuda menurut provinsi dan kegiatan utama selama seminggu yang lalu. Dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase tertinggi pemuda yang mencari pekerjaan terdapat pada Provinsi Banten (14,03 persen), Provinsi Sulawesi Utara (13,17 persen) Jawa Barat (13,12 persen) dan Maluku (11,47 persen). Persentase terendah terdapat pada Provinsi Nusa Tenggara Timur (4,40 persen), Provinsi Bali (4,56 persen), Sulawesi Barat (5,07 persen) dan Provinsi Bengkulu (5,09 persen).

Tabel 5.8 (Lampiran) menyajikan persentase pemuda yang bekerja dan berusaha atau dibayar menurut provinsi dan pendapatan/upah/gaji bersih sebulan. Dari tabel tersebut terlihat bahwa 24,23 persen dari pemuda yang bekerja dan berusaha, memperoleh pendapatan/upah/gaji bersih sebulan antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 799.999,-dimana persentase terbesar terdapat di Provinsi yaitu Provinsi DI.Yogyakarta (34,10 persen), Papua (29,47 persen), dan Kalimantan Barat (28,65 persen). Dilihat menurut daerah tempat tinggal, di daerah perkotaan 24,17 persen dari pemuda yang bekerja dan berusaha, dibayar antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 799.999,- persentase terbesar berada di tiga Provinsi yaitu Provinsi DI.Yogyakarta (34,39 persen), Jawa Tengah (30,08 persen) dan Sulawesi Selatan (29,81 persen). Di daerah perdesaan, paling banyak (24,30 persen) pemuda yang bekerja dan berusaha, dibayar antara Rp. 500.000,- _ Rp. 749.999,-.persentase terbesar berada di provinsi Papua (36,51 persen), Provinsi DI.Yogyakarta (33,50 persen), dan Provinsi Kalimantan Barat (29,94 persen).

Jika dilihat menurut pendapatan/upah/gaji bersih yang tertinggi (Rp. 2.500.000,- keatas), maka persentase yang terbesar untuk upah/gaji tersebut berada di Provinsi yaitu Provinsi Kepulauan Riau (11,17 persen), Kalimantan Timur (9,21 persen) dan DKI Jakarta (7,61 persen). Dari sini dapat disimpulkan bahwa Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan DKI masih merupakan daerah yang banyak diminati untuk didatangi dalam rangka mengadu nasib.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

KESEHATAN PEMUDA

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>



Kesehatan Pemuda

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, karena salah satu aspek penting yang dapat menggambarkan kesejahteraan penduduk adalah kualitas fisik penduduk yang biasanya dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk. Peningkatan derajat

kesehatan penduduk sangat ditunjang oleh tersedianya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan.

Departemen kesehatan sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah didalam bidang kesehatan memiliki peranan dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat. Melalui visi dan misi serta strategi utama Departemen Kesehatan yang terdiri dari :

1. Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat.
2. Meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas
3. Meningkatkan sistem pengamatan, pemantauan dan informasi kesehatan.
4. Meningkatkan pembiayaan kesehatan.

Visi, misi dan strategi utama Departemen Kesehatan tersebut membutuhkan upaya yang menyeluruh dan melibatkan semua pihak yang terkait dengan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Usaha tersebut pun perlu didukung oleh tenaga kesehatan yang anadal dan kompeten dibidangnya. Apabila upaya itu dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan, tujuan serta komitmen Indonesia untuk mencapai Millenium Development Goals (MDGs) pun dapat tercapai.

Sejalan dengan itu, Generasi muda atau pemuda yang merupakan bagian terbesar dari jumlah keseluruhan penduduk mempunyai peran sangat strategis dalam melaksanakan pembangunan. Selain sebagai generasi penerus yang akan memegang estafet kepemimpinan bangsa Indonesia, kaum muda yang ada pada usia produktif ini juga diakui memiliki semangat yang besar untuk senantiasa melakukan perbaikan. Oleh karena itu sudah sewajarnya kaum muda selalu diajak dan dilibatkan dalam menyelesaikan masalah kesehatan bangsa ini dalam upaya peningkatan kualitas pemuda khususnya dalam rangka menciptakan sumber daya pemuda yang handal dan trampil, aspek kualitas fisik khususnya peningkatan kualitas kesehatan pemuda juga harus mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Bukti konkret yang dapat diberikan generasi muda Indonesia dalam rangka menyukseskan program penanganan

kesehatan masyarakat serta upaya mewujudkan MDGs adalah dengan turut berpartisipasi dalam program tersebut dan ikut berpola hidup sehat.

Kualitas kesehatan pemuda dan penduduk pada umumnya tercermin dari status atau derajat kesehatannya yang biasanya dilihat melalui berbagai indikator kesehatan seperti angka kesakitan (*morbidity rate*) dan rata-rata lama sakit. Angka kesakitan dan rata-rata lama sakit merupakan indikator kesehatan negatif artinya semakin tinggi angka kedua indikator tersebut menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin memburuk. Indikator lain yang juga biasa digunakan untuk melihat status atau derajat kesehatan adalah indikator perilaku hidup sehat antara lain pola makan, kebiasaan berobat, cara berobat, kebiasaan merokok dan kebiasaan melakukan kegiatan fisik atau olahraga.

Pada bab ini akan dibahas beberapa indikator kesehatan dalam rangka memperoleh gambaran secara rinci mengenai kualitas kesehatan pemuda seperti keluhan kesehatan, angka kesakitan (*morbidity rate*), rata-rata lama sakit, dan cara berobat. Selain itu dibahas pula partisipasi pemuda dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan kesehatan termasuk program Keluarga Berencana (KB).

6.1. Keluhan Kesehatan

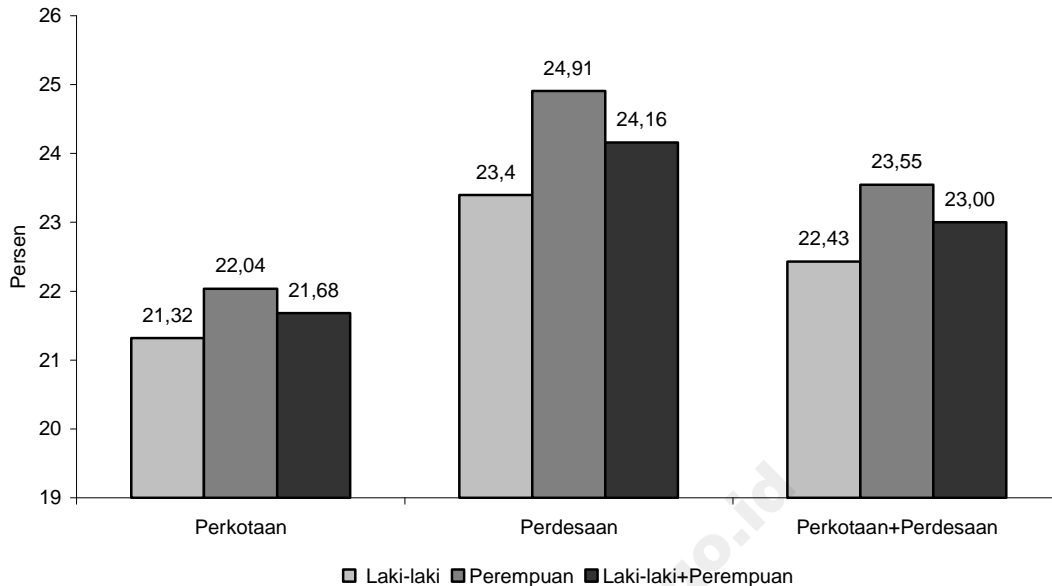
Pemuda merupakan penggerak pembangunan bangsa pada umumnya dan daerah pada khususnya. Namun syarat, pemuda yang dapat menjadi penggerak pembangunan adalah mereka yang berada dalam kondisi sehat. Jika tidak, akan semata-mata menjadi beban pembangunan. Yang dimaksud dengan sehat adalah bukan sekedar sehat jasmani saja, tetapi sehat secara mental, baik intrapersonal maupun sosial. Hal ini dimaksud agar pemuda dapat secara proaktif mengembangkan dirinya dalam mengelola berbagai sumber daya pembangunan untuk kepentingan negara. Dengan demikian, pemuda yang merupakan modal pembangunan adalah mereka yang sehat secara komprehensif

Salah satu indikator untuk menentukan derajat kesehatan penduduk secara kasar adalah keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut/kronis, kecelakaan, kriminalitas atau hal lain. Secara umum, jumlah kejadian keluhan kesehatan yang dialami penduduk pada dasarnya merupakan salah satu indikasi pola perilaku tidak sehat penduduk, antara lain adalah faktor kekurangpedulian dalam menjaga kesehatan serta kebugaran tubuh dan faktor keengganan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.

Gambar 6.1.1 menyajikan persentase pemuda yang mengalami keluhan kesehatan menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa dari seluruh populasi pemuda tercatat sebesar 23 persen yang mengalami keluhan kesehatan selama sebulan terakhir. Jika dibandingkan daerah perkotaan dan perdesaan, di daerah perdesaan persentase pemuda yang mengalami keluhan kesehatan sebesar 24,16 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan yang hanya sebesar 21,68 persen.

Dari Gambar 6.1.1 juga menampilkan bahwa pemuda perempuan lebih banyak mengalami gangguan kesehatan dibanding pemuda laki-laki. Hal ini terlihat dari proporsi pemuda perempuan yang mengeluh (23,55 persen) lebih besar dari pemuda laki-laki (22,43 persen). Pola yang sama juga ditemukan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Di daerah perkotaan persentase pemuda perempuan yang mengeluh sebesar 22,04 persen, pemuda laki-laki 21,32 persen. Sedangkan untuk daerah perdesaan persentase pemuda perempuan yang mengeluh sebesar 24,91 persen dan laki-laki sebesar 23,40 persen.

Gambar 6.1.1. Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Jenis Kelamin dan Tipe Daerah, Tahun 2007



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Persentase pemuda yang mengalami keluhan pada masing-masing provinsi nampak bervariasi dengan persentase antara 15,44 - 38,15 persen. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel Lampiran 6.1, persentase pemuda yang mengalami keluhan kesehatan paling tinggi secara berturut-turut ditemukan di provinsi Nusa Tenggara Timur (38,15 persen), Gorontalo (36,33 persen) dan Nanggroe Aceh Darussalam (32,97 persen). Sebaliknya persentase keluhan terkecil berturut-turut ditemukan di provinsi Jambi (15,44 persen), Jawa Tengah (19,19 persen) dan Sumatera Utara (19,25 persen).

Seseorang dapat mempunyai keluhan/mengalami gangguan kesehatan lebih dari satu jenis keluhan kesehatan, baik dalam waktu yang bersamaan maupun waktu yang berbeda selama satu bulan terakhir. Jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dirasakan oleh para pemuda menurut tipe daerah dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 6.1.1.

Dari berbagai macam jenis keluhan kesehatan yang dikeluhkan, ternyata panas, batuk dan pilek merupakan keluhan kesehatan yang paling banyak dirasakan oleh para pemuda dengan persentase sebesar 41,09 persen, 41,02

persen dan 40,59 persen. Jenis keluhan kesehatan yang juga banyak dirasakan oleh para pemuda berturut-turut adalah lainnya (35,52 persen), dan sakit Kepala berulang (25,65 persen). Gambaran jenis keluhan kesehatan yang serupa juga ditemukan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan serta baik untuk pemuda laki-laki maupun perempuan. Secara umum nampak bahwa persentase pemuda di daerah perdesaan yang mengalami keluhan kesehatan untuk setiap jenis keluhan cenderung lebih tinggi dari rekan mereka di perkotaan, kecuali untuk keluhan pilek terjadi sebaliknya.

Tabel 6.1.1 Persentase Pemuda yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis Keluhan Tahun 2007

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Jenis Keluhan							
	Panas	Batuk	Pilek	Asma/ napas sesak/ cepat	Diare/ Buang air	Sakit Kepala	Sakit Gigi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Perkotaan								
Laki-laki	43,04	43,92	43,71	4,46	6,48	20,07	7,16	33,26
Perempuan	35,57	37,81	38,61	4,70	6,42	24,71	7,82	36,97
Laki-laki + Perempuan	39,28	40,86	41,15	4,58	6,45	22,40	7,50	35,12
Perdesaan								
Laki-laki	44,85	43,79	41,70	5,27	7,77	25,45	10,21	34,58
Perempuan	39,72	38,46	38,74	5,35	7,70	30,18	11,54	37,00
Laki-laki + Perempuan	42,29	41,13	40,22	5,31	7,73	27,81	10,82	35,79
Perkotaan + Perdesaan								
Laki-laki	44,13	43,84	42,50	4,95	7,26	23,31	8,99	34,05
Perempuan	38,05	38,20	38,69	5,09	7,18	27,98	10,05	36,99
Laki-laki + Perempuan	41,09	41,02	40,59	5,02	7,22	25,65	5,92	35,52

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

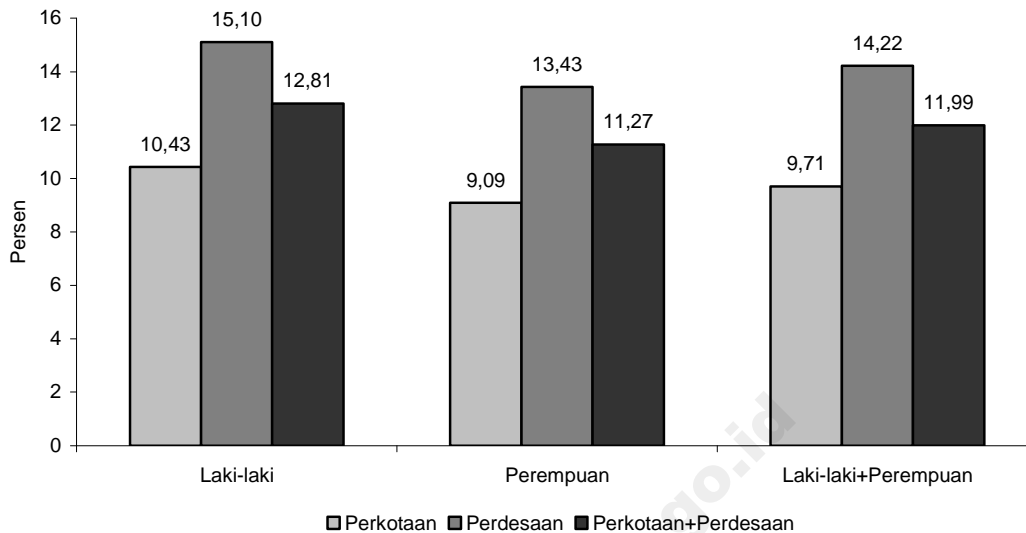
6.2. Angka Kesakitan

Seseorang yang mengalami keluhan kesehatan dapat mengakibatkan terganggu aktifitasnya sehari-hari seperti bekerja, sekolah, mengurus rumah tangga atau kegiatan lainnya. Apabila keluhan kesehatan tersebut mengakibatkan terganggunya kegiatan, maka orang tersebut dikatakan sakit dan proporsinya disebut sebagai angka kesakitan. Dengan kata lain, angka kesakitan merupakan persentase penduduk yang sakit terhadap populasi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan secara keseluruhan.

Salah satu visi Indonesia Sehat 2010 adalah adanya perubahan cara pandang (*mindset*) dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan yaitu dari paradigma sakit ke paradigma sehat. Sejalan dengan itu, salah satu program pembangunan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat adalah menurunkan angka kesakitan (RPJM 2004-2009). Gambar 6.2.1 menyajikan persentase pemuda yang menderita sakit menurut jenis kelamin dan tipe daerah selama satu bulan terakhir. Dari gambar tersebut terlihat bahwa dari pemuda yang mengalami keluhan kesehatan, 11,99 persen diantaranya menderita sakit. Bila dibandingkan menurut jenis kelamin, angka kesakitan pemuda perempuan lebih rendah dari pemuda laki-laki (12,81 persen berbanding 11,27 persen). Pola yang sama juga terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan.

Secara keseluruhan angka kesakitan pemuda di daerah perdesaan cenderung lebih tinggi dibanding pemuda yang tinggal di perkotaan (9,71 persen berbanding 14,22 persen), keadaan yang sama baik untuk pemuda laki-laki maupun pemuda perempuan. Pemuda laki-laki yang sakit di perdesaan tercatat sebesar 15,10 persen untuk daerah perkotaan sebesar 10,43 persen. Sedangkan untuk pemuda perempuan di perdesaan tercatat sebesar 13,43 persen dan sebesar 9,71 persen untuk daerah perkotaan.

Gambar 6.2.1. Persentase Pemuda yang Sakit menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

6.3. Lama Sakit

Jumlah hari sakit atau lama sakit menunjukkan intensitas atau derajat sakit yang dialami oleh seseorang. Lamanya sakit setiap orang berbeda antara satu dengan lainnya tergantung pada jenis penyakitnya. Semakin ringan sakit yang dialami, semakin pendek jumlah hari sakitnya, dan sebaliknya. Hasil Susenas 2007 diperoleh informasi bahwa pemuda yang sakit pada umumnya kurang dari satu minggu. Seperti yang disajikan pada Tabel 6.3.1, jumlah hari menderita sakit yang paling banyak dialami pemuda berturut-turut adalah 1-3 hari (49,29 persen), 4-7 hari (35,82 persen), kemudian selanjutnya pemuda yang menderita sakit lebih dari 7 hari secara keseluruhan persentasenya hanya berkisar antara 3 persen hingga 6 persen.

Tabel 6.3.1. Persentase Pemuda yang Sakit Menurut Lamanya Sakit dan Tipe Daerah Tahun 2007

Lamanya Sakit (dalam hari)	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1 - 3	54,91	45,54	49,29
4 - 7	32,29	38,17	35,82
8 - 14	5,89	7,16	6,65
15 - 21	2,89	3,60	3,32
22 - 30	4,02	5,53	4,92
Jumlah	100,00	100,00	100,00

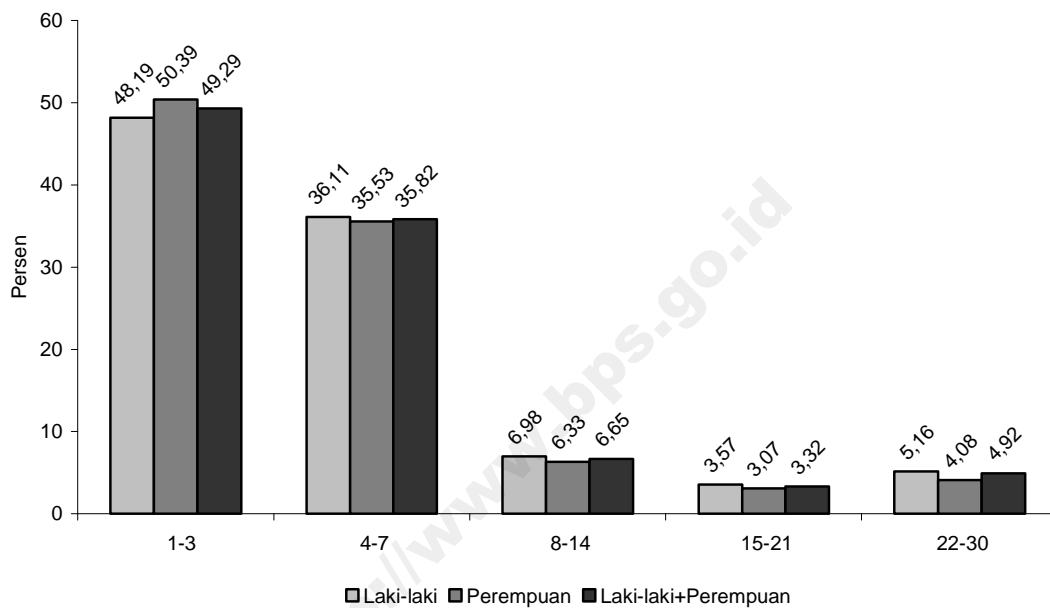
Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Pola yang sama berlaku baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Satu hal yang menarik adalah adanya suatu pola yang menunjukkan kecenderungan lama sakit pemuda di perdesaan lebih lama daripada di perkotaan. Kondisi ini terlihat dari persentase yang sakit lebih dari satu minggu dimana persentase pemuda di perdesaan lebih besar dari perkotaan. Di lain pihak, pemuda yang sakit kurang dari satu minggu lebih banyak dialami pemuda yang sakit di perkotaan daripada pemuda di perdesaan. Kemungkinan hal ini disebabkan karena pemuda di perkotaan lebih peduli dan lebih mengerti mengenai kesehatan dan didukung pula oleh ketersediaan sarana kesehatan yang lebih mudah dijumpai di daerah perkotaan.

Gambar 6.3.1 menunjukkan bahwa secara umum pemuda perempuan yang menderita sakit lebih tinggi dari pemuda laki-laki pada kelompok lama sakit 1-3 hari (50,39, persen berbanding 48,19 persen). Kondisi ini secara tidak langsung mencerminkan bahwa pemuda perempuan lebih rentan terhadap gangguan berbagai penyakit dibandingkan dengan pemuda laki-laki. Pada kelompok lama sakit 4 hari lebih, dan persentase pemuda laki-laki sedikit lebih tinggi dibanding pemuda perempuan. Persentase pemuda laki-laki yang menderita sakit pada kelompok lama sakit 4-7 hari sebesar 36,11 persen dan

yang lama sakitnya lebih dari 7 hari persentasenya berkisar 3,57 - 6,98 persen. Sementara untuk pemuda perempuan pada kelompok lama sakit 4-7 hari sebesar 35,53 persen dan yang lama sakitnya lebih dari 7 hari persentasenya berkisar 3,07 - 6,33 persen.

Gambar 6.3.1. Persentase Pemuda yang Sakit menurut Jenis Kelamin dan Lama sakit, Tahun 2007



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

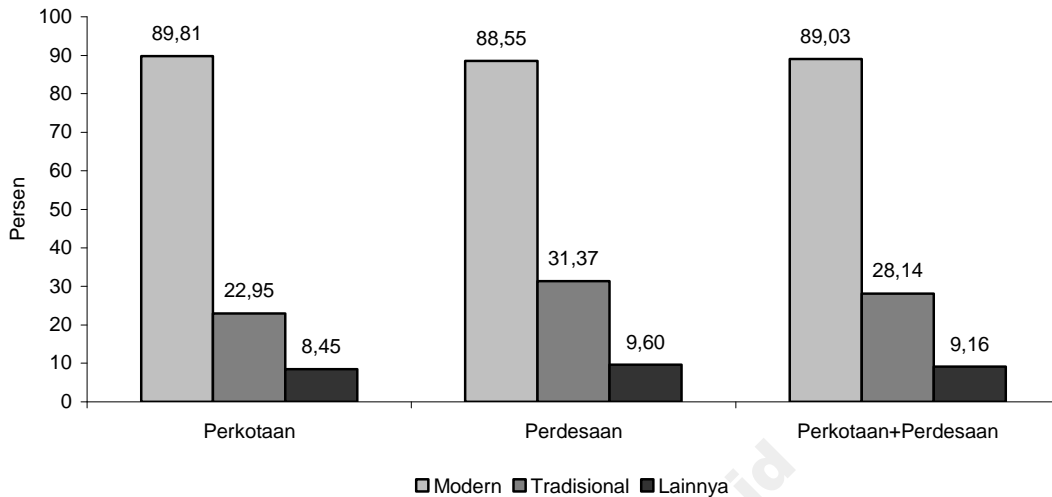
6.4. Cara Berobat

Timbulnya perilaku sehat, didasari pada pemahaman arti pentingnya kesehatan. Sehingga, tak mengherankan kalau banyak kasus kesehatan yang mencuat belakangan ini, bisa jadi disebabkan masih rendahnya pendidikan perilaku kesehatan yang diberikan atau dimiliki oleh masyarakat dan tingginya biaya kesehatan yang ada. Sebuah komunitas bisa dikatakan sehat, apabila telah memenuhi tiga pilar derajat kesehatan. Ketiga pilar tersebut merupakan perilaku sehat, lingkungan sehat, serta pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau.

Perilaku sehat merupakan pilar paling utama. Karena komponen tersebut ternyata sangat berpengaruh pada kedua pilar lainnya. Seperti seseorang dengan perilaku sehat, tentu akan menjaga lingkungannya agar tetap sehat. Dengan perilaku sehat, seseorang akan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada untuk memelihara kesehatannya. Namun, pada kenyataannya, di Indonesia hal tersebut seperti bertolak belakang. Arti pentingnya kesehatan sepertinya tidak terlalu diperhatikan. Akibatnya banyak kasus kesehatan merebak akhir-akhir ini. Yang kalau ditelusuri, sebenarnya berawal dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kesehatan di sekitarnya, akses ke pelayanan kesehatan serta biaya berobat yang dianggap masih terlalu mahal.

Didasari oleh pemahaman tersebut maka cara berobat yang biasa dilakukan seseorang merupakan faktor yang turut menentukan apakah orang yang bersangkutan telah memiliki pola perilaku hidup sehat. Sesuai dengan pola perilaku hidup sehat, pada dasarnya bila seseorang menderita sakit maka akan ditindak lanjuti dengan pengobatan/berobat. Untuk mengobati penyakitnya, seseorang dapat pergi berobat ke tempat-tempat pelayanan kesehatan maupun mencoba mengobati dirinya sendiri. Berbagai cara dapat dilakukan untuk mengobati sendiri, antara lain dengan minum obat baik obat modern, tradisional maupun obat-obatan lainnya.

Gambar 6.4.1. Persentase Pemuda yang Sakit dan Mengobati Sendiri menurut Jenis Pengobatan dan Tipe Daerah, Tahun 2007



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Demikian pula halnya dengan pemuda yang mengalami gangguan kesehatan pada umumnya juga melakukan upaya pengobatan, bagi pemuda yang mengobati sendiri, pengobatan secara modern menjadi pilihan mereka hal ini ditandai dengan lebih tingginya persentase pengobatan modern dibanding cara tradisional atau lainnya (modern 89,03 persen berbanding tradisional 28,14 persen dan lainnya 9,16) seperti yang disajikan pada Gambar 6.4.1. Dari gambar tersebut juga terlihat preferensi pemuda dalam memilih jenis obat yang dibedakan menurut tipe daerah. Secara umum nampak bahwa obat-obatan tradisional lebih banyak digunakan oleh para pemuda di perdesaan (31,37 persen) daripada pemuda di daerah perkotaan (22,95 persen), sebaliknya obat modern lebih banyak digunakan oleh para pemuda di perkotaan (84.81 persen) dibandingkan dengan pemuda di perdesaan (88,55 persen).

Bila dibandingkan menurut jenis kelamin, terlihat bahwa baik pemuda laki-laki maupun pemuda perempuan mempunyai pola yang relatif sama dalam memilih jenis obat yang digunakan untuk mengobati sakitnya. Seperti yang disajikan pada Tabel 6.4.1, keduanya cenderung lebih banyak memilih obat

modern dibandingkan obat tradisional atau lainnya. Pola preferensi ini sama di daerah perkotaan dengan perdesaan.

Tabel 6.4.1 Persentase Pemuda yang Mengobati Sendiri Sakitnya Menurut Jenis Obat, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin Tahun 2007

Jenis Obat yang Digunakan	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan + Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Modern	90,41	91,70	91,06	88,74	89,15	88,95	819,47	90,25	89,87
Tradisional	18,92	18,65	18,78	27,72	27,65	27,69	23,86	23,77	23,81
Lainnya	7,34	6,75	7,04	9,03	8,69	8,85	8,29	7,85	8,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Selain mengobati sendiri, seseorang juga dapat mengobati sakitnya dengan berobat jalan yaitu mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Umumnya penggunaan sarana berobat ini berkaitan dengan biaya dan ketersediaan pelayanan. Tabel 6.4.2 menunjukkan fasilitas pelayanan kesehatan yang dipilih oleh pemuda dalam rangka mengobati sakitnya. Tempat fasilitas pelayanan kesehatan yang paling banyak dikunjungi oleh pemuda yang berobat jalan pada tahun 2007 ini secara berturut-turut adalah puskesmas (34,62 persen), kemudian praktek dokter (29,59 persen), dan nakes atau tenaga kesehatan (27,45 persen). Pola yang sama terjadi baik pada pemuda laki-laki maupun perempuan.

Meskipun ketiga jenis tempat berobat tersebut menjadi tempat pelayanan favorit, tetapi bila diperhatikan besaran proporsi pemuda yang berobat, maka terlihat adanya perbedaan pola antara daerah perkotaan dengan perdesaan. Seperti yang disajikan pada Tabel 6.4.2, pemuda di perkotaan cenderung berobat jalan ke tempat praktek dokter (40,29 persen) sedangkan

di perdesaan hanya 21,22 persen. Kondisi seperti ini mungkin terkait dengan lebih banyaknya tempat praktek dokter maupun rumah sakit di daerah perkotaan sehingga bagi pemuda yang berdomisili di perdesaan agak sulit menjangkau fasilitas tempat berobat tersebut. Begitu pula dengan pemuda yang berobat jalan ke rumah sakit, nampak lebih banyak diminati oleh pemuda di perkotaan (16,00 persen) sementara di perdesaan hanya 8,11 persen, sebaliknya pemuda perdesaan lebih banyak mengakses praktek nakes (34,700 persen) dari pada pemuda di perkotaan (17,63 persen).

Tabel 6.4.2 Persentase Pemuda Sakit yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat dan Jenis Kelamin Tahun 2007

Tempat Berobat	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Rumah Sakit	15,31	16,63	15,98	7,81	8,40	8,11	10,95	11,93	11,46
Praktek Dokter	42,87	39,15	40,92	22,58	19,93	21,22	31,09	28,18	29,59
Puskesmas	26,98	30,49	28,82	37,27	40,44	38,89	32,96	36,17	34,62
Praktek Nakes	17,56	17,69	17,63	34,63	34,77	34,70	27,47	27,43	27,45
Praktek Batra	1,53	1,50	1,51	2,47	2,24	2,35	2,08	1,92	2,00
Dukun Bersalin	0,17	0,40	0,29	0,23	1,05	0,65	0,20	0,17	0,50
Lainnya	2,83	2,38	2,60	3,65	2,99	3,31	3,31	2,73	3,01

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

6.5. Partisipasi Pemuda dalam Program Keluarga Berencana (KB)

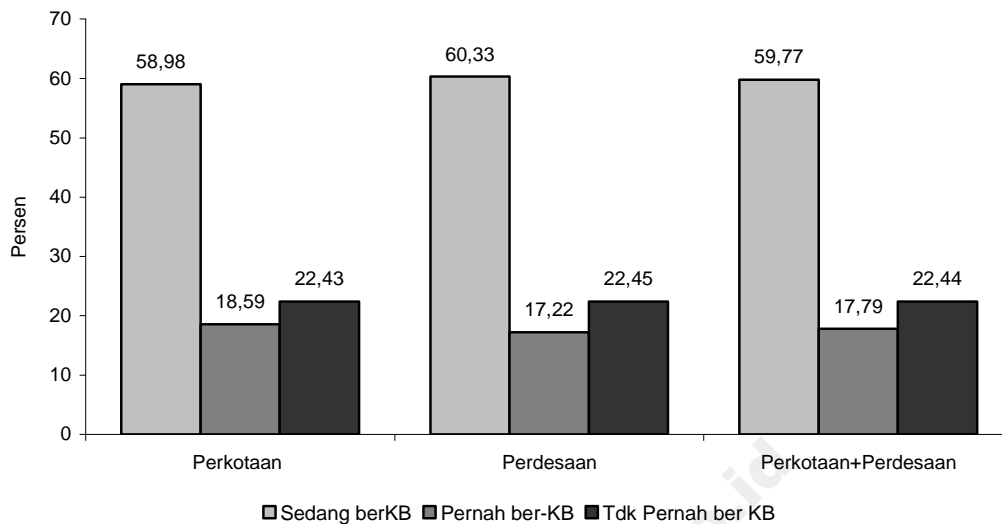
Peningkatan derajat kesehatan terkait dengan jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin tinggi pula beban pemerintah

memfasilitasi faktor kesehatan. Dengan membatasi kelahiran, ini berarti membantu mengurangi beban pemerintah. Pertumbuhan jumlah penduduk yang telah melewati batas ideal Seharusnya lebih dicermati, karena dapat berakibat meledaknya jumlah penduduk muda, yang berarti juga bermakna meningkatnya beban untuk pemenuhan hak-haknya, berarti juga penambahan beban pemerintah dalam hak layanan dasar, termasuk kesehatan di dalamnya. Bila kemudian hal ini dikomparasikan dengan keadaan pelayanan kesehatan yang ada saat ini, jelas pertumbuhan penduduk tersebut akan menjadi masalah yang tidak kecil. Bila Indonesia mampu menekan laju pertumbuhan penduduk, dalam jangka panjang masalah beban dapat dikurangi, termasuk beban dalam pemenuhan berbagai hak publik, seperti kesehatan terutama untuk usia muda, hingga pada akhirnya berdampak pada menurunnya rasio ketergantungan pada layanan kesehatan masyarakat, karena orang dengan usia produktif diperkirakan mampu menutupi kebutuhannya sendiri

Struktur umur pemuda yang tergolong usia produktif atau subur menjadi sasaran target ideal dalam upaya membatasi jumlah kelahiran. Sejalan dengan itu, tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan program Keluarga Berencana (KB) pada dasarnya merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan program tersebut.

Berdasarkan hasil Susenas 2007, lebih dari separuh (59,77 persen) pemuda perempuan yang berstatus kawin sedang mengikuti program KB, kemudian sebanyak 17,79 persen pernah ikut KB tetapi sekarang tidak ikut lagi dan 22,44 persen sama sekali tidak pernah mengikuti program KB (Gambar 6.5.1). Bila dilihat menurut tipe daerah, partisipasi para pemuda dalam program KB nampak mempunyai pola yang serupa, baik untuk daerah perkotaan maupun daerah perdesaan.

Gambar 6.5.1: Persentase Pemuda Perempuan yang Berstatus Kawin menurut Partisipasi KB dan Tipe Daerah, Tahun 2007



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Dilihat menurut berbagai jenis alat/cara KB yang ada, pada Tabel 6.5.1 menyajikan persentase pemuda peserta program KB menurut jenis alat/cara KB yang digunakan oleh pemuda perempuan yang berstatus kawin menurut tipe daerah. Nampak bahwa alat KB suntik merupakan jenis alat KB yang paling banyak digunakan oleh pemuda berstatus kawin yang ikut dalam program KB yaitu sebesar 65,02 persen, 23,94 persen memilih menggunakan pil KB, sisanya adalah mereka yang menggunakan AKDR/IUD, susuk dan lainnya.

Alat KB suntik dan pil juga merupakan alat yang paling banyak digunakan baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Untuk alat KB lainnya, seperti AKDR, MOW dan kondom proporsinya lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan daerah perdesaan, untuk daerah perdesaan pemuda perempuan proporsi penggunaan susuk KB lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perkotaan.

Tabel 6.5.1 Persentase Pemuda Perempuan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB Menurut Alat/ Cara KB yang Digunakan dan Tipe Daerah Tahun 2007

Alat/Cara KB yang Digunakan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
MOW/ tubektomi	1,28	0,94	1,08
MOP/ vasektomi	0,75	0,63	0,68
AKDR/ IUD	6,45	2,60	4,18
Suntik KB	61,83	67,24	65,02
Susuk/ Norplant/ Implant	2,39	4,54	3,66
Pil KB	25,29	23,00	23,94
Kondom / Karet KB	0,89	0,23	0,50
Intravag	0,11	0,04	0,07
Alat/ Cara tradisional	0,99	0,77	0,86
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

6.6. Umur Perkawinan Pertama

Dari segi kualitas jumlah penduduk yang tinggi merupakan potensi yang sangat bagus untuk tenaga kerja, bilamana SDM nya berkualitas tinggi. Namun jika SDM nya rendah, justru berpotensi menjadi beban dalam proses pembangunan. Saat ini perkembangan jumlah penduduk yang cukup pesat menjadi dasar pemikiran guna meningkatkan upaya memperlambat laju pertumbuhan penduduk. Salah satu upaya tersebut adalah mencermati berbagai faktor yang melatar belakangi tingginya laju pertumbuhan penduduk, yaitu tingkat fertilitas.

Tingkat fertilitas tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan program keluarga berencana, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, salah satunya adalah umur perkawinan pertama. Semakin muda usia perkawinan pertama mengakibatkan masa kesuburan yang semakin panjang dan meningkatkan peluang mempunyai banyak anak, dan sebaliknya. Pernikahan

yang dilakukan pada usia yang masih sangat muda, selain menyalahi ketentuan yang ditetapkan dalam UU Perkawinan, secara mental maupun fisik juga berpengaruh pada perkembangan ibu dan anaknya. Selain itu juga dapat meningkatkan resiko kematian yang akan dialami akibat kehamilan/kelahiran usia muda.

Tabel 6.6.1 menyajikan persentase pemuda perempuan yang pernah kawin menurut umur perkawinan pertama dan tipe daerah. Dari tabel tersebut ditunjukkan bahwa secara umum mayoritas pemuda perempuan menikah pada kelompok umur 19-24 tahun dengan persentase mencapai 49,05 persen. Sementara itu, pemuda perempuan yang menikah relatif muda (17-18 tahun) juga cukup banyak yaitu sebesar 25,06 persen. Bahkan ada pula yang melakukan perkawinan pertama pada saat umur 16 tahun ke bawah (umur 16 8,62 persen dan 16 kebawah 6,52 persen). Gambaran serupa juga terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Persentase pemuda perempuan yang menikah pada usia 19-24 tahun di daerah perkotaan mencapai sebesar 56,04 persen, sedangkan di daerah perdesaan hanya sebesar 44,08 persen.

Tabel 6.6.1 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin Menurut Tipe Daerah dan Kelompok Umur Saat Perkawinan Pertama Tahun 2007

Tipe Daerah	Umur Saat Perkawinan Pertama					Jumlah
	< 16	16	17 - 18	19 - 24	25 - 35	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	3,63	5,28	18,89	5,04	16,17	100,00
Perdesaan	8,58	11,00	29,45	44,08	6,89	100,00
Perkotaan + Perdesaan	6,52	8,62	25,06	49,05	10,74	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Dilihat perbedaannya menurut kelompok umur pada daerah tempat tinggal, perkawinan pertama perempuan yang dilakukan pada saat usia yang sangat muda lebih banyak terjadi di daerah perdesaan, sedangkan perkawinan

yang dilakukan pada usia yang lebih matang lebih banyak terjadi di daerah perkotaan. Seperti yang terlihat pada Tabel 6.6.1, persentase pemuda perempuan yang menikah pada usia kurang dari 19 tahun di daerah perdesaan cenderung lebih tinggi dari mereka yang tinggal di perkotaan, sebaliknya persentase mereka yang menikah pada usia 19 tahun atau lebih cenderung lebih tinggi di perkotaan dibandingkan dengan daerah perdesaan. Kedua gambaran tersebut merupakan indikasi bahwa pemuda perempuan di daerah perdesaan cenderung menikah lebih cepat dari rekan mereka di perkotaan.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

HASIL STUDI PEMUDA

<http://www.bps.go.id>



HASIL STUDI MENDALAM PEMUDA

Daya saing suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM). Sebagai bagian terbesar dari jumlah penduduk Indonesia dan sebagai potensi strategis, kualitas SDM pemuda menjadi sangat berarti, dalam upaya membantu menyediakan data dan informasi tentang keadaan sosial ekonomi pemuda maka secara berkala Badan Pusat Statistik (BPS) telah menerbitkan publikasi "Statistik Pemuda". Untuk mempertajam analisis, sekaligus meningkatkan kualitas publikasi yang akan datang, maka Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, BPS akan melaksanakan studi mendalam mengenai kehidupan dan kegiatan sehari-hari pemuda di 4 (empat) provinsi, yaitu Sumatera Barat, Banten, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan.

Secara umum maksud dan tujuan studi tentang pemuda dan kegiatan sehari-harinya dalam rumah tangga adalah ingin melihat gambaran lebih rinci mengenai

keadaan sosial ekonomi pemuda serta kesehariannya dilihat dari berbagai aspek penting, antara lain demografis, pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Adapun secara khusus tujuan studi pemuda adalah:

1. Mendapatkan informasi yang dapat menjawab fenomena dari data yang dihasilkan Susenas.
2. Pendukung informasi data Susenas.

Pelaksanaan studi mendalam pemuda mencakup 32 rumah tangga sampel yang tersebar di 4 (empat) provinsi, dengan rincian 8 rumahtangga sampel per provinsi. Rumah tangga sampel yang diambil adalah yang mempunyai anggota rumah tangga berumur 15-35 tahun (pemuda).

METODOLOGI

1. Cakupan Wilayah

Studi mendalam pemuda 2008 dilakukan di 4 propinsi dengan alokasi sample yaitu:

Alokasi sampel studi			
Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa
(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera Barat	Kota Padang	Padang Utara	Air Tawar Barat
Sumatera Barat	Kota Padang	Padang Utara	Air Tawar Utara
Banten	Kota Tangerang	Karawaci	Karawaci
Banten	Kota Tangerang	Karawaci	Cimone Jaya
Kalimantan Selatan	Kota Banjar	Cempaka	Cempaka
Kalimantan Selatan	Kota Banjar	Cempaka	Sungai Tiung
NTB	Lombok Barat	Lingsar	Lingsar
NTB	Lombok Barat	Lingsar	Batu Kumbung

2. Unit Pencacahan

Unit pencacahan untuk Studi Pemuda mencakup keterangan pemuda tentang kegiatan sehari-harinya. Rumah tangga terpilih dalam penelitian ini adalah rumah

tangga yang salah satu atau lebih anggota rumahtangganya berumur 15-35 tahun ke atas. Dari keempat provinsi tersebut dipilih ibukota provinsi atau kabupaten terdekat dengan ibukota provinsi. Kemudian dari kabupaten/kota terpilih, ditentukan kecamatan dan desa/kelurahan yang cukup banyak penduduknya yang berumur 15-35 tahun ke atas berdasarkan data Susenas 2007 di provinsi terpilih. Kemudian, dari desa terpilih tersebut dipilih rumahtangga yang ada penduduk pemudanya. Dengan Kriteria :

1. Pemuda yang bekerja : - Pekerja Keluarga
 - Pekerja wira usaha
 - Lainnya
2. Pemuda yang tidak bekerja: - Jenjang pendidikan SM keatas
 - Jenjang pendidikan SM kebawah

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara petugas lapangan mendatangi setiap rumah tangga yang terpilih dalam studi pemuda dan mewawancarai langsung responden yang bersangkutan (anggota rumah tangga berumur 15-35 tahun) untuk memperoleh informasi yang diinginkan.

<http://www.bps.go.id>

TABEL LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

Tabel 3.1 Jumlah Pemuda menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2007
(Dalam Ribuan)

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NAD	195,57	215,23	410,80	596,06	648,65	1244,71	791,63	863,88	1.655,51
Sumatera Utara	1029,71	1055,11	2084,82	1174,55	1188,39	2362,94	2204,26	2243,50	4447,76
Sumatera Barat	256,88	278,15	535,03	501,96	520,85	1022,81	758,84	799,00	1.557,84
Riau	363,33	348,23	711,56	629,99	612,82	1242,81	993,32	961,05	1.954,37
Jambi	157,11	160,57	317,68	369,10	372,77	741,86	526,21	533,34	1.059,55
Sumatera Selatan	489,06	472,38	961,44	854,64	22,33	1690,92	1343,70	1308,66	2.652,36
Bengkulu	84,49	93,47	177,96	218,30	212,49	430,79	302,79	305,96	608,75
Lampung	304,02	303,50	607,51	1037,07	945,55	1982,61	1341,09	1249,04	2.590,13
Bangka Belitung	87,25	85,88	173,13	139,34	125,41	264,75	226,59	211,28	437,88
Kepulauan Riau	214,43	310,91	525,34	52,17	52,08	104,26	266,60	362,99	629,60
DKI. Jakarta	1861,31	1988,68	3849,98	-	-	-	1861,31	1988,68	3.849,98
Jawa Barat	3929,33	4005,61	7934,94	3128,55	3033,22	6161,77	7057,88	7038,83	14.096,71
Jawa Tengah	2288,21	2330,25	4618,45	2825,64	2871,30	5696,94	5113,84	5201,55	10.315,39
DI. Yogyakarta	408,77	385,72	794,49	192,14	177,24	369,38	600,91	562,96	1.163,87
Jawa Timur	2596,81	2730,41	5327,21	3188,90	3323,70	6512,60	5785,71	6054,11	11.839,82
Banten	1029,49	1130,85	2160,34	780,76	764,79	1545,56	1810,26	1895,64	3.705,90
Bali	318,05	330,36	648,41	259,38	241,32	500,70	577,42	571,68	1.149,10
Nusa Tenggara Barat	294,46	320,78	615,24	425,39	519,64	945,04	719,86	840,42	1.560,27
Nusa Tenggara Timur	143,49	159,35	302,84	538,53	578,19	1116,71	682,02	737,53	1.419,55
Kalimantan Barat	219,61	209,46	429,07	556,79	538,36	1095,14	776,40	747,81	1.524,21
Kalimantan Tengah	122,58	120,86	243,44	275,84	266,91	542,75	398,42	387,77	786,19
Kalimantan Selatan	247,07	260,04	507,11	380,20	388,73	768,94	627,27	648,78	1.276,04
Kalimantan Timur	336,47	326,69	663,16	268,16	253,62	521,77	604,63	580,30	1.184,93
Sulawesi Utara	138,04	139,49	277,53	229,31	217,30	446,61	367,35	356,79	724,14
Sulawesi Tengah	94,00	100,83	194,83	333,15	335,94	669,09	427,14	436,78	863,92
Sulawesi Selatan	459,15	514,58	973,73	858,67	911,00	1769,67	1317,82	1425,58	2.743,40
Sulawesi Tenggara	87,10	98,15	185,25	268,85	281,35	550,20	355,95	379,50	735,45
Gorontalo	43,00	48,31	91,31	124,13	127,82	251,95	167,13	176,13	343,26
Sulawesi Barat	27,40	31,01	58,41	146,51	154,46	300,96	173,90	185,47	359,37
Maluku	75,94	78,29	154,23	146,45	149,12	295,57	222,39	227,41	449,80
Maluku Utara	46,76	51,51	98,27	126,62	124,11	250,73	173,38	175,62	349,00
Irian Jaya Barat	40,44	47,20	87,64	86,29	87,73	174,02	126,73	134,93	261,66
Papua	99,17	102,85	202,01	235,73	240,29	476,02	334,90	343,13	678,03
INDONESIA	18.088,48	18.834,68	36.923,15	20.949,17	21.101,41	42.050,58	39.037,64	39.936,09	78.973,73

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 3.2 Rasio Jenis Kelamin Pemuda menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	90,86	91,89	91,64
Sumatera Utara	97,59	98,84	98,25
Sumatera Barat	92,36	96,37	94,97
Riau	104,34	102,80	103,36
Jambi	97,84	99,01	98,66
Sumatera Selatan	103,53	102,20	102,68
Bengkulu	90,39	102,74	98,96
Lampung	100,17	109,68	107,37
Bangka Belitung	101,60	111,11	107,25
Kepulauan Riau	68,97	100,17	73,45
DKI. Jakarta	93,60	-	93,60
Jawa Barat	98,10	103,14	100,27
Jawa Tengah	98,20	98,41	98,31
DI. Yogyakarta	105,98	108,41	106,74
Jawa Timur	95,11	95,94	95,57
Banten	91,04	102,09	95,50
Bali	96,27	107,48	101,01
Nusa Tenggara Barat	91,80	81,86	85,65
Nusa Tenggara Timur	90,05	93,14	92,47
Kalimantan Barat	104,85	103,42	103,82
Kalimantan Tengah	101,42	103,35	102,74
Kalimantan Selatan	95,01	97,81	96,69
Kalimantan Timur	103,00	105,73	104,19
Sulawesi Utara	98,96	105,53	102,96
Sulawesi Tengah	93,22	99,17	97,79
Sulawesi Selatan	89,23	94,26	92,44
Sulawesi Tenggara	88,74	95,56	93,79
Gorontalo	89,01	97,12	94,90
Sulawesi Barat	88,34	94,85	93,76
Maluku	97,00	98,21	97,79
Maluku Utara	90,77	102,02	98,72
Irian Jaya Barat	85,69	98,36	93,93
Papua	96,42	98,10	97,60
INDONESIA	96,04	99,28	97,75

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 3.3.1 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kelompok Umur, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan				
	15-19	20-24	25-29	30-35	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	25,74	26,80	23,09	24,36	100,00
Sumatera Utara	28,40	25,42	21,99	24,19	100,00
Sumatera Barat	25,54	26,16	22,91	25,39	100,00
Riau	23,46	24,68	25,92	25,94	100,00
Jambi	25,19	25,43	25,51	23,87	100,00
Sumatera Selatan	25,96	25,92	24,30	23,82	100,00
Bengkulu	26,57	27,05	22,68	23,70	100,00
Lampung	27,21	23,05	23,63	26,12	100,00
Bangka Belitung	23,63	24,39	24,86	27,12	100,00
Kepulauan Riau	15,24	31,18	27,06	26,53	100,00
DKI. Jakarta	20,86	25,51	26,44	27,19	100,00
Jawa Barat	24,79	23,47	23,69	28,05	100,00
Jawa Tengah	26,41	23,09	23,08	27,42	100,00
DI. Yogyakarta	19,85	31,25	23,86	25,05	100,00
Jawa Timur	23,26	23,43	24,07	29,25	100,00
Banten	24,24	24,82	23,48	27,46	100,00
Bali	19,47	22,95	25,39	32,19	100,00
Nusa Tenggara Barat	29,94	24,47	22,11	23,48	100,00
Nusa Tenggara Timur	30,79	24,95	21,59	22,67	100,00
Kalimantan Barat	25,49	25,21	23,89	25,41	100,00
Kalimantan Tengah	24,93	24,31	23,82	26,94	100,00
Kalimantan Selatan	24,22	22,79	23,98	29,02	100,00
Kalimantan Timur	20,84	23,78	26,40	28,98	100,00
Sulawesi Utara	24,59	22,72	24,17	28,52	100,00
Sulawesi Tengah	25,31	26,20	22,21	26,27	100,00
Sulawesi Selatan	25,97	27,38	22,45	24,20	100,00
Sulawesi Tenggara	26,96	26,09	23,55	23,41	100,00
Gorontalo	25,70	19,61	22,89	31,80	100,00
Sulawesi Barat	31,02	23,61	22,00	23,38	100,00
Maluku	30,77	26,05	22,33	20,85	100,00
Maluku Utara	28,98	26,79	21,59	22,64	100,00
Irian Jaya Barat	23,82	22,87	26,92	26,38	100,00
Papua	22,61	24,10	25,73	27,56	100,00
INDONESIA	24,41	24,47	23,96	27,16	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 3.3.2 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kelompok Umur, Tahun 2007

Perdesaan					
Provinsi	15-19	20-24	25-29	30-35	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	28,38	23,81	22,53	25,28	100,00
Sumatera Utara	31,06	21,08	21,57	26,29	100,00
Sumatera Barat	28,25	21,42	22,42	27,92	100,00
Riau	25,11	22,90	24,51	27,48	100,00
Jambi	25,20	22,56	24,98	27,27	100,00
Sumatera Selatan	26,91	22,38	22,99	27,73	100,00
Bengkulu	27,17	21,31	24,24	27,28	100,00
Lampung	24,77	22,59	23,96	28,67	100,00
Bangka Belitung	25,77	24,11	24,88	25,24	100,00
Kepulauan Riau	24,44	22,75	27,08	25,73	100,00
DKI. Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	27,39	20,81	22,86	28,95	100,00
Jawa Tengah	26,79	20,72	22,86	29,63	100,00
DI. Yogyakarta	26,82	20,63	21,93	30,62	100,00
Jawa Timur	24,12	21,78	23,84	30,26	100,00
Banten	29,92	23,77	21,55	24,76	100,00
Bali	22,19	19,73	24,28	33,80	100,00
Nusa Tenggara Barat	30,76	21,75	22,58	24,92	100,00
Nusa Tenggara Timur	26,69	22,78	23,55	26,98	100,00
Kalimantan Barat	25,54	22,91	24,04	27,51	100,00
Kalimantan Tengah	26,22	21,24	23,19	29,35	100,00
Kalimantan Selatan	26,81	21,61	23,28	28,31	100,00
Kalimantan Timur	22,18	21,06	26,84	29,93	100,00
Sulawesi Utara	23,70	21,83	21,81	32,66	100,00
Sulawesi Tengah	24,67	22,93	23,79	28,61	100,00
Sulawesi Selatan	27,73	21,79	22,84	27,65	100,00
Sulawesi Tenggara	28,82	23,20	21,42	26,57	100,00
Gorontalo	24,74	20,42	25,72	29,12	100,00
Sulawesi Barat	26,16	23,28	21,93	28,63	100,00
Maluku	27,76	22,39	23,52	26,33	100,00
Maluku Utara	25,57	21,19	25,15	28,10	100,00
Irian Jaya Barat	24,91	23,95	24,28	26,86	100,00
Papua	27,43	21,19	24,12	27,26	100,00
INDONESIA	26,64	21,75	23,19	28,42	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 3.3.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kelompok Umur, Tahun 2007

Perkotaan+Perdesaan					
Provinsi	15-19	20-24	25-29	30-35	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	27,73	24,55	22,67	25,05	100,00
Sumatera Utara	29,81	23,12	21,76	25,31	100,00
Sumatera Barat	27,32	23,05	22,59	27,05	100,00
Riau	24,51	23,55	25,02	26,92	100,00
Jambi	25,19	23,42	25,14	26,25	100,00
Sumatera Selatan	26,57	23,66	23,46	26,31	100,00
Bengkulu	26,99	22,99	23,79	26,23	100,00
Lampung	25,34	22,70	23,88	28,07	100,00
Bangka Belitung	24,92	24,22	24,87	25,99	100,00
Kepulauan Riau	16,76	29,78	27,06	26,40	100,00
DKI. Jakarta	20,86	25,51	26,44	27,19	100,00
Jawa Barat	25,93	22,31	23,33	28,44	100,00
Jawa Tengah	26,62	21,78	22,96	28,64	100,00
DI. Yogyakarta	22,06	27,88	23,25	26,82	100,00
Jawa Timur	23,73	22,52	23,94	29,81	100,00
Banten	26,61	24,38	22,67	26,33	100,00
Bali	20,65	21,55	24,91	32,89	100,00
Nusa Tenggara Barat	30,44	22,82	22,39	24,35	100,00
Nusa Tenggara Timur	27,57	23,24	23,13	26,06	100,00
Kalimantan Barat	25,53	23,56	24,00	26,92	100,00
Kalimantan Tengah	25,82	22,19	23,38	28,60	100,00
Kalimantan Selatan	25,78	22,08	23,55	28,59	100,00
Kalimantan Timur	21,43	22,58	26,59	29,40	100,00
Sulawesi Utara	24,04	22,17	22,72	31,07	100,00
Sulawesi Tengah	24,81	23,67	23,44	28,08	100,00
Sulawesi Selatan	27,10	23,77	22,70	26,42	100,00
Sulawesi Tenggara	28,35	23,93	21,95	25,77	100,00
Gorontalo	24,99	20,21	24,97	29,83	100,00
Sulawesi Barat	26,95	23,33	21,94	27,78	100,00
Maluku	28,80	23,64	23,11	24,45	100,00
Maluku Utara	26,53	22,76	24,15	26,56	100,00
Irian Jaya Barat	24,55	23,59	25,16	26,70	100,00
Papua	26,00	22,06	24,60	27,35	100,00
INDONESIA	25,60	23,02	23,55	27,83	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 3.4.1 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Perkawinan, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan				
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	62,41	36,71	0,54	0,34	100,00
Sumatera Utara	60,84	38,34	0,64	0,18	100,00
Sumatera Barat	60,11	38,84	0,80	0,25	100,00
Riau	54,39	44,65	0,69	0,27	100,00
Jambi	54,89	43,28	1,55	0,28	100,00
Sumatera Selatan	58,22	40,33	1,08	0,37	100,00
Bengkulu	54,85	44,28	0,68	0,19	100,00
Lampung	55,83	42,34	1,45	0,38	100,00
Bangka Belitung	49,56	49,04	1,21	0,20	100,00
Kepulauan Riau	55,24	44,03	0,61	0,12	100,00
DKI. Jakarta	56,45	42,14	1,13	0,29	100,00
Jawa Barat	51,51	46,58	1,53	0,38	100,00
Jawa Tengah	54,18	44,68	0,92	0,23	100,00
DI. Yogyakarta	62,23	37,13	0,40	0,24	100,00
Jawa Timur	49,77	48,78	1,11	0,35	100,00
Banten	52,40	45,90	1,48	0,23	100,00
Bali	47,50	51,50	0,69	0,31	100,00
Nusa Tenggara Barat	51,02	45,72	2,95	0,32	100,00
Nusa Tenggara Timur	64,52	34,34	0,86	0,28	100,00
Kalimantan Barat	55,84	42,90	1,06	0,21	100,00
Kalimantan Tengah	45,82	52,49	1,18	0,51	100,00
Kalimantan Selatan	44,86	52,84	1,84	0,46	100,00
Kalimantan Timur	49,91	48,74	1,07	0,27	100,00
Sulawesi Utara	50,53	48,21	0,82	0,43	100,00
Sulawesi Tengah	53,32	45,37	0,99	0,32	100,00
Sulawesi Selatan	59,04	39,48	1,22	0,26	100,00
Sulawesi Tenggara	57,11	41,79	0,85	0,25	100,00
Gorontalo	47,61	49,67	2,20	0,52	100,00
Sulawesi Barat	58,67	39,97	1,25	0,11	100,00
Maluku	61,31	37,66	0,64	0,39	100,00
Maluku Utara	55,99	42,61	1,04	0,35	100,00
Irian Jaya Barat	48,73	50,57	0,56	0,14	100,00
Papua	51,30	47,09	1,26	0,34	100,00
INDONESIA	53,75	44,78	1,17	0,30	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 3.4.2 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Perkawinan, Tahun 2007

Provinsi	Perdesaan				
	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nanggroe Aceh Darussalam	56,24	42,02	1,00	0,75	100,00
Sumatera Utara	51,12	47,64	0,83	0,40	100,00
Sumatera Barat	50,01	47,93	1,66	0,40	100,00
Riau	45,40	53,39	0,86	0,35	100,00
Jambi	41,23	56,84	1,54	0,39	100,00
Sumatera Selatan	44,01	54,45	1,16	0,38	100,00
Bengkulu	42,08	56,14	1,28	0,50	100,00
Lampung	42,97	56,19	0,69	0,16	100,00
Bangka Belitung	43,85	54,46	1,44	0,25	100,00
Kepulauan Riau	44,74	54,01	0,48	0,77	100,00
DKI. Jakarta	-	-	-	-	-
Jawa Barat	39,11	58,10	2,46	0,33	100,00
Jawa Tengah	42,27	56,20	1,16	0,36	100,00
DI. Yogyakarta	45,85	53,05	0,98	0,12	100,00
Jawa Timur	37,87	60,09	1,59	0,44	100,00
Banten	44,82	52,51	2,36	0,32	100,00
Bali	39,82	59,48	0,60	0,10	100,00
Nusa Tenggara Barat	43,35	53,30	2,91	0,45	100,00
Nusa Tenggara Timur	48,45	49,32	1,58	0,66	100,00
Kalimantan Barat	44,01	54,72	0,91	0,36	100,00
Kalimantan Tengah	42,55	55,95	1,19	0,31	100,00
Kalimantan Selatan	41,29	56,25	1,89	0,57	100,00
Kalimantan Timur	41,25	57,29	1,08	0,38	100,00
Sulawesi Utara	45,01	53,44	1,33	0,23	100,00
Sulawesi Tengah	40,52	57,56	1,47	0,45	100,00
Sulawesi Selatan	48,93	48,70	1,83	0,53	100,00
Sulawesi Tenggara	44,22	53,91	1,39	0,49	100,00
Gorontalo	39,12	59,15	1,36	0,37	100,00
Sulawesi Barat	44,72	53,58	1,32	0,39	100,00
Maluku	48,17	50,58	0,79	0,46	100,00
Maluku Utara	39,79	58,25	1,46	0,50	100,00
Irian Jaya Barat	42,00	56,23	1,06	0,71	100,00
Papua	38,54	59,73	0,64	1,10	100,00
INDONESIA	43,01	55,08	1,51	0,40	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 3.4.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Perkawinan, Tahun 2007

Perkotaan+Perdesaan					
Provinsi	Belum Kawin	Kawin	Cerai Hidup	Cerai Mati	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darussalam	57,77	40,70	0,88	0,65	100,00
Sumatera Utara	55,68	43,28	0,74	0,30	100,00
Sumatera Barat	53,48	44,81	1,37	0,35	100,00
Riau	48,67	50,21	0,79	0,32	100,00
Jambi	45,32	52,78	1,54	0,36	100,00
Sumatera Selatan	49,16	49,33	1,13	0,38	100,00
Bengkulu	45,81	52,67	1,11	0,41	100,00
Lampung	45,99	52,94	0,87	0,21	100,00
Bangka Belitung	46,11	52,31	1,35	0,23	100,00
Kepulauan Riau	53,50	45,69	0,59	0,23	100,00
DKI. Jakarta	56,45	42,14	1,13	0,29	100,00
Jawa Barat	46,09	51,62	1,94	0,36	100,00
Jawa Tengah	47,60	51,04	1,05	0,30	100,00
DI. Yogyakarta	57,03	42,18	0,59	0,20	100,00
Jawa Timur	43,22	55,00	1,37	0,40	100,00
Banten	49,24	48,65	1,84	0,27	100,00
Bali	44,16	54,98	0,65	0,22	100,00
Nusa Tenggara Barat	46,37	50,31	2,92	0,40	100,00
Nusa Tenggara Timur	51,88	46,12	1,42	0,58	100,00
Kalimantan Barat	47,34	51,40	0,95	0,32	100,00
Kalimantan Tengah	43,56	54,88	1,18	0,37	100,00
Kalimantan Selatan	42,71	54,90	1,87	0,53	100,00
Kalimantan Timur	46,10	52,51	1,07	0,32	100,00
Sulawesi Utara	47,12	51,43	1,14	0,31	100,00
Sulawesi Tengah	43,41	54,81	1,36	0,42	100,00
Sulawesi Selatan	52,52	45,43	1,61	0,44	100,00
Sulawesi Tenggara	47,46	50,86	1,25	0,43	100,00
Gorontalo	41,38	56,63	1,59	0,41	100,00
Sulawesi Barat	46,98	51,37	1,31	0,34	100,00
Maluku	52,67	46,15	0,74	0,44	100,00
Maluku Utara	44,35	53,84	1,34	0,46	100,00
Irian Jaya Barat	44,25	54,33	0,89	0,52	100,00
Papua	42,34	55,96	0,82	0,87	100,00
INDONESIA	48,03	50,26	1,35	0,36	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 4.1.1 Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Pendidikan, Tahun 2007

Perkotaan				
Jenis Kelamin/ Kelompok Umur	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki				
15	0,47	85,61	13,92	100,00
16-18	0,55	67,07	32,38	100,00
19-24	0,55	18,63	80,83	100,00
25-35	0,68	1,98	97,34	100,00
Jumlah	0,61	20,97	78,41	100,00
Perempuan				
15	0,85	83,12	16,02	100,00
16-18	0,61	65,09	34,30	100,00
19-24	0,53	17,79	81,68	100,00
25-35	0,99	1,16	97,85	100,00
Jumlah	0,79	19,38	79,83	100,00
Laki-laki + Perempuan				
15	0,66	84,38	14,96	100,00
16-18	0,58	66,08	33,34	100,00
19-24	0,54	18,20	81,27	100,00
25-35	0,84	1,56	97,60	100,00
Jumlah	0,70	20,16	79,14	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 4.1.2 Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Pendidikan, Tahun 2007

				Perdesaan
Jenis Kelamin/ Kelompok Umur	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki				
15	1,43	70,64	27,93	100,00
16-18	1,19	45,30	53,51	100,00
19-24	1,61	6,60	91,79	100,00
25-35	2,24	0,68	97,07	100,00
Jumlah	1,84	14,46	83,69	100,00
Perempuan				
15	1,24	72,79	25,97	100,00
16-18	1,54	45,37	53,09	100,00
19-24	2,29	6,09	91,62	100,00
25-35	3,94	0,50	95,57	100,00
Jumlah	2,99	12,95	84,06	100,00
Laki-laki + Perempuan				
15	1,34	71,66	27,00	100,00
16-18	1,36	45,33	53,31	100,00
19-24	1,95	6,34	91,70	100,00
25-35	3,11	0,59	96,30	100,00
Jumlah	2,42	13,71	83,88	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 4.1.3 Persentase Pemuda menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur dan Status Pendidikan, Tahun 2007

Perkotaan+Perdesaan				
Jenis Kelamin/ Kelompok Umur	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki				
15	1,04	76,70	22,26	100,00
16-18	0,92	54,71	44,37	100,00
19-24	1,09	12,47	86,44	100,00
25-35	1,52	1,29	97,20	100,00
Jumlah	1,27	17,48	81,25	100,00
Perempuan				
15	1,08	77,16	21,76	100,00
16-18	1,11	54,51	44,38	100,00
19-24	1,41	11,95	86,64	100,00
25-35	2,57	0,80	96,63	100,00
Jumlah	1,95	15,98	82,06	100,00
Laki-laki + Perempuan				
15	1,06	76,93	22,02	100,00
16-18	1,01	54,61	44,38	100,00
19-24	1,25	12,20	86,54	100,00
25-35	2,06	1,04	96,90	100,00
Jumlah	1,62	16,72	81,66	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 4.2.1 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Pendidikan Tahun 2007

Provinsi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah				Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
		SD	SLTP	SM	PT		
		(3)	(4)	(5)	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nanggroe Aceh Darussalam	0,67	0,71	14,72	43,76	40,81	67,77	100,00
Sumatera Utara	0,29	1,36	18,43	56,12	24,09	75,76	100,00
Sumatera Barat	0,48	1,60	13,39	43,68	41,33	70,61	100,00
Riau	0,37	2,60	19,24	55,66	22,50	78,25	100,00
Jambi	0,89	2,89	17,10	52,79	27,21	78,45	100,00
Sumatera Selatan	0,50	2,67	13,55	54,35	29,43	76,66	100,00
Bengkulu	0,57	1,16	13,15	48,95	36,73	72,42	100,00
Lampung	0,46	1,74	18,12	53,61	26,53	77,65	100,00
Bangka Belitung	0,40	1,74	17,37	64,26	16,62	83,41	100,00
Kepulauan Riau	0,69	2,01	22,42	58,78	16,79	87,87	100,00
DKI. Jakarta	0,44	3,41	14,38	47,86	34,36	82,93	100,00
Jawa Barat	0,62	2,65	20,76	52,14	24,46	81,76	100,00
Jawa Tengah	0,63	1,84	21,69	56,48	19,99	79,13	100,00
DI. Yogyakarta	0,28	0,78	8,22	25,85	65,15	66,00	100,00
Jawa Timur	0,75	2,17	19,10	55,41	23,33	79,80	100,00
Banten	0,87	4,23	18,67	53,90	23,20	81,03	100,00
Bali	1,45	3,92	14,73	50,91	30,44	81,06	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,97	2,71	20,88	49,42	26,99	72,68	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,19	1,85	15,20	56,12	26,83	68,75	100,00
Kalimantan Barat	1,55	2,73	19,35	53,81	24,10	77,75	100,00
Kalimantan Tengah	0,68	3,45	14,47	51,12	30,96	78,11	100,00
Kalimantan Selatan	0,87	4,37	22,57	48,48	24,58	80,62	100,00
Kalimantan Timur	0,54	0,91	17,61	55,48	26,00	81,50	100,00
Sulawesi Utara	0,55	3,77	11,27	56,20	28,76	79,15	100,00
Sulawesi Tengah	0,28	1,91	8,25	48,19	41,64	72,72	100,00
Sulawesi Selatan	1,71	2,53	9,39	42,88	45,19	73,79	100,00
Sulawesi Tenggara	1,00	0,82	13,76	47,49	37,93	70,40	100,00
Gorontalo	1,00	3,34	13,90	55,70	27,06	79,22	100,00
Sulawesi Barat	1,69	1,04	18,14	57,64	23,18	76,34	100,00
Maluku	0,14	0,81	13,47	53,24	32,48	67,28	100,00
Maluku Utara	0,66	1,47	10,51	50,27	37,75	69,68	100,00
Irian Jaya Barat	0,73	3,07	20,18	58,62	18,13	77,46	100,00
Papua	1,25	2,07	18,29	49,99	29,65	75,35	100,00
INDONESIA	0,70	2,36	17,80	51,80	28,03	79,14	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 4.2.2 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Pendidikan Tahun 2007

Provinsi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah				Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
		SD	SLTP	SM	PT		
		(3)	(4)	(5)	(6)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nanggroe Aceh Darussalam	1,77	2,38	23,73	54,42	19,47	74,83	100,00
Sumatera Utara	1,61	3,40	32,11	57,55	6,94	78,27	100,00
Sumatera Barat	1,04	3,43	29,33	56,12	11,13	81,14	100,00
Riau	1,15	5,79	28,65	54,63	10,94	82,91	100,00
Jambi	1,75	2,92	28,24	54,19	14,65	84,36	100,00
Sumatera Selatan	1,31	7,68	32,34	53,65	6,33	85,70	100,00
Bengkulu	1,18	5,99	29,33	55,86	8,82	82,94	100,00
Lampung	0,82	2,66	34,68	55,44	7,23	86,92	100,00
Bangka Belitung	1,95	7,86	29,24	54,38	8,52	87,46	100,00
Kepulauan Riau	2,71	5,51	33,43	52,60	8,46	84,46	100,00
DKI. Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	1,40	2,83	40,06	50,13	6,98	88,46	100,00
Jawa Tengah	1,27	3,04	34,38	54,31	8,27	85,85	100,00
DI. Yogyakarta	1,20	1,51	23,80	59,85	14,83	78,92	100,00
Jawa Timur	3,06	4,58	31,89	54,43	9,11	84,46	100,00
Banten	1,89	11,44	34,26	46,93	7,36	85,26	100,00
Bali	3,46	3,01	26,96	57,46	12,57	83,09	100,00
Nusa Tenggara Barat	5,00	2,87	29,46	53,70	13,97	77,61	100,00
Nusa Tenggara Timur	4,32	8,88	40,52	43,58	7,02	83,55	100,00
Kalimantan Barat	3,91	11,20	33,42	47,77	7,62	83,37	100,00
Kalimantan Tengah	1,00	10,34	35,34	47,14	7,17	85,62	100,00
Kalimantan Selatan	1,43	7,48	34,16	47,12	11,24	86,25	100,00
Kalimantan Timur	1,64	2,75	29,07	57,35	10,84	85,19	100,00
Sulawesi Utara	0,57	1,79	22,29	65,53	10,38	86,04	100,00
Sulawesi Tengah	1,77	6,79	28,03	53,03	12,15	85,97	100,00
Sulawesi Selatan	4,64	8,21	31,29	49,20	11,30	81,27	100,00
Sulawesi Tenggara	2,75	5,20	30,46	52,03	12,31	79,48	100,00
Gorontalo	1,45	10,93	25,40	49,27	14,40	85,93	100,00
Sulawesi Barat	4,73	7,79	34,03	44,83	13,35	82,97	100,00
Maluku	2,38	3,19	30,52	57,54	8,75	78,05	100,00
Maluku Utara	1,42	4,83	35,80	54,65	4,72	82,65	100,00
Irian Jaya Barat	8,90	17,23	29,89	44,03	8,85	76,33	100,00
Papua	29,51	9,91	38,25	42,17	9,67	55,18	100,00
INDONESIA	2,42	4,86	32,53	53,09	9,52	83,88	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 4.2.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Status Pendidikan Tahun 2007

Provinsi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Masih Sekolah				Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
		SD	SLTP	SM	PT		
		(1)	(2)	(3)	(4)		
Perkotaan+Perdesaan							
Nanggroe Aceh Darussalam	1,49	1,87	20,96	51,13	26,05	73,08	100,00
Sumatera Utara	0,99	2,35	25,10	56,82	15,73	77,09	100,00
Sumatera Barat	0,84	2,59	22,01	50,41	24,99	77,52	100,00
Riau	0,87	4,40	24,56	55,08	15,96	81,21	100,00
Jambi	1,49	2,91	23,90	53,65	19,54	82,59	100,00
Sumatera Selatan	1,01	5,17	22,95	54,00	17,87	82,42	100,00
Bengkulu	1,00	4,00	22,65	53,01	20,34	79,87	100,00
Lampung	0,73	2,34	28,82	54,79	14,05	84,75	100,00
Bangka Belitung	1,34	4,80	23,31	59,32	12,57	85,86	100,00
Kepulauan Riau	1,02	2,65	24,42	57,65	15,27	87,31	100,00
DKI. Jakarta	0,44	3,41	14,38	47,86	34,36	82,93	100,00
Jawa Barat	0,96	2,70	26,72	51,52	19,06	84,69	100,00
Jawa Tengah	0,98	2,37	27,27	55,53	14,84	82,84	100,00
DI. Yogyakarta	0,57	0,94	11,57	33,17	54,32	70,10	100,00
Jawa Timur	2,02	3,23	24,72	54,98	17,07	82,36	100,00
Banten	1,30	6,66	23,92	51,55	17,86	82,79	100,00
Bali	2,33	3,58	19,29	53,35	23,78	81,94	100,00
Nusa Tenggara Barat	4,20	2,79	25,37	51,66	20,18	75,67	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,65	6,05	30,35	48,62	14,98	80,39	100,00
Kalimantan Barat	3,25	7,90	27,94	50,12	14,04	81,79	100,00
Kalimantan Tengah	0,90	7,48	26,67	48,79	17,06	83,30	100,00
Kalimantan Selatan	1,21	5,93	28,39	47,80	17,88	84,01	100,00
Kalimantan Timur	1,02	1,58	21,80	56,16	20,45	83,13	100,00
Sulawesi Utara	0,56	2,75	16,94	61,01	19,30	83,40	100,00
Sulawesi Tengah	1,44	4,88	20,30	51,14	23,67	82,99	100,00
Sulawesi Selatan	3,60	5,44	20,58	46,11	27,87	78,61	100,00
Sulawesi Tenggara	2,31	3,66	24,59	50,44	21,31	77,19	100,00
Gorontalo	1,33	8,18	21,24	51,60	18,99	84,14	100,00
Sulawesi Barat	4,24	6,05	29,94	48,13	15,88	81,89	100,00
Maluku	1,61	2,08	22,59	55,54	19,78	74,36	100,00
Maluku Utara	1,20	3,41	25,13	52,80	18,66	79,00	100,00
Irian Jaya Barat	6,16	11,19	25,75	50,25	12,81	76,71	100,00
Papua	21,09	6,83	30,40	45,25	17,53	61,19	100,00
INDONESIA	1,62	3,45	24,23	52,36	19,96	81,66	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 4.3 Persentase Pemuda yang Melek Huruf menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Darussalam	99,73	99,84	99,57	99,31	98,86	98,16	99,41	99,10	98,51
Sumatera Utara	99,85	99,84	99,68	99,32	98,79	98,11	99,57	99,28	98,85
Sumatera Barat	99,54	99,71	99,25	99,40	99,12	98,52	99,45	99,32	98,77
Riau	99,91	99,78	99,69	99,53	99,17	98,71	99,67	99,40	99,07
Jambi	99,82	99,65	99,47	99,37	98,86	98,23	99,51	99,10	98,60
Sumatera Selatan	99,66	99,65	99,31	99,48	99,26	98,74	99,55	99,40	98,95
Bengkulu	99,88	99,90	99,78	99,18	98,94	98,12	99,39	99,22	98,61
Lampung	99,73	99,55	99,27	99,43	99,32	98,75	99,50	99,37	98,87
Bangka Belitung	99,67	99,77	99,44	98,69	98,82	97,51	99,07	99,20	98,27
Kepulauan Riau	99,68	99,64	99,32	98,37	98,05	96,41	99,46	99,38	98,84
DKI. Jakarta	99,96	99,84	99,80	-	-	-	99,96	99,84	99,80
Jawa Barat	99,87	99,72	99,60	99,47	99,21	98,68	99,70	99,50	99,20
Jawa Tengah	99,85	99,65	99,50	99,34	99,00	98,34	99,57	99,29	98,86
DI. Yogyakarta	99,79	99,85	99,64	99,52	99,31	98,83	99,71	99,68	99,39
Jawa Timur	99,76	99,59	99,35	98,82	98,04	96,86	99,24	98,74	97,98
Banten	99,70	99,57	99,27	99,70	98,73	98,43	99,70	99,22	98,92
Bali	99,62	99,16	98,78	98,56	97,33	95,89	99,16	98,36	97,52
Nusa Tenggara Barat	98,65	97,65	96,29	98,13	95,14	93,27	98,33	96,13	94,46
Nusa Tenggara Timur	99,26	99,54	98,80	96,70	96,88	93,57	97,24	97,45	94,69
Kalimantan Barat	99,38	98,90	98,27	98,59	97,56	96,15	98,81	97,93	96,75
Kalimantan Tengah	99,60	99,62	99,22	99,54	99,40	98,94	99,56	99,47	99,03
Kalimantan Selatan	99,87	99,45	99,32	99,20	98,84	98,04	99,47	99,08	98,55
Kalimantan Timur	99,82	99,66	99,48	99,36	98,82	98,18	99,62	99,29	98,91
Sulawesi Utara	99,83	99,64	99,47	99,53	99,68	99,22	99,65	99,67	99,32
Sulawesi Tengah	99,86	99,86	99,72	98,82	98,65	97,46	99,05	98,92	97,97
Sulawesi Selatan	99,19	98,99	98,18	96,59	97,10	93,68	97,51	97,77	95,28
Sulawesi Tenggara	99,43	99,39	98,81	98,40	98,00	96,39	98,66	98,35	97,00
Gorontalo	99,40	99,45	98,86	98,20	98,32	96,52	98,52	98,62	97,14
Sulawesi Barat	98,64	98,83	97,47	97,40	96,38	93,78	97,60	96,78	94,38
Maluku	99,87		99,87	99,17	98,89	98,06	99,41	99,27	98,68
Maluku Utara	99,89	99,82	99,72	99,10	98,45	97,55	99,32	98,84	98,16
Irian Jaya Barat	99,61	99,66	99,26	95,79	94,02	89,81	97,07	95,90	92,97
Papua	99,81	99,40	99,20	90,53	81,06	71,59	93,29	86,52	79,81
INDONESIA	99,77	99,62	99,39	98,90	98,34	97,25	99,31	98,94	98,25

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 4.4.1 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2007

Provinsi	Tdk/Blm Per- nah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD	SLTP	SM	Perguruan Tinggi	Perkotaan
							Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Darussalam	0,67	1,12	11,91	27,06	45,93	13,32	100,00
Sumatera Utara	0,29	2,29	15,26	30,75	42,41	8,99	100,00
Sumatera Barat	0,48	5,80	12,56	24,86	41,93	14,38	100,00
Riau	0,37	2,76	14,34	27,92	42,83	11,79	100,00
Jambi	0,89	4,62	18,49	26,86	38,59	10,54	100,00
Sumatera Selatan	0,50	3,90	17,47	26,46	41,36	10,30	100,00
Bengkulu	0,57	2,77	10,65	27,88	44,15	13,99	100,00
Lampung	0,46	3,80	18,25	28,11	38,58	10,80	100,00
Bangka Belitung	0,40	6,25	19,58	25,11	37,71	10,94	100,00
Kepulauan Riau	0,69	3,98	12,81	20,33	56,20	6,00	100,00
DKI. Jakarta	0,44	2,15	15,66	25,81	42,40	13,54	100,00
Jawa Barat	0,62	3,11	24,66	29,13	33,84	8,65	100,00
Jawa Tengah	0,63	2,64	24,14	32,62	31,85	8,13	100,00
DI. Yogyakarta	0,28	1,09	9,31	21,20	53,82	14,29	100,00
Jawa Timur	0,75	2,46	19,92	30,22	37,03	9,61	100,00
Banten	0,87	4,06	20,31	30,42	36,42	7,92	100,00
Bali	1,45	3,25	17,25	24,64	41,71	11,70	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,97	6,21	26,44	28,14	29,97	6,27	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,19	7,16	15,95	27,59	36,36	11,75	100,00
Kalimantan Barat	1,55	7,73	18,91	27,74	35,49	8,57	100,00
Kalimantan Tengah	0,68	4,82	19,14	30,11	36,02	9,23	100,00
Kalimantan Selatan	0,87	6,77	21,99	29,20	33,50	7,66	100,00
Kalimantan Timur	0,54	4,02	13,90	25,48	44,26	11,78	100,00
Sulawesi Utara	0,55	4,49	14,32	28,71	43,56	8,37	100,00
Sulawesi Tengah	0,28	2,35	13,79	26,73	42,77	14,08	100,00
Sulawesi Selatan	1,71	4,01	16,21	24,70	41,86	11,51	100,00
Sulawesi Tenggara	1,00	2,84	12,52	26,86	42,78	14,01	100,00
Gorontalo	1,00	11,66	21,07	22,20	34,33	9,74	100,00
Sulawesi Barat	1,69	6,74	25,70	26,53	28,85	10,49	100,00
Maluku	0,14	1,01	10,80	28,11	48,37	11,56	100,00
Maluku Utara	0,66	4,41	11,66	26,93	44,33	12,00	100,00
Irian Jaya Barat	0,73	6,43	14,24	29,36	40,36	8,88	100,00
Papua	1,25	3,33	13,67	24,09	44,10	13,55	100,00
INDONESIA	0,70	3,18	19,63	28,63	37,97	9,89	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 4.4.2 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2007

Provinsi	Tdk/Blm Per- nah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD	SLTP	SM	Perguruan Tinggi	Perdesaan
							Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Darussalam	1,77	4,99	30,07	33,63	24,92	4,62	100,00
Sumatera Utara	1,61	6,37	28,78	33,75	26,87	2,62	100,00
Sumatera Barat	1,04	12,45	29,10	29,18	23,81	4,43	100,00
Riau	1,15	7,10	36,53	30,59	21,98	2,64	100,00
Jambi	1,75	9,75	36,83	28,82	19,31	3,53	100,00
Sumatera Selatan	1,31	9,54	42,66	27,73	17,05	1,72	100,00
Bengkulu	1,18	11,09	32,39	31,10	21,97	2,28	100,00
Lampung	0,82	6,61	36,36	35,65	18,25	2,32	100,00
Bangka Belitung	1,95	20,50	40,80	19,50	15,08	2,16	100,00
Kepulauan Riau	2,71	18,85	43,11	22,65	10,38	2,30	100,00
DKI. Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	1,40	7,28	51,98	26,27	11,62	1,46	100,00
Jawa Tengah	1,27	5,08	43,81	32,42	15,08	2,34	100,00
DI. Yogyakarta	1,20	2,36	23,77	38,73	28,85	5,09	100,00
Jawa Timur	3,06	6,97	39,83	30,67	16,88	2,59	100,00
Banten	1,89	11,04	51,28	23,45	11,07	1,28	100,00
Bali	3,46	5,12	32,65	27,70	27,12	3,95	100,00
Nusa Tenggara Barat	5,00	10,06	33,46	27,73	20,28	3,47	100,00
Nusa Tenggara Timur	4,32	20,99	43,73	16,97	11,68	2,31	100,00
Kalimantan Barat	3,91	16,96	35,18	25,44	16,59	1,92	100,00
Kalimantan Tengah	1,00	8,28	42,31	31,17	14,66	2,58	100,00
Kalimantan Selatan	1,43	11,96	40,98	28,07	14,92	2,64	100,00
Kalimantan Timur	1,64	10,09	29,85	28,79	25,65	3,98	100,00
Sulawesi Utara	0,57	5,91	27,65	30,74	31,20	3,93	100,00
Sulawesi Tengah	1,77	8,11	40,97	28,12	17,54	3,49	100,00
Sulawesi Selatan	4,64	11,98	36,49	24,83	18,76	3,30	100,00
Sulawesi Tenggara	2,75	8,83	33,36	30,33	20,86	3,86	100,00
Gorontalo	1,45	27,99	37,70	16,34	13,55	2,98	100,00
Sulawesi Barat	4,73	16,08	41,44	21,70	13,28	2,77	100,00
Maluku	2,38	5,87	33,05	30,96	25,35	2,38	100,00
Maluku Utara	1,42	13,39	35,35	26,21	19,46	4,17	100,00
Irian Jaya Barat	8,90	15,96	32,61	23,65	16,20	2,69	100,00
Papua	29,51	11,29	24,85	18,41	14,09	1,86	100,00
INDONESIA	2,42	8,58	40,07	28,99	17,40	2,54	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 4.4.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan						Jumlah
	Tdk/Blm Per- nah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD	SLTP	SM	Diploma IV/ S1/S2/S3	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Darussalam	1,49	4,03	25,56	32,00	30,13	6,78	100,00
Sumatera Utara	0,99	4,46	22,45	32,35	34,15	5,61	100,00
Sumatera Barat	0,84	10,16	23,42	27,70	30,03	7,84	100,00
Riau	0,87	5,52	28,45	29,62	29,57	5,97	100,00
Jambi	1,49	8,21	31,33	28,23	25,09	5,63	100,00
Sumatera Selatan	1,01	7,50	33,53	27,27	25,86	4,83	100,00
Bengkulu	1,00	8,65	26,04	30,16	28,45	5,70	100,00
Lampung	0,73	5,95	32,11	33,88	23,02	4,31	100,00
Bangka Belitung	1,34	14,87	32,41	21,72	24,03	5,63	100,00
Kepulauan Riau	1,02	6,44	17,83	20,72	48,61	5,38	100,00
DKI. Jakarta	0,44	2,15	15,66	25,81	42,40	13,54	100,00
Jawa Barat	0,96	4,94	36,60	27,88	24,13	5,50	100,00
Jawa Tengah	0,98	3,99	35,00	32,51	22,59	4,93	100,00
DI. Yogyakarta	0,57	1,49	13,90	26,77	45,90	11,37	100,00
Jawa Timur	2,02	4,94	30,88	30,47	25,95	5,75	100,00
Banten	1,30	6,97	33,23	27,51	25,85	5,15	100,00
Bali	2,33	4,07	23,96	25,98	35,35	8,32	100,00
Nusa Tenggara Barat	4,20	8,54	30,69	27,89	24,10	4,58	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,65	18,04	37,80	19,24	16,95	4,32	100,00
Kalimantan Barat	3,25	14,36	30,60	26,09	21,91	3,79	100,00
Kalimantan Tengah	0,90	7,21	35,14	30,84	21,27	4,64	100,00
Kalimantan Selatan	1,21	9,89	33,43	28,52	22,30	4,64	100,00
Kalimantan Timur	1,02	6,70	20,93	26,94	36,07	8,35	100,00
Sulawesi Utara	0,56	5,36	22,54	29,96	35,94	5,63	100,00
Sulawesi Tengah	1,44	6,81	34,84	27,81	23,23	5,88	100,00
Sulawesi Selatan	3,60	9,15	29,29	24,78	26,96	6,22	100,00
Sulawesi Tenggara	2,31	7,32	28,11	29,46	26,39	6,41	100,00
Gorontalo	1,33	23,65	33,27	17,90	19,08	4,78	100,00
Sulawesi Barat	4,24	14,56	38,88	22,49	15,81	4,03	100,00
Maluku	1,61	4,20	25,42	29,99	33,25	5,53	100,00
Maluku Utara	1,20	10,86	28,68	26,42	26,46	6,38	100,00
Irian Jaya Barat	6,16	12,77	26,46	25,56	24,29	4,76	100,00
Papua	21,09	8,92	21,52	20,10	23,03	5,34	100,00
INDONESIA	1,62	6,06	30,51	28,82	27,02	5,98	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 5.1.1 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan					Jumlah
	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja			
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NAD	41,97	10,64	28,48	18,24	0,67	100,00
Sumatera Utara	46,33	10,57	22,53	17,35	3,23	100,00
Sumatera Barat	43,40	11,32	28,76	14,00	2,52	100,00
Riau	42,60	14,09	21,87	20,15	1,30	100,00
Jambi	47,41	6,57	24,33	18,34	3,34	100,00
Sumatera Selatan	37,97	15,62	22,77	20,10	3,54	100,00
Bengkulu	49,22	7,41	26,37	14,95	2,05	100,00
Lampung	47,56	14,95	18,82	16,16	2,51	100,00
Bangka Belitung	54,52	9,79	15,33	18,18	2,18	100,00
Kepulauan Riau	58,51	8,07	13,15	18,32	1,94	100,00
DKI. Jakarta	53,64	12,17	16,43	16,06	1,71	100,00
Jawa Barat	42,95	14,98	17,39	21,39	3,28	100,00
Jawa Tengah	51,65	10,42	20,05	14,46	3,43	100,00
DI. Yogyakarta	49,29	9,23	27,38	12,24	1,86	100,00
Jawa Timur	50,25	10,48	20,38	16,17	2,72	100,00
Banten	44,78	14,73	18,19	18,79	3,51	100,00
Bali	64,85	5,64	16,69	11,48	1,34	100,00
Nusa Tenggara Barat	49,04	8,18	21,97	16,44	4,37	100,00
Nusa Tenggara Timur	41,57	7,52	28,38	19,64	2,90	100,00
Kalimantan Barat	48,17	11,19	20,42	17,31	2,92	100,00
Kalimantan Tengah	48,86	7,74	20,40	21,52	1,48	100,00
Kalimantan Selatan	53,73	10,54	17,75	17,65	0,34	100,00
Kalimantan Timur	45,08	11,42	19,89	21,38	2,24	100,00
Sulawesi Utara	45,48	16,64	19,47	14,29	4,12	100,00
Sulawesi Tengah	46,11	8,92	25,86	17,92	1,18	100,00
Sulawesi Selatan	39,91	15,31	23,61	17,66	3,50	100,00
Sulawesi Tenggara	41,29	9,71	29,38	17,61	2,01	100,00
Gorontalo	47,96	9,04	18,81	22,06	2,13	100,00
Sulawesi Barat	44,85	12,55	20,30	19,05	3,25	100,00
Maluku	36,48	13,02	29,90	17,71	2,88	100,00
Maluku Utara	44,32	9,07	26,47	18,30	1,84	100,00
Irian Jaya Barat	42,71	12,47	17,74	21,79	5,29	100,00
Papua	42,99	10,85	23,45	21,01	1,70	100,00
INDONESIA	47,64	12,05	19,91	17,58	2,82	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.1.2 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2007

Provinsi	Perdesaan					Jumlah
	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja			
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NAD	48,09	7,60	20,68	19,69	3,94	100,00
Sumatera Utara	56,80	9,61	15,22	15,09	3,27	100,00
Sumatera Barat	52,31	10,85	16,37	17,70	2,77	100,00
Riau	51,99	6,07	14,03	25,71	2,20	100,00
Jambi	57,57	6,48	12,66	20,55	2,74	100,00
Sumatera Selatan	63,47	6,18	12,03	15,82	2,50	100,00
Bengkulu	61,03	4,07	13,33	18,69	2,89	100,00
Lampung	58,95	6,27	11,20	20,99	2,59	100,00
Bangka Belitung	62,12	4,38	11,05	20,87	1,58	100,00
Kepulauan Riau	44,77	5,75	10,29	37,18	2,02	100,00
DKI. Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	48,83	10,91	10,19	25,11	4,96	100,00
Jawa Tengah	56,25	10,46	12,44	17,30	3,54	100,00
DI. Yogyakarta	63,15	5,61	16,41	13,51	1,31	100,00
Jawa Timur	58,05	7,33	11,67	19,90	3,05	100,00
Banten	44,96	13,06	10,65	25,41	5,92	100,00
Bali	75,12	3,35	10,71	8,47	2,34	100,00
Nusa Tenggara Barat	60,91	5,80	11,44	18,21	3,64	100,00
Nusa Tenggara Timur	72,07	3,56	10,24	11,97	2,16	100,00
Kalimantan Barat	68,98	5,06	10,73	13,27	1,97	100,00
Kalimantan Tengah	65,74	4,01	10,98	17,58	1,68	100,00
Kalimantan Selatan	67,07	8,12	9,80	14,72	0,29	100,00
Kalimantan Timur	52,04	8,33	12,67	24,62	2,34	100,00
Sulawesi Utara	47,82	10,93	13,47	24,58	3,20	100,00
Sulawesi Tengah	56,73	9,99	9,45	22,32	1,52	100,00
Sulawesi Selatan	54,11	7,16	11,75	23,77	3,21	100,00
Sulawesi Tenggara	58,48	5,50	13,41	20,59	2,01	100,00
Gorontalo	53,01	6,41	13,04	24,90	2,64	100,00
Sulawesi Barat	57,66	3,24	12,94	22,02	4,13	100,00
Maluku	48,36	10,80	18,92	18,96	2,97	100,00
Maluku Utara	61,63	4,66	13,88	17,37	2,45	100,00
Irian Jaya Barat	60,26	6,73	11,36	19,79	1,86	100,00
Papua	72,89	3,58	11,57	9,29	2,66	100,00
INDONESIA	56,63	8,22	12,17	19,72	3,26	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.1.3 Persentase Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan					Jumlah
	Angkatan Kerja		Bukan Angkatan Kerja			
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NAD	46,27	8,50	23,00	19,26	2,97	100,00
Sumatera Utara	51,85	10,06	18,68	16,16	3,25	100,00
Sumatera Barat	49,24	11,01	20,65	16,42	2,69	100,00
Riau	48,99	8,63	16,54	23,93	1,91	100,00
Jambi	54,58	6,51	16,09	19,90	2,92	100,00
Sumatera Selatan	54,69	9,43	15,73	17,29	2,86	100,00
Bengkulu	57,42	5,09	17,32	17,55	2,63	100,00
Lampung	56,28	8,31	12,99	19,85	2,58	100,00
Bangka Belitung	59,02	6,59	12,80	19,77	1,82	100,00
Kepulauan Riau	55,39	7,55	12,50	22,61	1,96	100,00
DKI. Jakarta	53,64	12,17	16,43	16,06	1,71	100,00
Jawa Barat	45,64	13,12	14,10	23,09	4,05	100,00
Jawa Tengah	54,26	10,44	15,73	16,07	3,49	100,00
DI. Yogyakarta	54,07	7,98	23,60	12,68	1,67	100,00
Jawa Timur	54,55	8,74	15,58	18,23	2,90	100,00
Banten	44,85	14,03	15,04	21,55	4,52	100,00
Bali	69,69	4,56	13,87	10,06	1,81	100,00
Nusa Tenggara Barat	56,20	6,74	15,62	17,51	3,93	100,00
Nusa Tenggara Timur	65,56	4,40	14,11	13,61	2,32	100,00
Kalimantan Barat	63,14	6,78	13,45	14,40	2,23	100,00
Kalimantan Tengah	60,44	5,18	13,94	18,82	1,62	100,00
Kalimantan Selatan	62,02	9,03	12,81	15,83	0,31	100,00
Kalimantan Timur	48,14	10,06	16,71	22,81	2,28	100,00
Sulawesi Utara	46,90	13,17	15,83	20,54	3,56	100,00
Sulawesi Tengah	54,26	9,74	13,26	21,30	1,44	100,00
Sulawesi Selatan	48,75	10,24	16,23	21,46	3,32	100,00
Sulawesi Tenggara	54,52	6,47	17,09	19,91	2,01	100,00
Gorontalo	51,62	7,13	14,63	24,12	2,50	100,00
Sulawesi Barat	55,14	5,07	14,39	21,44	3,96	100,00
Maluku	44,78	11,47	22,23	18,58	2,94	100,00
Maluku Utara	56,45	5,98	17,65	17,65	2,27	100,00
Irian Jaya Barat	54,55	8,59	13,44	20,44	2,97	100,00
Papua	65,67	5,34	14,44	12,12	2,43	100,00
INDONESIA	52,52	9,97	15,71	18,74	3,06	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.2.1 Persentase Angkatan Kerja Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan		
	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)
Naggroe Aceh Darussalam	79,78	20,22	100,00
Sumatera Utara	81,43	18,57	100,00
Sumatera Barat	79,31	20,69	100,00
Riau	75,14	24,86	100,00
Jambi	87,84	12,16	100,00
Sumatera Selatan	70,86	29,14	100,00
Bengkulu	86,91	13,09	100,00
Lampung	76,08	23,92	100,00
Bangka Belitung	84,78	15,22	100,00
Kepulauan Riau	87,88	12,12	100,00
DKI. Jakarta	81,51	18,49	100,00
Jawa Barat	74,14	25,86	100,00
Jawa Tengah	83,22	16,78	100,00
DI. Yogyakarta	84,23	15,77	100,00
Jawa Timur	82,74	17,26	100,00
Banten	75,24	24,76	100,00
Bali	91,99	8,01	100,00
Nusa Tenggara Barat	85,71	14,29	100,00
Nusa Tenggara Timur	84,69	15,31	100,00
Kalimantan Barat	81,14	18,86	100,00
Kalimantan Tengah	86,33	13,67	100,00
Kalimantan Selatan	83,60	16,40	100,00
Kalimantan Timur	79,79	20,21	100,00
Sulawesi Utara	73,21	26,79	100,00
Sulawesi Tengah	83,79	16,21	100,00
Sulawesi Selatan	72,28	27,72	100,00
Sulawesi Tenggara	80,96	19,04	100,00
Gorontalo	84,14	15,86	100,00
Sulawesi Barat	78,13	21,87	100,00
Maluku	73,69	26,31	100,00
Maluku Utara	83,01	16,99	100,00
Irian Jaya Barat	77,40	22,60	100,00
Papua	79,85	20,15	100,00
INDONESIA	79,81	20,19	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.2.2 Persentase Angkatan Kerja Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2007

Provinsi	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Perdesaan
			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Naggroe Aceh Darussalam	86,36	13,64	100,00
Sumatera Utara	85,53	14,47	100,00
Sumatera Barat	82,82	17,18	100,00
Riau	89,55	10,45	100,00
Jambi	89,88	10,12	100,00
Sumatera Selatan	91,13	8,87	100,00
Bengkulu	93,75	6,25	100,00
Lampung	90,39	9,61	100,00
Bangka Belitung	93,41	6,59	100,00
Kepulauan Riau	88,62	11,38	100,00
DKI. Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	81,74	18,26	100,00
Jawa Tengah	84,32	15,68	100,00
DI. Yogyakarta	91,84	8,16	100,00
Jawa Timur	88,79	11,21	100,00
Banten	77,49	22,51	100,00
Bali	95,73	4,27	100,00
Nusa Tenggara Barat	91,31	8,69	100,00
Nusa Tenggara Timur	95,30	4,70	100,00
Kalimantan Barat	93,17	6,83	100,00
Kalimantan Tengah	94,25	5,75	100,00
Kalimantan Selatan	89,20	10,80	100,00
Kalimantan Timur	86,21	13,79	100,00
Sulawesi Utara	81,40	18,60	100,00
Sulawesi Tengah	85,03	14,97	100,00
Sulawesi Selatan	88,32	11,68	100,00
Sulawesi Tenggara	91,40	8,60	100,00
Gorontalo	89,21	10,79	100,00
Sulawesi Barat	94,69	5,31	100,00
Maluku	81,74	18,26	100,00
Maluku Utara	92,97	7,03	100,00
Irian Jaya Barat	89,96	10,04	100,00
Papua	95,31	4,69	100,00
INDONESIA	87,33	12,67	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.2.3 Persentase Angkatan Kerja Pemuda menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2007

Perkotaan+Perdesaan			
Provinsi	Bekerja	Mencari Pekerjaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Naggroe Aceh Darussalam	84,48	15,52	100,00
Sumatera Utara	83,75	16,25	100,00
Sumatera Barat	81,72	18,28	100,00
Riau	85,02	14,98	100,00
Jambi	89,35	10,65	100,00
Sumatera Selatan	85,30	14,70	100,00
Bengkulu	91,86	8,14	100,00
Lampung	87,14	12,86	100,00
Bangka Belitung	89,96	10,04	100,00
Kepulauan Riau	88,01	11,99	100,00
DKI. Jakarta	81,51	18,49	100,00
Jawa Barat	77,67	22,33	100,00
Jawa Tengah	83,86	16,14	100,00
DI. Yogyakarta	87,13	12,87	100,00
Jawa Timur	86,19	13,81	100,00
Banten	76,17	23,83	100,00
Bali	93,85	6,15	100,00
Nusa Tenggara Barat	89,29	10,71	100,00
Nusa Tenggara Timur	93,71	6,29	100,00
Kalimantan Barat	90,30	9,70	100,00
Kalimantan Tengah	92,10	7,90	100,00
Kalimantan Selatan	87,29	12,71	100,00
Kalimantan Timur	82,72	17,28	100,00
Sulawesi Utara	78,07	21,93	100,00
Sulawesi Tengah	84,78	15,22	100,00
Sulawesi Selatan	82,64	17,36	100,00
Sulawesi Tenggara	89,39	10,61	100,00
Gorontalo	87,86	12,14	100,00
Sulawesi Barat	91,58	8,42	100,00
Maluku	79,61	20,39	100,00
Maluku Utara	90,42	9,58	100,00
Irian Jaya Barat	86,39	13,61	100,00
Papua	92,48	7,52	100,00
INDONESIA	84,04	15,96	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.3.1 Persentase Pemuda Bukan Angkatan Kerja menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan			
	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
Naggroe Aceh Darussalam	60,09	38,49	1,42	100,00
Sumatera Utara	52,27	40,25	7,48	100,00
Sumatera Barat	63,52	30,91	5,57	100,00
Riau	50,50	46,51	2,99	100,00
Jambi	52,87	39,86	7,26	100,00
Sumatera Selatan	49,07	43,30	7,63	100,00
Bengkulu	60,80	34,47	4,73	100,00
Lampung	50,20	43,09	6,71	100,00
Bangka Belitung	42,94	50,94	6,12	100,00
Kepulauan Riau	39,36	54,84	5,80	100,00
DKI. Jakarta	48,05	46,96	4,99	100,00
Jawa Barat	41,35	50,86	7,79	100,00
Jawa Tengah	52,85	38,11	9,05	100,00
DI. Yogyakarta	66,01	29,50	4,48	100,00
Jawa Timur	51,90	41,17	6,94	100,00
Banten	44,93	46,40	8,67	100,00
Bali	56,56	38,89	4,55	100,00
Nusa Tenggara Barat	51,35	38,43	10,22	100,00
Nusa Tenggara Timur	55,74	38,57	5,69	100,00
Kalimantan Barat	50,23	42,59	7,18	100,00
Kalimantan Tengah	47,01	49,58	3,41	100,00
Kalimantan Selatan	49,67	49,39	0,94	100,00
Kalimantan Timur	45,72	49,14	5,14	100,00
Sulawesi Utara	51,39	37,74	10,87	100,00
Sulawesi Tengah	57,50	39,86	2,63	100,00
Sulawesi Selatan	52,74	39,44	7,82	100,00
Sulawesi Tenggara	59,96	35,94	4,10	100,00
Gorontalo	43,75	51,31	4,95	100,00
Sulawesi Barat	47,65	44,72	7,63	100,00
Maluku	59,21	35,08	5,71	100,00
Maluku Utara	56,79	39,28	3,94	100,00
Irian Jaya Barat	39,58	48,61	11,81	100,00
Papua	50,80	45,52	3,68	100,00
INDONESIA	49,39	43,62	6,99	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.3.2 Persentase Pemuda Bukan Angkatan Kerja menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2007

Perdesaan				
Provinsi	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Naggroe Aceh Darussalam	46,67	44,44	8,89	100,00
Sumatera Utara	45,32	44,94	9,74	100,00
Sumatera Barat	44,42	48,05	7,52	100,00
Riau	33,46	61,30	5,24	100,00
Jambi	35,21	57,16	7,63	100,00
Sumatera Selatan	39,63	52,12	8,25	100,00
Bengkulu	38,19	53,54	8,27	100,00
Lampung	32,20	60,34	7,46	100,00
Bangka Belitung	32,99	62,30	4,71	100,00
Kepulauan Riau	20,79	75,13	4,08	100,00
DKI. Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	25,32	62,37	12,32	100,00
Jawa Tengah	37,38	51,97	10,64	100,00
DI. Yogyakarta	52,54	43,26	4,20	100,00
Jawa Timur	33,71	57,48	8,80	100,00
Banten	25,36	60,53	14,11	100,00
Bali	49,78	39,36	10,85	100,00
Nusa Tenggara Barat	34,35	54,70	10,94	100,00
Nusa Tenggara Timur	42,03	49,10	8,87	100,00
Kalimantan Barat	41,32	51,10	7,57	100,00
Kalimantan Tengah	36,31	58,13	5,56	100,00
Kalimantan Selatan	39,51	59,32	1,17	100,00
Kalimantan Timur	31,96	62,13	5,91	100,00
Sulawesi Utara	32,66	59,59	7,75	100,00
Sulawesi Tengah	28,38	67,06	4,56	100,00
Sulawesi Selatan	30,33	61,38	8,29	100,00
Sulawesi Tenggara	37,24	57,17	5,59	100,00
Gorontalo	32,14	61,36	6,50	100,00
Sulawesi Barat	33,10	56,32	10,57	100,00
Maluku	46,32	46,42	7,26	100,00
Maluku Utara	41,19	51,53	7,28	100,00
Irian Jaya Barat	34,42	59,95	5,62	100,00
Papua	49,19	39,50	11,31	100,00
INDONESIA	34,62	56,10	9,28	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.3.3 Persentase Pemuda Bukan Angkatan Kerja menurut Provinsi dan Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan			
	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)
Naggroe Aceh Darussalam	50,84	42,59	6,57	100,00
Sumatera Utara	49,04	42,43	8,53	100,00
Sumatera Barat	51,93	41,31	6,76	100,00
Riau	39,03	56,47	4,50	100,00
Jambi	41,36	51,14	7,50	100,00
Sumatera Selatan	43,83	48,19	7,97	100,00
Bengkulu	46,18	46,80	7,02	100,00
Lampung	36,67	56,06	7,27	100,00
Bangka Belitung	37,21	57,49	5,31	100,00
Kepulauan Riau	33,73	60,99	5,28	100,00
DKI. Jakarta	48,05	46,96	4,99	100,00
Jawa Barat	34,20	55,99	9,81	100,00
Jawa Tengah	44,56	45,54	9,90	100,00
DI. Yogyakarta	62,19	33,41	4,40	100,00
Jawa Timur	42,43	49,66	7,91	100,00
Banten	36,59	52,43	10,99	100,00
Bali	53,89	39,08	7,03	100,00
Nusa Tenggara Barat	42,15	47,24	10,61	100,00
Nusa Tenggara Timur	46,99	45,29	7,72	100,00
Kalimantan Barat	44,70	47,87	7,42	100,00
Kalimantan Tengah	40,55	54,74	4,71	100,00
Kalimantan Selatan	44,25	54,68	1,06	100,00
Kalimantan Timur	39,98	54,56	5,46	100,00
Sulawesi Utara	39,64	51,45	8,91	100,00
Sulawesi Tengah	36,84	59,16	4,00	100,00
Sulawesi Selatan	39,58	52,32	8,10	100,00
Sulawesi Tenggara	43,81	51,02	5,16	100,00
Gorontalo	35,47	58,48	6,05	100,00
Sulawesi Barat	36,17	53,88	9,95	100,00
Maluku	50,81	42,47	6,72	100,00
Maluku Utara	46,98	46,98	6,04	100,00
Irian Jaya Barat	36,46	55,47	8,07	100,00
Papua	49,81	41,81	8,38	100,00
INDONESIA	41,88	49,96	8,15	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.4.1 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan									
	Pertanian	Pertambangan	Industri	Listrik	Konstruksi	Perdagangan	Komunikasi	Keuangan	Jasa	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NAD	16,84	0,38	5,74	0,24	9,81	28,37	7,99	2,00	28,63	100,00
Sumatera Utara	10,57	0,19	16,87	0,21	8,94	32,32	10,01	3,03	17,86	100,00
Sumatera Barat	8,60	0,67	11,06	0,01	5,68	37,43	11,97	2,91	21,67	100,00
Riau	7,82	4,80	8,75	0,26	10,00	34,35	8,77	2,75	22,50	100,00
Jambi	13,44	0,67	5,91	0,25	8,66	34,96	13,26	1,61	21,24	100,00
Sumatera Selatan	11,98	1,64	13,08	0,51	6,26	26,29	11,55	3,06	25,63	100,00
Bengkulu	10,40	0,72	7,48	0,41	5,44	37,73	8,87	1,78	27,18	100,00
Lampung	10,44	0,18	13,59	0,38	8,39	34,78	10,05	3,42	18,77	100,00
Bangka Belitung	5,39	19,45	5,84	0,75	8,64	33,28	6,78	3,10	16,78	100,00
Kepulauan Riau	5,03	1,65	37,48	0,31	8,13	23,06	9,05	2,39	12,90	100,00
DKI. Jakarta	0,38	0,16	23,15	0,37	3,84	36,75	9,34	7,78	18,23	100,00
Jawa Barat	4,79	0,47	29,85	0,32	5,74	31,63	10,47	3,20	13,53	100,00
Jawa Tengah	8,19	0,45	33,12	0,16	7,22	30,55	5,36	2,31	12,64	100,00
DI. Yogyakarta	4,40	1,22	21,19	0,07	8,99	33,60	4,04	4,70	21,78	100,00
Jawa Timur	11,01	0,33	26,08	0,18	6,71	32,16	6,83	2,52	14,17	100,00
Banten	1,89	0,18	36,18	0,13	3,16	28,79	10,37	2,68	16,62	100,00
Bali	6,75	0,23	21,85	0,17	7,69	40,05	4,79	5,22	13,26	100,00
Nusa Tenggara Barat	20,52	0,98	12,81	0,23	6,88	28,10	8,43	2,58	19,46	100,00
Nusa Tenggara Timur	7,33	0,83	5,75	0,79	6,69	27,24	16,31	2,38	32,68	100,00
Kalimantan Barat	8,52	1,14	8,52	0,11	9,69	40,25	7,24	2,98	21,55	100,00
Kalimantan Tengah	16,02	4,45	7,07	0,47	8,13	29,05	10,16	4,50	20,15	100,00
Kalimantan Selatan	5,02	5,09	12,48	0,18	5,83	39,92	8,81	2,43	20,25	100,00
Kalimantan Timur	7,01	6,99	10,43	0,57	8,55	33,17	9,83	5,49	17,95	100,00
Sulawesi Utara	12,13	0,43	6,17	0,15	10,61	30,78	17,39	4,37	17,98	100,00
Sulawesi Tengah	8,35	0,32	5,46	0,19	9,04	32,35	10,71	3,48	30,09	100,00
Sulawesi Selatan	9,79	0,54	9,25	0,53	9,27	42,47	12,96	4,54	10,65	100,00
Sulawesi Tenggara	7,01	1,18	5,66	0,21	5,97	35,79	14,75	2,36	27,07	100,00
Gorontalo	8,85	1,83	5,94	0,37	9,02	26,88	18,52	3,38	25,19	100,00
Sulawesi Barat	19,64	1,35	8,00		5,79	32,51	8,90	3,35	20,45	100,00
Maluku	11,71	1,33	3,32	0,56	5,36	31,83	21,14	2,83	21,92	100,00
Maluku Utara	9,48	1,10	4,71	0,62	7,44	31,74	19,53	3,00	22,38	100,00
Irian Jaya Barat	10,51	7,26	1,62	0,85	8,56	24,01	21,09	1,73	24,38	100,00
Papua	6,86	3,55	3,29	1,08	9,91	31,75	14,08	3,76	25,74	100,00
INDONESIA	7,29	0,85	23,60	0,27	6,60	32,64	8,86	3,53	16,36	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.4.2 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, Tahun 2007

Provinsi	Perdesaan									
	Pertanian	Pertambangan	Industri	Listrik	Konstruksi	Perdagangan	Komunikasi	Keuangan	Jasa	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NAD	57,92	0,77	4,68	0,10	8,42	12,48	4,89	0,22	10,52	100,00
Sumatera Utara	67,21	0,77	4,94	0,16	3,61	11,66	5,05	0,32	6,28	100,00
Sumatera Barat	59,16	1,15	8,70	0,01	3,62	15,80	7,72	0,61	3,22	100,00
Riau	61,37	1,05	7,36	0,19	3,79	11,65	5,47	0,15	8,97	100,00
Jambi	71,07	0,97	4,99	0,02	2,14	10,38	4,29	0,35	5,79	100,00
Sumatera Selatan	79,76	0,63	4,63	0,14	1,58	5,43	3,54	0,17	4,12	100,00
Bengkulu	78,51	0,93	2,45	0,06	3,31	6,41	2,92	0,33	5,07	100,00
Lampung	66,54	0,55	9,02	0,03	3,89	11,01	3,93	0,20	4,83	100,00
Bangka Belitung	51,14	27,89	2,29	0,25	1,86	9,95	2,07	0,38	4,18	100,00
Kepulauan Riau	46,26	3,81	9,84	0,18	5,60	13,44	4,87	0,24	15,75	100,00
DKI. Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	30,33	0,47	21,15	0,23	6,45	23,47	10,15	0,57	7,17	100,00
Jawa Tengah	43,02	1,23	16,77	0,17	9,62	17,29	4,37	0,80	6,72	100,00
DI. Yogyakarta	35,98	1,83	14,66	0,23	13,81	17,19	3,98	1,67	10,65	100,00
Jawa Timur	55,29	0,97	13,76	0,10	6,16	13,24	3,78	0,74	5,96	100,00
Banten	34,16	0,93	19,50	0,12	4,83	20,82	10,61	0,73	8,30	100,00
Bali	47,29	0,56	16,69	0,29	6,31	16,14	3,66	2,38	6,69	100,00
Nusa Tenggara Barat	57,78	2,10	8,58	0,01	5,01	12,64	7,02	0,34	6,52	100,00
Nusa Tenggara Timur	73,73	1,14	8,83	0,04	2,52	4,09	4,98	0,16	4,53	100,00
Kalimantan Barat	75,17	3,64	4,13	0,11	2,27	8,70	2,21	0,20	3,57	100,00
Kalimantan Tengah	71,66	6,79	4,21	0,08	2,81	7,85	2,96	0,13	3,51	100,00
Kalimantan Selatan	63,60	4,25	8,08	0,01	2,71	11,65	3,00	0,31	6,38	100,00
Kalimantan Timur	58,24	6,12	5,46	0,37	5,07	11,54	4,49	0,41	8,30	100,00
Sulawesi Utara	53,68	1,93	4,84	0,24	5,16	14,07	9,39	1,41	9,28	100,00
Sulawesi Tengah	67,72	0,74	4,59	0,08	3,49	11,08	4,26	0,40	7,64	100,00
Sulawesi Selatan	71,08	0,80	4,60	0,04	4,07	9,86	5,57	0,53	3,46	100,00
Sulawesi Tenggara	65,74	1,05	6,52	0,22	3,69	11,57	4,86	0,47	5,89	100,00
Gorontalo	57,29	2,20	6,64	0,04	4,53	10,53	7,57	0,59	10,61	100,00
Sulawesi Barat	74,25	0,07	3,14	0,08	3,00	8,69	3,29	0,27	7,19	100,00
Maluku	77,75	0,44	4,96		1,74	6,77	4,00	0,34	3,99	100,00
Maluku Utara	72,97	1,09	3,51	0,04	2,59	9,76	5,41	0,14	4,49	100,00
Irian Jaya Barat	71,05	1,00	4,44	0,23	3,67	7,65	3,93	0,02	8,02	100,00
Papua	87,78	1,38	1,87	0,13	1,07	3,21	2,01	0,23	2,32	100,00
INDONESIA	56,21	1,39	11,31	0,13	5,33	13,66	5,26	0,54	6,16	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.4.3 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Lapangan Usaha, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan									
	Pertanian	Pertambangan	Industri	Listrik	Konstruksi	Perdagangan	Komunikasi	Keuangan	Jasa	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
NAD	46,87	0,66	4,97	0,14	8,79	16,76	5,72	0,70	15,39	100,00
Sumatera Utara	43,31	0,52	9,97	0,18	5,86	20,38	7,14	1,46	11,17	100,00
Sumatera Barat	43,77	1,00	9,42	0,01	4,25	22,38	9,02	1,31	8,84	100,00
Riau	46,48	2,09	7,75	0,21	5,51	17,96	6,39	0,87	12,73	100,00
Jambi	56,34	0,89	5,23	0,08	3,80	16,66	6,58	0,67	9,74	100,00
Sumatera Selatan	63,55	0,87	6,65	0,23	2,70	10,42	5,46	0,86	9,26	100,00
Bengkulu	60,66	0,87	3,77	0,15	3,87	14,62	4,48	0,71	10,86	100,00
Lampung	55,41	0,48	9,93	0,10	4,78	15,72	5,14	0,84	7,60	100,00
Bangka Belitung	33,88	24,71	3,63	0,44	4,41	18,75	3,84	1,40	8,93	100,00
Kepulauan Riau	12,60	2,05	32,40	0,29	7,66	21,29	8,28	1,99	13,43	100,00
DKI. Jakarta	0,38	0,16	23,15	0,37	3,84	36,75	9,34	7,78	18,23	100,00
Jawa Barat	17,27	0,47	25,60	0,28	6,09	27,64	10,31	1,91	10,42	100,00
Jawa Tengah	28,71	0,91	23,49	0,17	8,64	22,74	4,78	1,42	9,15	100,00
DI. Yogyakarta	17,11	1,47	18,56	0,14	10,93	26,99	4,02	3,48	17,30	100,00
Jawa Timur	37,01	0,71	18,84	0,13	6,39	21,05	5,04	1,47	9,35	100,00
Banten	15,39	0,49	29,20	0,13	3,86	25,45	10,47	1,86	13,14	100,00
Bali	27,35	0,40	19,23	0,23	6,99	27,90	4,22	3,78	9,92	100,00
Nusa Tenggara Barat	44,86	1,71	10,05	0,09	5,66	18,00	7,51	1,12	11,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	64,74	1,10	8,41	0,14	3,09	7,22	6,51	0,46	8,34	100,00
Kalimantan Barat	60,88	3,10	5,07	0,11	3,86	15,46	3,29	0,79	7,42	100,00
Kalimantan Tengah	57,55	6,19	4,94	0,18	4,16	13,23	4,78	1,24	7,73	100,00
Kalimantan Selatan	44,40	4,53	9,53	0,07	3,73	20,92	4,91	1,00	10,92	100,00
Kalimantan Timur	31,39	6,58	8,06	0,48	6,90	22,88	7,29	3,08	13,36	100,00
Sulawesi Utara	37,85	1,36	5,34	0,21	7,23	20,43	12,44	2,54	12,59	100,00
Sulawesi Tengah	55,99	0,65	4,76	0,10	4,59	15,28	5,53	1,01	12,08	100,00
Sulawesi Selatan	52,10	0,72	6,04	0,19	5,68	19,96	7,86	1,77	5,69	100,00
Sulawesi Tenggara	55,49	1,07	6,37	0,22	4,09	15,80	6,59	0,80	9,59	100,00
Gorontalo	44,90	2,10	6,46	0,13	5,68	14,71	10,37	1,30	14,34	100,00
Sulawesi Barat	65,51	0,28	3,92	0,07	3,45	12,51	4,19	0,77	9,31	100,00
Maluku	61,52	0,66	4,56	0,14	2,63	12,93	8,21	0,95	8,40	100,00
Maluku Utara	58,06	1,09	3,79	0,18	3,73	14,92	8,72	0,81	8,69	100,00
Irian Jaya Barat	55,63	2,59	3,72	0,39	4,91	11,82	8,30	0,46	12,19	100,00
Papua	74,99	1,72	2,10	0,28	2,47	7,72	3,92	0,79	6,02	100,00
INDONESIA	35,90	1,17	16,42	0,19	5,86	21,54	6,76	1,78	10,39	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.5.1 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Status pekerjaan Utama, Tahun 2007

Provinsi	Berusaha Sendiri	Brsh Dbnt Brh tdk Ttp	Brsh Dbnt Brh Ttp	Buruh/Karyawan Dibayar	Pekerja Bebas	Pekerja Tak Di bayar	Perkotaan
							Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(8)
NAD	23,87	7,69	6,93	45,07	3,28	13,17	100,00
Sumatera Utara	20,55	4,21	2,44	57,70	6,12	8,97	100,00
Sumatera Barat	23,97	7,72	2,64	47,97	7,11	10,58	100,00
Riau	17,88	2,42	2,91	68,40	2,52	5,87	100,00
Jambi	21,05	7,11	3,41	43,60	8,88	15,95	100,00
Sumatera Selatan	17,89	6,54	1,73	58,69	5,10	10,06	100,00
Bengkulu	18,85	9,06	4,05	48,51	5,92	13,61	100,00
Lampung	20,46	5,82	2,34	49,20	9,85	12,32	100,00
Bangka Belitung	18,40	3,85	3,44	60,74	3,99	9,58	100,00
Kepulauan Riau	17,39	0,84	1,30	75,77	2,37	2,33	100,00
DKI. Jakarta	17,41	3,05	2,17	70,50	2,12	4,76	100,00
Jawa Barat	22,45	7,34	2,41	54,27	7,41	6,11	100,00
Jawa Tengah	18,17	8,97	2,76	47,41	10,49	12,20	100,00
DI. Yogyakarta	11,60	8,03	4,09	58,74	7,58	9,97	100,00
Jawa Timur	17,80	7,24	2,31	50,87	8,53	13,26	100,00
Banten	23,09	6,05	2,68	63,53	1,70	2,94	100,00
Bali	18,04	8,09	2,52	54,09	6,04	11,22	100,00
Nusa Tenggara Barat	21,32	9,47	3,06	31,79	17,40	16,97	100,00
Nusa Tenggara Timur	20,45	9,62	3,77	49,85	2,99	13,32	100,00
Kalimantan Barat	19,17	5,20	4,04	57,58	1,31	12,71	100,00
Kalimantan Tengah	20,86	7,93	3,84	48,83	2,41	16,13	100,00
Kalimantan Selatan	22,22	6,38	2,39	49,35	6,95	12,72	100,00
Kalimantan Timur	18,33	7,01	2,43	62,11	3,04	7,08	100,00
Sulawesi Utara	33,37	4,56	1,18	50,96	6,46	3,47	100,00
Sulawesi Tengah	18,84	6,34	2,94	58,83	3,97	9,08	100,00
Sulawesi Selatan	21,33	7,19	2,87	53,06	2,87	12,69	100,00
Sulawesi Tenggara	24,23	7,74	3,27	50,10	2,34	12,32	100,00
Gorontalo	27,52	5,88	3,68	54,15	3,71	5,06	100,00
Sulawesi Barat	33,85	10,45	0,68	35,33	3,52	16,16	100,00
Maluku	25,26	7,01	3,25	45,17	3,39	15,91	100,00
Maluku Utara	27,85	4,20	2,94	50,32	4,26	10,42	100,00
Irian Jaya Barat	21,80	5,97	3,08	60,35	2,60	6,21	100,00
Papua	25,65	5,83	2,35	56,32	1,40	8,44	100,00
INDONESIA	19,79	6,60	2,59	55,20	6,53	9,30	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.5.2 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Status pekerjaan Utama, Tahun 2007

Provinsi	Berusaha Sendiri	Brsh Dbnt Brh tdk Ttp	Brsh Dbnt Brh Ttp	Buruh/Karyawan Dibayar	Pekerja Bebas	Pekerja Tak Di bayar	Perdesaan
							Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(8)
NAD	19,33	17,96	3,80	28,05	7,38	23,49	100,00
Sumatera Utara	14,55	16,05	1,17	24,35	12,77	31,11	100,00
Sumatera Barat	24,38	15,75	1,88	18,90	12,01	27,07	100,00
Riau	26,13	9,20	1,87	30,42	11,65	20,73	100,00
Jambi	22,20	13,60	2,09	23,01	9,61	29,50	100,00
Sumatera Selatan	12,60	20,81	0,55	17,46	11,14	37,44	100,00
Bengkulu	16,04	20,83	1,39	13,79	8,64	39,32	100,00
Lampung	10,31	16,63	1,29	15,45	15,04	41,27	100,00
Bangka Belitung	22,50	8,94	4,24	31,02	6,94	26,36	100,00
Kepulauan Riau	40,07	3,47	1,36	34,13	9,39	11,59	100,00
DKI. Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	25,45	12,36	1,89	26,04	20,23	14,03	100,00
Jawa Tengah	15,59	14,71	1,01	22,37	18,02	28,31	100,00
DI. Yogyakarta	8,83	14,11	1,64	30,48	15,33	29,61	100,00
Jawa Timur	14,16	14,18	2,07	19,70	15,99	33,89	100,00
Banten	21,93	11,34	1,82	30,95	18,23	15,73	100,00
Bali	16,15	15,22	1,68	28,17	10,49	28,30	100,00
Nusa Tenggara Barat	18,66	16,06	1,83	12,99	20,07	30,39	100,00
Nusa Tenggara Timur	14,42	25,08	0,79	8,38	2,95	48,39	100,00
Kalimantan Barat	17,29	17,89	1,53	18,13	2,65	42,51	100,00
Kalimantan Tengah	17,32	19,76	1,84	22,10	5,04	33,93	100,00
Kalimantan Selatan	18,54	17,14	1,20	21,17	7,37	34,58	100,00
Kalimantan Timur	18,62	13,91	1,57	34,29	7,20	24,41	100,00
Sulawesi Utara	34,24	10,41	1,98	27,19	10,85	15,34	100,00
Sulawesi Tengah	17,60	26,23	1,79	17,29	10,84	26,25	100,00
Sulawesi Selatan	14,88	22,84	1,35	14,46	8,11	38,36	100,00
Sulawesi Tenggara	17,78	20,87	1,99	14,36	3,63	41,37	100,00
Gorontalo	23,95	14,20	2,74	28,56	10,47	20,07	100,00
Sulawesi Barat	15,63	25,88	1,78	15,13	4,87	36,71	100,00
Maluku	23,03	20,47	1,33	11,74	4,19	39,24	100,00
Maluku Utara	25,76	17,94	1,78	13,00	8,91	32,61	100,00
Irian Jaya Barat	10,96	25,38	1,25	20,48	1,35	40,59	100,00
Papua	25,55	25,27	0,57	7,09	1,28	40,23	100,00
INDONESIA	17,77	16,08	1,59	21,06	13,37	30,13	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.5.3 Persentase Pemuda yang Bekerja menurut Provinsi dan Status pekerjaan Utama, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan						Jumlah
	Berusaha Sendiri	Brsh Dbnt Brh tdk Ttp	Brsh Dbnt Brh Ttp	Buruh/Karyawan Dibayar	Pekerja Bebas	Pekerja Tak Di bayar	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(8)
NAD	20,55	15,19	4,64	32,62	6,27	20,72	100,00
Sumatera Utara	17,08	11,05	1,71	38,43	9,96	21,77	100,00
Sumatera Barat	24,26	13,31	2,11	27,75	10,52	22,05	100,00
Riau	23,83	7,32	2,16	40,98	9,11	16,60	100,00
Jambi	21,90	11,94	2,43	28,27	9,42	26,03	100,00
Sumatera Selatan	13,87	17,40	0,83	27,32	9,70	30,89	100,00
Bengkulu	16,77	17,74	2,09	22,89	7,92	32,58	100,00
Lampung	12,33	14,48	1,50	22,15	14,01	35,53	100,00
Bangka Belitung	20,95	7,02	3,94	42,23	5,83	20,03	100,00
Kepulauan Riau	21,56	1,33	1,31	68,12	3,66	4,03	100,00
DKI. Jakarta	17,41	3,05	2,17	70,50	2,12	4,76	100,00
Jawa Barat	23,92	9,80	2,16	40,47	13,68	9,98	100,00
Jawa Tengah	16,65	12,35	1,73	32,65	14,93	21,69	100,00
DI. Yogyakarta	10,48	10,48	3,10	47,37	10,70	17,87	100,00
Jawa Timur	15,66	11,32	2,17	32,57	12,92	25,37	100,00
Banten	22,61	8,27	2,32	49,90	8,62	8,29	100,00
Bali	17,08	11,71	2,09	40,92	8,30	19,90	100,00
Nusa Tenggara Barat	19,58	13,77	2,26	19,50	19,14	25,74	100,00
Nusa Tenggara Timur	15,24	22,98	1,19	13,99	2,95	43,64	100,00
Kalimantan Barat	17,69	15,17	2,07	26,58	2,36	36,13	100,00
Kalimantan Tengah	18,22	16,76	2,35	28,88	4,37	29,42	100,00
Kalimantan Selatan	19,75	13,61	1,59	30,40	7,23	27,42	100,00
Kalimantan Timur	18,47	10,29	2,02	48,87	5,02	15,33	100,00
Sulawesi Utara	33,91	8,18	1,67	36,24	9,17	10,82	100,00
Sulawesi Tengah	17,84	22,30	2,02	25,50	9,48	22,86	100,00
Sulawesi Selatan	16,88	17,99	1,82	26,41	6,48	30,41	100,00
Sulawesi Tenggara	18,90	18,58	2,21	20,60	3,40	36,30	100,00
Gorontalo	24,86	12,07	2,98	35,11	8,74	16,23	100,00
Sulawesi Barat	18,54	23,41	1,60	18,36	4,66	33,42	100,00
Maluku	23,58	17,16	1,80	19,95	4,00	33,51	100,00
Maluku Utara	26,25	14,71	2,05	21,77	7,82	27,40	100,00
Irian Jaya Barat	13,72	20,44	1,71	30,63	1,67	31,83	100,00
Papua	25,57	22,20	0,85	14,88	1,30	35,20	100,00
INDONESIA	18,61	12,15	2,00	35,24	10,53	21,48	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.6.1 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2007

Provinsi	Jumlah Jam Kerja (Jam)					Jumlah
	0*)	1 - 9	10 - 24	25 - 34	35+	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NAD	1,31	0,70	11,93	16,06	70,00	100,00
Sumatera Utara	0,90	0,88	6,95	6,59	84,68	100,00
Sumatera Barat	2,38	2,10	10,85	9,03	75,65	100,00
Riau	1,27	1,40	7,97	8,28	81,09	100,00
Jambi	1,05	0,80	8,30	10,42	79,43	100,00
Sumatera Selatan	1,00	1,28	8,40	9,32	79,99	100,00
Bengkulu	1,58	1,67	11,35	7,70	77,69	100,00
Lampung	2,54	1,66	9,44	6,96	79,39	100,00
Bangka Belitung	2,08	1,12	10,12	9,06	77,61	100,00
Kepulauan Riau	1,18	1,10	2,86	4,16	90,69	100,00
DKI. Jakarta	0,52	0,87	3,40	3,05	92,16	100,00
Jawa Barat	1,05	0,91	6,40	5,86	85,78	100,00
Jawa Tengah	1,78	1,18	8,49	8,36	80,19	100,00
DI. Yogyakarta	0,90	1,70	10,07	8,30	79,03	100,00
Jawa Timur	1,13	1,51	8,50	8,34	80,53	100,00
Banten	0,70	0,56	3,99	4,63	90,11	100,00
Bali	1,78	0,69	6,53	6,42	84,59	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,20	2,67	16,10	12,89	66,14	100,00
Nusa Tenggara Timur	3,16	1,94	10,80	10,25	73,84	100,00
Kalimantan Barat	2,30	1,50	8,71	8,38	79,11	100,00
Kalimantan Tengah	2,15	0,70	9,95	9,69	77,50	100,00
Kalimantan Selatan	1,95	2,35	8,75	8,26	78,69	100,00
Kalimantan Timur	0,45	0,32	6,49	7,00	85,74	100,00
Sulawesi Utara	2,03	0,75	6,00	7,51	83,70	100,00
Sulawesi Tengah	3,32	1,66	6,37	9,53	79,12	100,00
Sulawesi Selatan	1,93	1,08	8,58	7,10	81,30	100,00
Sulawesi Tenggara	1,62	2,10	11,26	8,91	76,10	100,00
Gorontalo	3,07	2,09	8,43	7,47	78,95	100,00
Sulawesi Barat	3,79	1,73	10,27	14,49	69,72	100,00
Maluku	1,71	1,97	10,90	10,91	74,51	100,00
Maluku Utara	0,95	0,39	10,11	10,91	77,65	100,00
Irian Jaya Barat			4,76	7,99	87,26	100,00
Papua	1,66	1,14	7,04	9,72	80,44	100,00
INDONESIA	1,27	1,15	7,31	7,05	83,21	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.6.2 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2007

Provinsi	Jumlah Jam Kerja (Jam)					Perdesaan
	0*)	1 - 9	10 - 24	25 - 34	35+	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NAD	2,92	1,67	18,59	19,06	57,76	100,00
Sumatera Utara	1,93	2,50	18,65	17,25	59,66	100,00
Sumatera Barat	1,88	2,50	19,52	18,59	57,51	100,00
Riau	0,86	3,46	21,58	16,99	57,11	100,00
Jambi	1,90	1,85	19,16	22,15	54,94	100,00
Sumatera Selatan	3,47	1,74	19,01	25,37	50,41	100,00
Bengkulu	2,15	1,56	16,96	18,61	60,71	100,00
Lampung	1,91	3,60	18,27	15,06	61,17	100,00
Bangka Belitung	2,26	1,40	24,69	16,33	55,33	100,00
Kepulauan Riau	4,38	2,94	17,18	18,23	57,27	100,00
DKI. Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	3,25	1,69	12,90	13,29	68,86	100,00
Jawa Tengah	1,94	1,96	17,74	14,90	63,46	100,00
DI. Yogyakarta	1,52	4,01	13,69	12,55	68,24	100,00
Jawa Timur	1,64	2,63	19,65	15,69	60,38	100,00
Banten	2,55	2,18	14,97	13,12	67,18	100,00
Bali	1,72	0,86	11,67	11,83	73,92	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,29	4,74	23,82	15,88	52,28	100,00
Nusa Tenggara Timur	5,38	2,84	24,10	22,04	45,64	100,00
Kalimantan Barat	1,13	1,96	19,72	18,93	58,25	100,00
Kalimantan Tengah	1,82	0,54	14,99	21,01	61,64	100,00
Kalimantan Selatan	3,62	2,28	18,33	20,30	55,46	100,00
Kalimantan Timur	0,11	0,05	13,76	15,92	70,16	100,00
Sulawesi Utara	1,52	2,27	13,05	14,02	69,14	100,00
Sulawesi Tengah	4,28	2,76	16,58	15,84	60,54	100,00
Sulawesi Selatan	3,54	3,28	21,65	17,66	53,87	100,00
Sulawesi Tenggara	2,73	5,58	23,93	15,69	52,07	100,00
Gorontalo	2,43	1,33	16,89	12,99	66,36	100,00
Sulawesi Barat	2,16	5,01	27,60	19,92	45,30	100,00
Maluku	0,99	2,35	15,52	19,71	61,43	100,00
Maluku Utara	2,91	0,82	23,55	18,88	53,84	100,00
Irian Jaya Barat	0,94	0,49	17,79	18,57	62,21	100,00
Papua	0,96	1,08	15,43	21,43	61,11	100,00
INDONESIA	2,35	2,35	18,13	16,64	60,53	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.6.3 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu yang Lalu, Tahun 2007

Provinsi	Jumlah Jam Kerja (Jam)					Jumlah
	0*)	1 - 9	10 - 24	25 - 34	35+	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
NAD	2,48	1,41	16,80	18,25	61,05	100,00
Sumatera Utara	1,50	1,82	13,72	12,75	70,22	100,00
Sumatera Barat	2,03	2,38	16,88	15,68	63,03	100,00
Riau	0,97	2,89	17,80	14,56	63,78	100,00
Jambi	1,68	1,59	16,38	19,15	61,20	100,00
Sumatera Selatan	2,88	1,63	16,47	21,53	57,48	100,00
Bengkulu	2,00	1,59	15,49	15,75	65,16	100,00
Lampung	2,03	3,21	16,52	13,45	64,79	100,00
Bangka Belitung	2,19	1,30	19,19	13,59	63,73	100,00
Kepulauan Riau	1,77	1,44	5,49	6,75	84,55	100,00
DKI. Jakarta	0,52	0,87	3,40	3,05	92,16	100,00
Jawa Barat	2,13	1,29	9,58	9,49	77,51	100,00
Jawa Tengah	1,88	1,64	13,94	12,21	70,33	100,00
DI. Yogyakarta	1,15	2,63	11,53	10,01	74,69	100,00
Jawa Timur	1,43	2,17	15,05	12,66	68,70	100,00
Banten	1,47	1,24	8,58	8,19	80,52	100,00
Bali	1,75	0,78	9,14	9,17	79,17	100,00
Nusa Tenggara Barat	2,91	4,02	21,14	14,84	57,08	100,00
Nusa Tenggara Timur	5,08	2,72	22,30	20,45	49,46	100,00
Kalimantan Barat	1,38	1,86	17,36	16,67	62,72	100,00
Kalimantan Tengah	1,90	0,58	13,71	18,14	65,66	100,00
Kalimantan Selatan	3,08	2,30	15,19	16,36	63,07	100,00
Kalimantan Timur	0,29	0,19	9,95	11,25	78,33	100,00
Sulawesi Utara	1,72	1,69	10,37	11,54	74,68	100,00
Sulawesi Tengah	4,09	2,54	14,56	14,59	64,21	100,00
Sulawesi Selatan	3,04	2,60	17,60	14,39	62,36	100,00
Sulawesi Tenggara	2,54	4,97	21,72	14,50	56,27	100,00
Gorontalo	2,60	1,52	14,73	11,58	69,58	100,00
Sulawesi Barat	2,42	4,49	24,83	19,05	49,21	100,00
Maluku	1,17	2,26	14,38	17,55	64,65	100,00
Maluku Utara	2,45	0,72	20,39	17,00	59,43	100,00
Irian Jaya Barat	0,70	0,36	14,47	15,88	68,59	100,00
Papua	1,07	1,09	14,10	19,57	64,16	100,00
INDONESIA	1,90	1,86	13,64	12,66	69,95	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Catatan : *) Sementara tidak bekerja selama seminggu yg lalu

Tabel 5.7.1 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2007

Provinsi	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD	SLTP	SM	Perguruan Tinggi	Perkotaan
							Jumlah
							(1)
NAD	1,05	2,71	9,87	26,21	43,12	17,04	100,00
Sumatera Utara	0,08	2,73	19,60	24,15	44,00	9,45	100,00
Sumatera Barat	0,16	4,95	15,91	25,64	39,83	13,51	100,00
Riau	0,20	2,04	17,39	21,33	46,60	12,43	100,00
Jambi	0,22	3,79	22,51	21,48	40,07	11,94	100,00
Sumatera Selatan	0,33	4,81	22,78	19,28	36,83	15,97	100,00
Bengkulu	0,06	2,54	15,64	21,67	43,70	16,39	100,00
Lampung	0,56	5,97	24,48	25,06	33,66	10,28	100,00
Bangka Belitung	0,11	5,18	23,98	20,77	40,21	9,75	100,00
Kepulauan Riau	0,15	3,48	19,72	16,89	52,00	7,76	100,00
DKI. Jakarta	0,13	1,93	19,75	22,35	39,57	16,27	100,00
Jawa Barat	0,24	3,01	28,43	24,04	34,31	9,97	100,00
Jawa Tengah	0,24	2,78	30,97	26,72	30,74	8,56	100,00
DI. Yogyakarta	0,37	1,73	17,83	18,99	40,59	20,49	100,00
Jawa Timur	0,28	2,35	25,78	25,19	36,49	9,90	100,00
Banten	0,15	2,51	25,80	23,63	39,96	7,94	100,00
Bali	0,44	2,55	21,32	21,62	41,50	12,56	100,00
Nusa Tenggara Barat	3,66	10,36	30,94	20,91	24,97	9,16	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,94	6,67	22,65	19,90	37,40	12,43	100,00
Kalimantan Barat	1,09	7,68	25,22	22,12	33,73	10,16	100,00
Kalimantan Tengah	0,63	3,63	22,68	24,43	35,44	13,18	100,00
Kalimantan Selatan	0,26	4,41	21,84	25,80	39,26	8,42	100,00
Kalimantan Timur	0,34	3,35	15,04	20,32	48,95	12,00	100,00
Sulawesi Utara	0,06	3,54	19,23	22,42	43,51	11,24	100,00
Sulawesi Tengah	0,03	4,73	17,33	21,09	39,41	17,41	100,00
Sulawesi Selatan	0,85	5,97	18,88	22,74	41,10	10,47	100,00
Sulawesi Tenggara	0,29	4,70	19,86	20,24	38,32	16,60	100,00
Gorontalo	0,29	8,40	24,09	24,63	31,75	10,85	100,00
Sulawesi Barat	1,16	6,84	28,10	20,93	30,49	12,50	100,00
Maluku	0,15	2,86	16,04	20,89	47,46	12,61	100,00
Maluku Utara		3,86	15,14	17,21	46,37	17,41	100,00
Irian Jaya Barat		2,47	12,44	18,78	52,00	14,31	100,00
Papua	1,16	4,89	9,32	22,26	46,43	15,93	100,00
INDONESIA	0,34	3,15	24,36	23,73	37,28	11,15	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.7.2 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2007

Provinsi							Perdesaan	Jumlah
	Tdk/Blm Per- nah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD	SLTP	SM	Diploma IV/ S1/S2/S3		
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
NAD	1,04	4,97	29,78	33,68	24,82	5,70	100,00	
Sumatera Utara	0,95	6,69	33,93	31,48	24,39	2,57	100,00	
Sumatera Barat	0,27	13,84	30,84	31,62	20,91	2,51	100,00	
Riau	0,71	6,74	38,59	31,85	17,86	4,26	100,00	
Jambi	0,80	8,60	40,47	29,44	17,67	3,02	100,00	
Sumatera Selatan	0,69	10,51	48,82	23,95	14,17	1,86	100,00	
Bengkulu	1,20	10,27	41,38	25,67	19,70	1,78	100,00	
Lampung	0,55	9,70	39,25	32,16	16,27	2,07	100,00	
Bangka Belitung	2,32	22,00	43,91	17,84	12,20	1,74	100,00	
Kepulauan Riau	5,87	15,60	43,89	14,19	14,92	5,54	100,00	
DKI. Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	0,69	6,85	55,55	23,80	11,12	2,00	100,00	
Jawa Tengah	0,67	5,68	50,38	28,70	12,19	2,39	100,00	
DI. Yogyakarta	0,60	2,82	32,00	34,47	22,50	7,60	100,00	
Jawa Timur	2,72	7,54	46,50	26,81	14,12	2,32	100,00	
Banten	0,82	12,19	57,39	18,20	9,12	2,29	100,00	
Bali	1,65	6,09	35,57	29,43	23,93	3,34	100,00	
Nusa Tenggara Barat	6,17	14,03	37,20	21,56	18,43	2,62	100,00	
Nusa Tenggara Timur	2,79	19,28	49,50	16,88	9,77	1,78	100,00	
Kalimantan Barat	3,24	16,25	42,81	23,80	12,34	1,56	100,00	
Kalimantan Tengah	0,16	7,53	47,98	29,38	12,80	2,16	100,00	
Kalimantan Selatan	0,94	10,16	47,87	25,05	13,23	2,75	100,00	
Kalimantan Timur	0,99	8,54	37,62	25,04	24,64	3,18	100,00	
Sulawesi Utara	0,16	8,05	29,00	31,84	27,01	3,94	100,00	
Sulawesi Tengah	2,02	10,00	42,52	25,21	16,85	3,40	100,00	
Sulawesi Selatan	3,78	15,17	38,85	23,64	16,51	2,04	100,00	
Sulawesi Tenggara	1,49	10,03	38,39	27,13	20,00	2,97	100,00	
Gorontalo	1,35	23,01	42,82	20,18	10,19	2,45	100,00	
Sulawesi Barat	3,81	13,65	41,88	24,80	12,41	3,45	100,00	
Maluku	1,41	5,81	37,37	27,68	25,89	1,84	100,00	
Maluku Utara	0,85	12,87	35,64	27,21	19,35	4,08	100,00	
Irian Jaya Barat	8,32	11,05	32,93	25,84	18,28	3,58	100,00	
Papua	27,06	14,74	30,74	14,66	11,20	1,60	100,00	
INDONESIA	2,00	9,17	44,73	26,41	15,19	2,50	100,00	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.7.3 Persentase Pemuda yang Bekerja Selama Seminggu yang lalu menurut Provinsi dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan						Jumlah
	Tdk/Blm Pernah Sekolah	Tdk/Blm Tamat SD	SD	SLTP	SM	Diploma IV/ S1/S2/S3	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
NAD	1,04	4,36	24,43	31,67	29,75	8,75	100,00
Sumatera Utara	0,58	5,02	27,88	28,39	32,66	5,47	100,00
Sumatera Barat	0,24	11,13	26,30	29,80	26,67	5,86	100,00
Riau	0,57	5,44	32,70	28,92	25,85	6,53	100,00
Jambi	0,65	7,37	35,88	27,41	23,39	5,30	100,00
Sumatera Selatan	0,60	9,15	42,59	22,83	19,59	5,23	100,00
Bengkulu	0,90	8,25	34,63	24,62	25,99	5,61	100,00
Lampung	0,55	8,96	36,32	30,75	19,72	3,70	100,00
Bangka Belitung	1,48	15,65	36,39	18,94	22,77	4,76	100,00
Kepulauan Riau	1,20	5,71	24,16	16,39	45,19	7,35	100,00
DKI. Jakarta	0,13	1,93	19,75	22,35	39,57	16,27	100,00
Jawa Barat	0,46	4,89	41,68	23,92	22,98	6,07	100,00
Jawa Tengah	0,49	4,49	42,41	27,88	19,81	4,92	100,00
DI. Yogyakarta	0,46	2,17	23,53	25,22	33,31	15,30	100,00
Jawa Timur	1,71	5,40	37,95	26,14	23,35	5,45	100,00
Banten	0,43	6,56	39,02	21,36	27,06	5,58	100,00
Bali	1,05	4,35	28,56	25,59	32,57	7,88	100,00
Nusa Tenggara Barat	5,30	12,76	35,03	21,33	20,70	4,89	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,54	17,57	45,86	17,29	13,51	3,22	100,00
Kalimantan Barat	2,78	14,41	39,04	23,44	16,92	3,40	100,00
Kalimantan Tengah	0,28	6,54	41,56	28,12	18,54	4,95	100,00
Kalimantan Selatan	0,72	8,28	39,34	25,30	21,76	4,61	100,00
Kalimantan Timur	0,65	5,82	25,79	22,57	37,38	7,80	100,00
Sulawesi Utara	0,12	6,33	25,28	28,25	33,30	6,72	100,00
Sulawesi Tengah	1,62	8,96	37,54	24,40	21,31	6,17	100,00
Sulawesi Selatan	2,87	12,32	32,67	23,36	24,12	4,65	100,00
Sulawesi Tenggara	1,28	9,10	35,16	25,92	23,20	5,35	100,00
Gorontalo	1,08	19,27	38,03	21,32	15,70	4,60	100,00
Sulawesi Barat	3,39	12,56	39,67	24,18	15,31	4,90	100,00
Maluku	1,10	5,09	32,13	26,01	31,19	4,49	100,00
Maluku Utara	0,65	10,75	30,83	24,86	25,70	7,21	100,00
Irian Jaya Barat	6,20	8,87	27,71	24,04	26,87	6,31	100,00
Papua	22,97	13,18	27,35	15,86	16,77	3,87	100,00
INDONESIA	1,31	6,67	36,27	25,30	24,36	6,09	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.8.1 Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar menurut Provinsi dan Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan							Jumlah
	< 300.000	300.000 499.999	500.000 749.999	750.000 999.999	1.000.000 1.499.999	1.500.000 2.499.999	2.500.000 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
NAD	13,56	7,52	17,79	14,82	23,68	18,70	3,94	100,00
Sumatera Utara	11,42	9,97	25,76	26,80	17,10	7,57	1,37	100,00
Sumatera Barat	17,63	14,15	27,99	15,64	14,83	8,13	1,63	100,00
Riau	8,08	13,03	21,81	20,13	19,32	12,57	5,07	100,00
Jambi	13,43	18,59	21,13	17,42	15,02	10,84	3,58	100,00
Sumatera Selatan	19,28	11,31	24,47	19,10	12,16	11,29	2,38	100,00
Bengkulu	12,95	12,39	25,77	16,35	17,77	12,76	2,00	100,00
Lampung	23,30	18,62	29,55	13,67	6,83	7,06	0,96	100,00
Bangka Belitung	9,93	10,94	24,84	24,66	21,15	6,47	2,01	100,00
Kepulauan Riau	5,46	4,02	13,40	11,82	25,73	26,73	12,84	100,00
DKI. Jakarta	3,80	5,45	16,77	25,65	24,52	16,20	7,61	100,00
Jawa Barat	12,36	13,56	23,04	24,06	14,77	8,87	3,34	100,00
Jawa Tengah	24,94	25,69	30,08	9,20	5,61	3,64	0,84	100,00
DI. Yogyakarta	10,66	21,60	34,39	14,64	8,30	8,99	1,42	100,00
Jawa Timur	18,59	16,60	28,23	19,87	8,77	6,52	1,40	100,00
Banten	6,85	8,67	19,59	32,44	18,33	10,90	3,21	100,00
Bali	14,45	15,76	25,85	20,92	13,48	7,79	1,76	100,00
Nusa Tenggara Barat	39,30	21,47	17,96	9,12	6,58	4,12	1,46	100,00
Nusa Tenggara Timur	23,15	21,19	21,26	10,03	11,39	10,17	2,81	100,00
Kalimantan Barat	8,27	12,98	26,34	22,62	16,13	10,92	2,74	100,00
Kalimantan Tengah	11,41	11,31	23,36	20,18	17,31	13,52	2,91	100,00
Kalimantan Selatan	17,31	14,43	22,20	16,40	15,95	11,14	2,58	100,00
Kalimantan Timur	7,12	7,71	19,60	17,94	20,33	19,42	7,88	100,00
Sulawesi Utara	8,38	13,02	24,86	20,19	20,17	9,39	3,99	100,00
Sulawesi Tengah	7,03	15,84	26,13	20,38	16,24	11,18	3,20	100,00
Sulawesi Selatan	15,17	17,48	29,81	13,00	14,24	7,73	2,57	100,00
Sulawesi Tenggara	30,63	13,49	20,40	13,30	10,67	8,45	3,05	100,00
Gorontalo	23,83	17,86	21,51	13,31	12,57	8,82	2,10	100,00
Sulawesi Barat	21,41	18,33	21,38	15,68	13,21	9,54	0,45	100,00
Maluku	12,45	10,75	18,17	22,39	25,27	9,75	1,21	100,00
Maluku Utara	14,42	11,46	17,36	16,80	19,88	14,45	5,63	100,00
Irian Jaya Barat	5,40	10,06	15,57	17,70	28,24	17,01	6,01	100,00
Papua	1,90	5,86	14,25	16,38	25,37	26,18	10,06	100,00
INDONESIA	14,19	14,28	24,17	20,20	14,41	9,56	3,20	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.8.2 Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar menurut Provinsi dan Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan, Tahun 2007

Provinsi	Perdesaan							Jumlah
	< 300.000	300.000 499.999	500.000 749.999	750.000 999.999	1.000.000 1.499.999	1.500.000 2.499.999	2.500.000 +	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
NAD	11,72	13,19	23,91	21,85	18,52	9,42	1,40	100,00
Sumatera Utara	14,95	19,45	28,60	19,14	12,93	4,16	0,77	100,00
Sumatera Barat	20,45	18,21	28,25	16,72	10,13	5,22	1,02	100,00
Riau	11,96	11,73	29,10	21,09	15,27	9,14	1,73	100,00
Jambi	15,94	15,65	29,41	16,35	14,05	6,89	1,72	100,00
Sumatera Selatan	27,51	16,81	27,29	13,84	9,51	3,99	1,05	100,00
Bengkulu	15,96	17,22	29,90	17,99	12,63	5,40	0,91	100,00
Lampung	36,93	20,18	24,02	10,81	4,76	2,93	0,38	100,00
Bangka Belitung	7,64	16,03	27,34	25,81	18,16	4,66	0,36	100,00
Kepulauan Riau	29,74	12,90	26,87	10,89	11,32	5,63	2,64	100,00
DKI. Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	29,17	20,34	22,89	15,44	7,83	3,49	0,84	100,00
Jawa Tengah	37,05	22,96	23,87	9,53	4,14	1,93	0,52	100,00
DI. Yogyakarta	17,17	23,76	33,50	15,21	5,26	3,73	1,36	100,00
Jawa Timur	37,47	22,77	21,84	10,81	4,24	2,44	0,42	100,00
Banten	20,37	21,57	22,10	21,46	9,58	3,54	1,39	100,00
Bali	19,01	14,29	26,94	21,58	13,57	3,98	0,62	100,00
Nusa Tenggara Barat	47,55	20,15	15,25	8,73	4,92	2,43	0,96	100,00
Nusa Tenggara Timur	40,10	17,54	20,96	9,60	6,82	4,37	0,61	100,00
Kalimantan Barat	14,17	16,19	29,94	17,79	14,60	6,12	1,20	100,00
Kalimantan Tengah	8,65	10,03	27,56	21,22	18,18	11,69	2,66	100,00
Kalimantan Selatan	24,22	14,06	21,47	17,73	12,76	8,09	1,67	100,00
Kalimantan Timur	3,52	3,44	11,22	10,20	21,80	38,56	11,24	100,00
Sulawesi Utara	21,22	19,39	27,10	17,61	10,05	3,95	0,68	100,00
Sulawesi Tengah	29,89	24,98	22,71	9,54	7,47	4,21	1,21	100,00
Sulawesi Selatan	24,81	20,41	26,69	13,71	7,64	5,39	1,35	100,00
Sulawesi Tenggara	33,63	16,66	26,06	10,42	7,82	4,38	1,02	100,00
Gorontalo	42,84	19,15	19,15	8,97	5,63	3,44	0,83	100,00
Sulawesi Barat	28,58	20,87	25,00	12,59	8,89	2,91	1,18	100,00
Maluku	19,89	25,05	21,50	16,15	9,62	5,79	2,00	100,00
Maluku Utara	18,23	17,14	24,93	16,14	13,60	7,84	2,12	100,00
Irian Jaya Barat	3,36	4,59	14,99	16,32	30,18	24,69	5,88	100,00
Papua	10,05	21,08	36,51	7,12	13,66	7,96	3,62	100,00
INDONESIA	27,91	19,61	24,30	14,16	8,50	4,47	1,05	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 5.8.3 Persentase Pemuda yang Bekerja dan Berusaha atau Dibayar menurut Provinsi dan Pendapatan/Upah/Gaji Bersih Sebulan, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan							Jumlah
	< 300.000	300.000 499.999	500.000 749.999	750.000 999.999	1.000.000 1.499.999	1.500.000 2.499.999	2.500.000 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
NAD	12,32	11,33	21,91	19,55	20,21	12,45	2,23	100,00
Sumatera Utara	13,02	14,28	27,05	23,32	15,21	6,02	1,10	100,00
Sumatera Barat	19,36	16,65	28,15	16,30	11,94	6,34	1,25	100,00
Riau	10,66	12,16	26,66	20,77	16,62	10,28	2,85	100,00
Jambi	15,14	16,58	26,79	16,69	14,36	8,14	2,31	100,00
Sumatera Selatan	24,34	14,69	26,20	15,86	10,53	6,80	1,56	100,00
Bengkulu	14,74	15,26	28,22	17,32	14,72	8,39	1,35	100,00
Lampung	32,46	19,67	25,84	11,75	5,44	4,28	0,57	100,00
Bangka Belitung	8,68	13,71	26,21	25,29	19,52	5,48	1,11	100,00
Kepulauan Riau	9,45	5,48	15,61	11,67	23,37	23,27	11,17	100,00
DKI. Jakarta	3,80	5,45	16,77	25,65	24,52	16,20	7,61	100,00
Jawa Barat	19,91	16,61	22,97	20,19	11,65	6,45	2,22	100,00
Jawa Tengah	31,15	24,29	26,90	9,37	4,85	2,76	0,68	100,00
DI. Yogyakarta	12,75	22,29	34,10	14,83	7,33	7,30	1,40	100,00
Jawa Timur	27,62	19,55	25,18	15,54	6,61	4,57	0,93	100,00
Banten	11,80	13,40	20,51	28,42	15,13	8,20	2,54	100,00
Bali	16,35	15,15	26,31	21,19	13,52	6,20	1,29	100,00
Nusa Tenggara Barat	44,08	20,70	16,39	8,90	5,62	3,14	1,17	100,00
Nusa Tenggara Timur	34,82	18,67	21,06	9,73	8,24	6,17	1,30	100,00
Kalimantan Barat	12,05	15,03	28,65	19,53	15,15	7,85	1,75	100,00
Kalimantan Tengah	9,63	10,49	26,07	20,85	17,87	12,34	2,75	100,00
Kalimantan Selatan	21,12	14,22	21,80	17,13	14,19	9,46	2,08	100,00
Kalimantan Timur	5,70	6,02	16,29	14,88	20,91	26,99	9,21	100,00
Sulawesi Utara	15,63	16,61	26,13	18,73	14,46	6,32	2,12	100,00
Sulawesi Tengah	22,84	22,16	23,76	12,88	10,17	6,36	1,82	100,00
Sulawesi Selatan	20,16	19,00	28,20	13,37	10,83	6,52	1,94	100,00
Sulawesi Tenggara	32,69	15,67	24,29	11,32	8,72	5,66	1,66	100,00
Gorontalo	36,84	18,74	19,90	10,34	7,82	5,13	1,23	100,00
Sulawesi Barat	26,57	20,16	23,98	13,45	10,10	4,77	0,97	100,00
Maluku	17,05	19,59	20,23	18,53	15,60	7,30	1,70	100,00
Maluku Utara	16,91	15,17	22,30	16,37	15,78	10,13	3,34	100,00
Irian Jaya Barat	4,32	7,16	15,26	16,97	29,27	21,08	5,94	100,00
Papua	7,47	16,26	29,47	10,05	17,36	13,72	5,66	100,00
INDONESIA	20,68	16,80	24,23	17,34	11,61	7,15	2,18	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Sakernas 2007

Tabel 6.1 Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	29,01	34,28	32,97
Sumatera Utara	15,85	22,24	19,25
Sumatera Barat	23,06	24,52	24,02
Riau	26,22	23,75	24,65
Jambi	13,19	16,40	15,44
Sumatera Selatan	23,58	24,52	24,18
Bengkulu	26,49	26,17	26,26
Lampung	28,50	29,73	29,44
Bangka Belitung	26,17	32,39	29,93
Kepulauan Riau	24,19	28,64	24,93
DKI. Jakarta	23,62	-	23,62
Jawa Barat	18,58	23,01	20,52
Jawa Tengah	18,64	19,64	19,19
DI. Yogyakarta	31,90	27,68	30,56
Jawa Timur	21,59	21,26	21,41
Banten	22,73	20,73	21,89
Bali	24,32	28,51	26,14
Nusa Tenggara Barat	29,73	30,78	30,36
Nusa Tenggara Timur	34,17	39,23	38,15
Kalimantan Barat	23,34	24,21	23,96
Kalimantan Tengah	17,80	21,90	20,63
Kalimantan Selatan	31,70	24,25	27,21
Kalimantan Timur	18,97	20,07	19,46
Sulawesi Utara	19,63	32,27	27,42
Sulawesi Tengah	30,65	32,12	31,79
Sulawesi Selatan	22,19	21,99	22,06
Sulawesi Tenggara	34,33	28,10	29,67
Gorontalo	23,15	41,11	36,33
Sulawesi Barat	14,31	31,60	28,79
Maluku	26,05	25,05	25,39
Maluku Utara	25,68	28,67	27,83
Irian Jaya Barat	31,93	23,00	25,99
Papua	27,77	26,73	27,04
INDONESIA	21,68	24,16	23,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 6.2.1 Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Jenis Keluhan, Tahun 2007

Provinsi	Panas	Batuk	Pilek	Asma	Diare	Sakit Kepala	Sakit Gigi	Perkotaan
								Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Daruss	49,66	46,03	48,49	4,64	8,23	35,30	14,87	28,66
Sumatera Utara	44,34	38,00	35,14	4,10	10,50	16,72	8,61	35,84
Sumatera Barat	42,22	39,26	39,05	3,02	8,71	24,44	9,52	37,47
Riau	48,20	41,40	41,59	3,72	6,45	27,54	12,57	31,54
Jambi	39,29	38,02	39,12	3,55	13,22	19,74	8,42	38,03
Sumatera Selatan	37,35	32,24	36,59	5,63	4,42	20,68	6,19	40,95
Bengkulu	41,59	42,17	41,68	4,06	2,54	23,39	13,93	34,57
Lampung	43,52	40,93	40,44	4,82	6,15	27,96	8,13	39,28
Bangka Belitung	35,87	41,20	42,18	6,35	7,26	28,71	15,86	48,42
Kepulauan Riau	46,45	44,45	43,46	2,94	7,80	21,95	10,31	24,36
DKI. Jakarta	31,87	45,31	44,84	4,10	8,50	21,56	4,68	31,86
Jawa Barat	40,53	39,86	39,83	5,54	5,86	19,00	8,14	39,24
Jawa Tengah	32,49	40,06	41,75	3,32	4,37	23,32	4,90	37,62
DI. Yogyakarta	31,01	36,84	38,51	6,27	6,95	20,43	8,31	37,91
Jawa Timur	39,26	44,79	44,19	3,62	5,93	17,36	6,17	32,07
Banten	34,97	34,60	34,45	3,02	5,65	21,88	5,66	35,59
Bali	53,93	42,23	40,21	6,21	4,82	24,98	4,16	32,85
Nusa Tenggara Barat	58,56	44,96	43,10	7,38	5,35	26,98	5,93	29,13
Nusa Tenggara Timur	48,93	54,67	59,09	6,08	7,18	29,17	12,68	32,00
Kalimantan Barat	39,38	33,31	36,06	7,19	4,85	29,59	10,03	31,83
Kalimantan Tengah	29,68	35,28	35,11	9,38	7,98	28,30	9,76	35,96
Kalimantan Selatan	32,31	31,79	36,71	7,52	10,29	33,70	11,05	38,44
Kalimantan Timur	27,91	34,46	37,65	4,76	5,80	25,86	10,80	38,11
Sulawesi Utara	36,99	51,95	51,29	4,98	7,24	32,20	10,19	22,51
Sulawesi Tengah	41,30	37,81	45,87	7,98	8,65	41,67	12,34	42,94
Sulawesi Selatan	41,60	38,22	40,79	3,68	6,00	25,70	7,07	28,78
Sulawesi Tenggara	43,93	39,12	40,77	5,89	7,23	40,93	14,11	26,91
Gorontalo	60,20	41,62	38,74	3,84	11,02	21,32	10,14	30,12
Sulawesi Barat	18,31	32,26	34,17	3,41	15,64	37,38	13,09	40,97
Maluku	41,10	36,09	35,23	6,85	4,24	16,81	13,21	41,96
Maluku Utara	49,92	40,75	38,79	2,70	4,67	35,71	6,90	36,06
Irian Jaya Barat	42,11	41,43	38,25	6,49	5,64	35,57	13,59	49,45
Papua	45,25	39,70	39,38	4,62	5,64	28,88	5,66	44,58
INDONESIA	39,28	40,86	41,15	4,58	6,45	22,40	7,50	35,12

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 6.2.2 Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Jenis Keluhan, Tahun 2007

Provinsi	Panas	Batuk	Pilek	Asma	Diare	Sakit Kepala	Sakit Gigi	Lainnya	Perdesaan
									(1)
Nanggroe Aceh Daruss	48,02	47,00	46,44	7,59	11,01	38,09	17,71	31,65	
Sumatera Utara	41,38	35,14	33,59	4,38	13,47	24,78	7,20	33,18	
Sumatera Barat	44,28	34,93	34,93	4,05	8,51	29,22	9,51	34,80	
Riau	41,36	41,96	40,58	4,86	9,63	32,89	14,02	34,91	
Jambi	35,66	32,31	31,51	4,36	7,33	21,76	9,92	34,03	
Sumatera Selatan	37,05	40,99	42,54	5,25	5,85	32,18	12,28	34,09	
Bengkulu	41,38	42,10	40,94	4,66	5,80	23,92	15,69	29,64	
Lampung	35,36	38,17	36,56	3,35	5,74	26,63	10,56	44,24	
Bangka Belitung	44,82	42,97	42,56	8,37	8,62	38,96	15,21	36,93	
Kepulauan Riau	48,46	49,37	43,98	12,64	12,12	36,81	18,57	27,46	
DKI. Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jawa Barat	39,12	37,92	39,77	6,35	6,34	21,08	8,61	40,14	
Jawa Tengah	34,08	42,12	41,64	3,32	6,46	24,35	6,89	43,12	
DI. Yogyakarta	24,72	43,31	48,48	3,71	4,02	9,79	10,29	39,14	
Jawa Timur	39,18	40,90	39,66	4,11	7,93	21,77	11,68	31,72	
Banten	42,95	41,83	42,25	8,87	8,02	35,95	5,15	34,61	
Bali	56,78	42,69	45,57	4,81	4,99	21,27	8,53	29,50	
Nusa Tenggara Barat	51,84	38,84	42,72	7,18	7,79	28,12	8,25	42,14	
Nusa Tenggara Timur	63,04	60,50	55,88	6,82	7,84	37,84	11,12	36,93	
Kalimantan Barat	47,22	44,52	43,91	7,28	8,63	31,45	11,61	35,45	
Kalimantan Tengah	47,79	45,63	45,06	7,94	8,75	45,40	17,23	26,01	
Kalimantan Selatan	35,21	32,88	30,71	5,28	6,16	32,34	13,75	39,74	
Kalimantan Timur	30,41	38,48	38,44	4,56	6,26	26,11	11,76	33,48	
Sulawesi Utara	49,76	50,24	48,36	3,44	8,14	30,52	15,71	28,34	
Sulawesi Tengah	50,69	38,98	37,49	5,52	9,16	37,13	11,98	34,56	
Sulawesi Selatan	36,68	29,23	29,02	5,69	7,23	28,88	13,50	34,54	
Sulawesi Tenggara	46,97	38,75	34,23	4,72	6,09	31,50	12,88	29,31	
Gorontalo	76,27	60,82	50,08	7,02	9,80	24,87	11,68	18,23	
Sulawesi Barat	39,23	36,34	33,61	5,12	9,38	42,90	17,27	33,23	
Maluku	42,30	46,72	41,89	5,21	6,19	27,91	20,09	35,14	
Maluku Utara	55,50	44,54	27,95	5,18	5,82	29,63	8,90	32,45	
Irian Jaya Barat	48,58	40,33	41,38	5,31	6,12	32,26	5,03	38,35	
Papua	37,50	42,72	35,14	6,36	7,37	30,02	10,01	35,52	
INDONESIA	42,29	41,13	40,22	5,31	7,73	27,81	10,87	35,79	

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 6.2.3 Proporsi Pemuda yang Mempunyai Keluhan Kesehatan selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Jenis Keluhan, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan							
	Panas	Batuk	Pilek	Asma	Diare	Sakit Kepala	Sakit Gigi	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Nanggroe Aceh Daruss	48,39	46,78	46,90	6,92	10,38	37,46	17,07	30,98
Sumatera Utara	42,40	36,12	34,13	4,28	12,44	22,00	7,68	34,10
Sumatera Barat	43,68	36,19	36,12	3,75	8,57	27,84	9,51	35,57
Riau	43,62	41,77	40,91	4,48	8,58	31,12	13,54	33,79
Jambi	36,57	33,75	33,42	4,15	8,81	21,25	9,54	35,03
Sumatera Selatan	37,14	38,36	40,75	5,37	5,42	28,72	10,45	36,15
Bengkulu	41,44	42,12	41,14	4,49	4,92	23,77	15,21	30,98
Lampung	37,02	38,73	37,36	3,65	5,83	26,90	10,06	43,23
Bangka Belitung	41,79	42,37	42,43	7,69	8,16	35,49	15,43	40,82
Kepulauan Riau	46,88	45,51	43,57	5,02	8,73	25,14	12,08	25,03
DKI. Jakarta	31,87	45,31	44,84	4,10	8,50	21,56	4,68	31,86
Jawa Barat	39,83	38,90	39,80	5,95	6,10	20,03	8,38	39,69
Jawa Tengah	33,42	41,27	41,69	3,32	5,59	23,93	6,07	40,85
DI. Yogyakarta	28,59	39,33	42,35	5,28	5,82	16,34	9,07	38,39
Jawa Timur	39,21	42,54	41,57	3,90	7,08	19,91	9,36	31,87
Banten	38,24	37,56	37,64	5,41	6,62	27,64	5,45	35,19
Bali	55,52	42,49	43,19	5,43	4,91	22,92	6,59	30,99
Nusa Tenggara Barat	54,48	41,24	42,87	7,26	6,84	27,68	7,34	37,04
Nusa Tenggara Timur	61,11	59,70	56,32	6,72	7,75	36,65	11,34	36,26
Kalimantan Barat	45,34	41,83	42,02	7,26	7,72	31,00	11,23	34,58
Kalimantan Tengah	43,31	43,07	42,60	8,29	8,56	41,17	15,38	28,47
Kalimantan Selatan	34,17	32,49	32,86	6,08	7,65	32,83	12,78	39,27
Kalimantan Timur	29,16	36,46	38,04	4,66	6,03	25,98	11,28	35,81
Sulawesi Utara	46,62	50,66	49,08	3,82	7,92	30,93	14,35	26,90
Sulawesi Tengah	49,01	38,77	38,99	5,96	9,07	37,95	12,04	36,06
Sulawesi Selatan	38,29	32,18	32,88	5,03	6,83	27,84	11,40	32,65
Sulawesi Tenggara	46,26	38,83	35,75	4,99	6,35	33,70	13,17	28,75
Gorontalo	73,35	57,33	48,02	6,44	10,02	24,22	11,40	20,39
Sulawesi Barat	38,09	36,12	33,64	5,03	9,72	42,60	17,04	33,65
Maluku	41,96	43,71	40,00	5,68	5,64	24,77	18,15	37,07
Maluku Utara	54,41	43,80	30,07	4,69	5,60	30,82	8,51	33,16
Irian Jaya Barat	45,71	40,82	39,99	5,83	5,91	33,73	8,83	43,27
Papua	39,88	41,80	36,44	5,83	6,84	29,67	8,67	38,31
INDONESIA	41,09	41,02	40,59	5,02	7,22	25,65	9,52	35,52

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 6.3.1 Persentase Pemuda yang Sakit Selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, Tahun 2007

Provinsi	Lamanya Sakit (hari)					Jumlah
	1 - 3	4 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 30	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Nanggroe Aceh Darus:	47,83	37,92	7,77	2,29	4,20	100,00
Sumatera Utara	52,38	31,80	5,62	4,09	6,12	100,00
Sumatera Barat	51,11	36,14	3,89	5,88	2,98	100,00
Riau	60,71	29,52	4,21	1,32	4,24	100,00
Jambi	54,26	34,07	3,80	2,84	5,03	100,00
Sumatera Selatan	51,80	32,85	6,61	2,26	6,48	100,00
Bengkulu	54,95	35,01	5,39	1,63	3,02	100,00
Lampung	55,27	29,03	7,20	5,02	3,47	100,00
Bangka Belitung	59,36	27,07	5,28	3,87	4,42	100,00
Kepulauan Riau	69,75	24,55	2,64	0,69	2,37	100,00
DKI. Jakarta	64,96	26,17	4,34	1,91	2,62	100,00
Jawa Barat	48,18	36,02	8,02	3,42	4,35	100,00
Jawa Tengah	58,33	29,10	5,39	3,30	3,88	100,00
DI. Yogyakarta	61,41	26,46	5,57	2,13	4,43	100,00
Jawa Timur	55,40	32,90	5,25	3,05	3,40	100,00
Banten	53,19	33,48	5,66	3,31	4,37	100,00
Bali	64,04	27,22	3,92	1,41	3,40	100,00
Nusa Tenggara Barat	38,73	46,96	7,83	3,46	3,02	100,00
Nusa Tenggara Timur	53,75	31,98	6,26	3,01	5,01	100,00
Kalimantan Barat	49,82	35,91	5,65	1,67	6,94	100,00
Kalimantan Tengah	55,90	30,93	4,32	2,34	6,51	100,00
Kalimantan Selatan	64,74	27,32	1,14	1,87	4,93	100,00
Kalimantan Timur	53,80	32,74	6,30	1,74	5,43	100,00
Sulawesi Utara	57,29	29,29	8,57	1,42	3,44	100,00
Sulawesi Tengah	55,30	34,63	5,80	2,41	1,87	100,00
Sulawesi Selatan	55,69	30,48	6,13	2,69	5,01	100,00
Sulawesi Tenggara	52,71	35,99	6,82	2,00	2,48	100,00
Gorontalo	55,06	31,50	8,05	3,42	1,97	100,00
Sulawesi Barat	51,59	25,21	12,35	2,55	8,30	100,00
Maluku	56,07	35,32	3,01	3,21	2,39	100,00
Maluku Utara	51,11	36,37	7,80	1,08	3,64	100,00
Irian Jaya Barat	56,43	32,37	4,41	1,25	5,54	100,00
Papua	51,63	35,52	6,64	2,11	4,10	100,00
INDONESIA	54,91	32,29	5,89	2,89	4,02	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 6.3.2 Persentase Pemuda yang Sakit Selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, Tahun 2007

Provinsi	Lamanya Sakit (hari)					Jumlah
	1 - 3	4 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 30	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Nanggroe Aceh Darus:	44,51	40,94	7,36	3,22	3,96	100,00
Sumatera Utara	43,89	38,36	7,36	3,21	7,18	100,00
Sumatera Barat	43,30	37,37	6,38	6,81	6,14	100,00
Riau	53,58	31,45	5,27	4,27	5,43	100,00
Jambi	45,73	37,94	6,26	3,37	6,71	100,00
Sumatera Selatan	51,74	34,97	6,20	2,92	4,16	100,00
Bengkulu	41,26	44,35	8,43	3,11	2,85	100,00
Lampung	50,18	36,59	4,31	5,59	3,33	100,00
Bangka Belitung	51,25	34,40	6,38	3,80	4,17	100,00
Kepulauan Riau	44,52	40,33	6,31	4,42	4,43	100,00
DKI. Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	41,18	38,68	8,52	4,01	7,61	100,00
Jawa Tengah	48,31	34,63	5,62	4,01	7,43	100,00
DI. Yogyakarta	58,54	29,77	5,27	3,21	3,20	100,00
Jawa Timur	47,25	38,13	5,75	3,93	4,94	100,00
Banten	41,19	38,32	9,09	4,21	7,19	100,00
Bali	58,54	29,11	3,92	2,91	5,52	100,00
Nusa Tenggara Barat	36,15	44,91	10,61	3,54	4,79	100,00
Nusa Tenggara Timur	38,28	45,83	8,83	1,96	5,10	100,00
Kalimantan Barat	46,67	37,55	8,20	2,67	4,90	100,00
Kalimantan Tengah	52,19	36,07	5,39	2,17	4,17	100,00
Kalimantan Selatan	57,21	34,41	2,76	2,69	2,93	100,00
Kalimantan Timur	47,15	39,00	6,99	3,22	3,65	100,00
Sulawesi Utara	49,70	38,33	7,58	1,90	2,49	100,00
Sulawesi Tengah	42,91	41,43	8,26	2,88	4,53	100,00
Sulawesi Selatan	45,59	35,52	8,09	3,51	7,30	100,00
Sulawesi Tenggara	43,66	40,04	9,28	3,35	3,67	100,00
Gorontalo	36,87	43,09	11,44	3,30	5,30	100,00
Sulawesi Barat	45,02	37,98	8,33	2,99	5,69	100,00
Maluku	35,28	46,67	10,47	3,72	3,87	100,00
Maluku Utara	31,12	46,23	13,81	2,55	6,29	100,00
Irian Jaya Barat	48,34	37,13	8,08	2,56	3,89	100,00
Papua	46,29	40,23	10,01	0,98	2,49	100,00
INDONESIA	45,54	38,17	7,16	3,60	5,53	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 6.3.3 Persentase Pemuda yang Sakit Selama Sebulan yang Lalu menurut Provinsi dan Lamanya Sakit, Tahun 2007

Provinsi	Lamanya Sakit (hari)					Jumlah
	1 - 3	4 - 7	8 - 14	15 - 21	22 - 30	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Nanggroe Aceh Darus:	45,26	40,26	7,45	3,01	4,02	100,00
Sumatera Utara	46,81	36,10	6,76	3,51	6,82	100,00
Sumatera Barat	45,57	37,01	5,66	6,54	5,22	100,00
Riau	55,93	30,81	4,92	3,30	5,03	100,00
Jambi	47,87	36,97	5,64	3,23	6,29	100,00
Sumatera Selatan	51,76	34,33	6,33	2,72	4,86	100,00
Bengkulu	44,97	41,82	7,60	2,71	2,89	100,00
Lampung	51,22	35,05	4,90	5,47	3,36	100,00
Bangka Belitung	54,00	31,92	6,01	3,82	4,26	100,00
Kepulauan Riau	64,34	27,93	3,43	1,49	2,81	100,00
DKI. Jakarta	64,96	26,17	4,34	1,91	2,62	100,00
Jawa Barat	44,70	37,34	8,27	3,71	5,97	100,00
Jawa Tengah	52,45	32,34	5,53	3,72	5,96	100,00
DI. Yogyakarta	60,31	27,73	5,45	2,54	3,96	100,00
Jawa Timur	50,69	35,92	5,54	3,56	4,29	100,00
Banten	48,28	35,46	7,06	3,68	5,52	100,00
Bali	60,98	28,27	3,92	2,25	4,58	100,00
Nusa Tenggara Barat	37,16	45,72	9,52	3,51	4,10	100,00
Nusa Tenggara Timur	40,39	43,94	8,47	2,11	5,09	100,00
Kalimantan Barat	47,43	37,16	7,59	2,43	5,39	100,00
Kalimantan Tengah	53,11	34,80	5,13	2,22	4,75	100,00
Kalimantan Selatan	59,91	31,87	2,18	2,40	3,65	100,00
Kalimantan Timur	50,49	35,86	6,64	2,47	4,54	100,00
Sulawesi Utara	51,57	36,11	7,82	1,78	2,72	100,00
Sulawesi Tengah	45,13	40,21	7,82	2,79	4,05	100,00
Sulawesi Selatan	48,90	33,86	7,45	3,24	6,55	100,00
Sulawesi Tenggara	45,77	39,09	8,71	3,04	3,40	100,00
Gorontalo	40,18	40,99	10,82	3,32	4,69	100,00
Sulawesi Barat	45,38	37,28	8,55	2,96	5,83	100,00
Maluku	41,16	43,46	8,36	3,57	3,45	100,00
Maluku Utara	35,04	44,30	12,63	2,26	5,77	100,00
Irian Jaya Barat	51,93	35,02	6,45	1,98	4,62	100,00
Papua	47,93	38,78	8,97	1,33	2,98	100,00
INDONESIA	49,29	35,82	6,65	3,32	4,92	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 6.4.1 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Provinsi dan Umur saat Perkawinan Pertama, Tahun 2007

Provinsi	Umur Perkawinan Pertama (tahun)					Perkotaan
	< 16	16	17 - 18	19 - 24	25 +	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nanggroe Aceh Darus:	2,58	3,45	17,04	58,33	18,59	100,00
Sumatera Utara	1,41	2,46	15,06	60,49	20,58	100,00
Sumatera Barat	1,82	2,62	10,20	56,56	28,80	100,00
Riau	1,80	2,38	13,89	60,58	21,36	100,00
Jambi	4,46	4,92	18,42	53,80	18,40	100,00
Sumatera Selatan	4,06	6,19	16,02	56,54	17,20	100,00
Bengkulu	3,52	6,14	15,06	58,65	16,63	100,00
Lampung	3,10	5,59	17,37	55,82	18,12	100,00
Bangka Belitung	2,36	5,36	17,45	58,48	16,35	100,00
Kepulauan Riau	1,55	2,23	12,21	61,59	22,42	100,00
DKI. Jakarta	2,35	3,93	14,85	56,54	22,34	100,00
Jawa Barat	4,91	6,72	22,72	53,84	11,82	100,00
Jawa Tengah	2,48	4,41	19,66	58,20	15,25	100,00
DI. Yogyakarta	0,67	2,63	12,18	57,39	27,14	100,00
Jawa Timur	3,63	6,03	18,53	56,39	15,42	100,00
Banten	4,95	6,10	20,85	53,70	14,41	100,00
Bali	1,82	4,22	13,07	62,04	18,84	100,00
Nusa Tenggara Barat	5,24	7,59	25,79	53,02	8,35	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,17	3,22	17,75	54,64	23,22	100,00
Kalimantan Barat	4,19	5,58	19,99	55,06	15,18	100,00
Kalimantan Tengah	6,03	7,10	23,35	52,94	10,57	100,00
Kalimantan Selatan	7,15	6,79	24,50	50,51	11,05	100,00
Kalimantan Timur	4,46	4,37	17,49	55,81	17,88	100,00
Sulawesi Utara	2,58	6,52	18,83	55,93	16,15	100,00
Sulawesi Tengah	4,41	3,92	20,25	53,48	17,94	100,00
Sulawesi Selatan	5,73	5,99	18,23	53,34	16,71	100,00
Sulawesi Tenggara	5,24	5,45	21,16	50,96	17,20	100,00
Gorontalo	5,46	5,99	20,24	51,86	16,45	100,00
Sulawesi Barat	9,74	7,25	25,13	48,78	9,11	100,00
Maluku	2,96	3,76	16,31	57,69	19,29	100,00
Maluku Utara	2,91	3,46	21,85	56,38	15,39	100,00
Irian Jaya Barat	2,90	5,69	16,58	56,81	18,01	100,00
Papua	5,83	4,36	13,73	58,56	17,51	100,00
INDONESIA	3,63	5,28	18,89	56,04	16,17	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 6.4.2 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Provinsi dan Umur saat Perkawinan Pertama, Tahun 2007

Provinsi	Umur Perkawinan Pertama (tahun)					Jumlah
	< 16	16	17 - 18	19 - 24	25 +	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Nanggroe Aceh Darus:	6,93	7,55	28,30	47,85	9,37	100,00
Sumatera Utara	2,70	5,58	21,78	59,31	10,63	100,00
Sumatera Barat	4,88	6,53	21,77	54,46	12,36	100,00
Riau	5,95	8,61	27,33	49,38	8,73	100,00
Jambi	9,23	11,63	30,95	42,59	5,60	100,00
Sumatera Selatan	8,88	11,50	30,80	43,67	5,15	100,00
Bengkulu	10,23	12,01	29,03	43,76	4,97	100,00
Lampung	8,14	8,66	27,41	49,89	5,90	100,00
Bangka Belitung	4,43	9,43	29,62	49,51	7,02	100,00
Kepulauan Riau	6,62	7,43	26,33	51,57	8,05	100,00
DKI. Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	13,27	14,28	35,28	33,11	4,05	100,00
Jawa Tengah	5,68	10,81	29,60	46,55	7,36	100,00
DI. Yogyakarta	1,40	4,67	20,22	59,63	14,09	100,00
Jawa Timur	9,29	12,92	29,67	40,78	7,34	100,00
Banten	14,51	13,95	31,52	37,20	2,82	100,00
Bali	2,26	6,09	23,17	58,72	9,76	100,00
Nusa Tenggara Barat	6,70	12,01	32,58	43,31	5,40	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,38	5,54	23,27	57,30	11,51	100,00
Kalimantan Barat	7,82	9,20	29,23	47,43	6,32	100,00
Kalimantan Tengah	10,64	13,01	32,56	38,13	5,66	100,00
Kalimantan Selatan	11,14	13,07	30,48	39,29	6,02	100,00
Kalimantan Timur	9,89	8,77	25,25	49,57	6,53	100,00
Sulawesi Utara	3,51	8,43	24,46	52,02	11,58	100,00
Sulawesi Tengah	9,24	9,76	29,67	44,22	7,11	100,00
Sulawesi Selatan	10,64	10,35	26,71	44,24	8,07	100,00
Sulawesi Tenggara	11,12	10,43	32,16	40,44	5,85	100,00
Gorontalo	8,29	10,35	26,63	47,64	7,10	100,00
Sulawesi Barat	12,96	13,62	29,15	39,59	4,68	100,00
Maluku	5,03	6,03	23,04	55,97	9,93	100,00
Maluku Utara	7,38	9,30	27,78	48,39	7,15	100,00
Irian Jaya Barat	7,66	8,05	25,28	51,44	7,57	100,00
Papua	9,26	11,47	31,35	42,35	5,58	100,00
INDONESIA	8,58	11,00	29,45	44,08	6,89	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 6.4.3 Persentase Pemuda Perempuan yang Pernah Kawin menurut Provinsi dan Umur saat Perkawinan Pertama, Tahun 2007

Provinsi	Umur Perkawinan Pertama (tahun)					Jumlah
	< 16	16	17 - 18	19 - 24	25 +	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
Nanggroe Aceh Darus:	5,97	6,65	25,81	50,16	11,41	100,00
Sumatera Utara	2,16	4,27	18,95	59,81	14,82	100,00
Sumatera Barat	4,00	5,40	18,43	55,07	17,10	100,00
Riau	4,60	6,59	22,96	53,01	12,83	100,00
Jambi	8,04	9,96	27,82	45,39	8,80	100,00
Sumatera Selatan	7,43	9,90	26,35	47,54	8,78	100,00
Bengkulu	8,59	10,58	25,63	47,39	7,82	100,00
Lampung	7,16	8,06	25,45	51,05	8,28	100,00
Bangka Belitung	3,65	7,90	25,05	52,88	10,53	100,00
Kepulauan Riau	2,54	3,24	14,97	59,64	19,61	100,00
DKI. Jakarta	2,35	3,93	14,85	56,54	22,34	100,00
Jawa Barat	9,03	10,44	28,91	43,63	7,99	100,00
Jawa Tengah	4,43	8,31	25,72	51,10	10,44	100,00
DI. Yogyakarta	0,97	3,47	15,49	58,31	21,77	100,00
Jawa Timur	7,07	10,21	25,29	46,91	10,51	100,00
Banten	9,32	9,69	25,73	46,15	9,10	100,00
Bali	2,03	5,09	17,75	60,50	14,63	100,00
Nusa Tenggara Barat	6,17	10,40	30,11	46,84	6,47	100,00
Nusa Tenggara Timur	2,20	5,18	22,41	56,88	13,33	100,00
Kalimantan Barat	6,96	8,34	27,05	49,24	8,42	100,00
Kalimantan Tengah	9,28	11,27	29,85	42,49	7,11	100,00
Kalimantan Selatan	9,62	10,67	28,20	43,57	7,94	100,00
Kalimantan Timur	7,09	6,50	21,25	52,78	12,38	100,00
Sulawesi Utara	3,18	7,76	22,49	53,39	13,18	100,00
Sulawesi Tengah	8,34	8,68	27,93	45,94	9,12	100,00
Sulawesi Selatan	9,12	9,00	24,09	47,05	10,73	100,00
Sulawesi Tenggara	9,94	9,43	29,94	42,55	8,13	100,00
Gorontalo	7,61	9,31	25,11	48,64	9,32	100,00
Sulawesi Barat	12,55	12,81	28,64	40,75	5,24	100,00
Maluku	4,44	5,39	21,15	56,45	12,56	100,00
Maluku Utara	6,37	7,98	26,45	50,19	9,01	100,00
Irian Jaya Barat	6,15	7,30	22,52	53,15	10,88	100,00
Papua	8,39	9,67	26,89	46,45	8,60	100,00
INDONESIA	6,52	8,62	25,06	49,05	10,74	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 6.5 Proporsi Pemuda Perempuan Berstatus Kawin yang Pernah Menggunakan Alat/Cara KB menurut Provinsi dan Tipe Daerah, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Nanggroe Aceh Darussalam	71,38	68,29	68,99
Sumatera Utara	67,76	61,16	63,95
Sumatera Barat	73,96	73,47	73,61
Riau	70,72	79,96	76,96
Jambi	83,32	84,58	84,27
Sumatera Selatan	77,60	83,69	81,88
Bengkulu	79,25	86,48	84,71
Lampung	77,98	86,23	84,67
Bangka Belitung	81,31	84,47	83,28
Kepulauan Riau	75,57	80,53	76,54
DKI. Jakarta	78,45	-	78,45
Jawa Barat	84,68	87,81	86,22
Jawa Tengah	77,41	80,90	79,53
DI. Yogyakarta	70,65	72,80	71,53
Jawa Timur	77,86	79,25	78,70
Banten	83,09	83,09	83,09
Bali	80,46	84,97	82,57
Nusa Tenggara Barat	77,59	76,91	77,16
Nusa Tenggara Timur	58,53	52,36	53,33
Kalimantan Barat	78,03	83,01	81,84
Kalimantan Tengah	82,99	86,15	85,23
Kalimantan Selatan	85,75	87,50	86,83
Kalimantan Timur	76,52	79,39	77,92
Sulawesi Utara	82,77	89,79	87,34
Sulawesi Tengah	75,32	79,96	79,10
Sulawesi Selatan	66,02	66,67	66,47
Sulawesi Tenggara	66,53	69,79	69,13
Gorontalo	84,84	82,98	83,41
Sulawesi Barat	53,45	61,64	60,61
Maluku	67,42	40,57	48,05
Maluku Utara	69,50	63,16	64,59
Irian Jaya Barat	63,55	37,26	45,65
Papua	63,44	42,04	47,40
INDONESIA	78,44	78,58	78,52

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 6.6 Persentase Pemuda Perempuan Berstatus Kawin menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Partisipasi dalam Program KB, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nanggroe Aceh Daruss:	28,62	50,61	20,78	31,71	48,58	19,71	31,01	49,03	19,95
Sumatera Utara	32,24	49,78	17,98	38,84	44,76	16,39	36,05	46,88	17,06
Sumatera Barat	26,04	52,32	21,64	26,53	54,21	19,25	26,39	53,66	19,95
Riau	29,28	52,21	18,50	20,04	63,31	16,65	23,04	59,71	17,25
Jambi	16,68	66,28	17,04	15,42	69,29	15,28	15,73	68,55	15,72
Sumatera Selatan	22,40	60,43	17,17	16,31	70,75	12,94	18,12	67,68	14,20
Bengkulu	20,75	63,30	15,95	13,52	73,61	12,87	15,29	71,08	13,63
Lampung	22,02	62,17	15,80	13,77	70,07	16,16	15,33	68,58	16,09
Bangka Belitung	18,69	65,01	16,30	15,53	71,47	13,00	16,72	69,04	14,24
Kepulauan Riau	24,43	51,08	24,49	19,47	65,05	15,48	23,46	53,81	22,73
DKI. Jakarta	21,55	59,94	18,52	-	-	-	21,55	59,94	18,52
Jawa Barat	15,32	67,21	17,47	12,19	71,26	16,55	13,78	69,20	17,02
Jawa Tengah	22,59	61,62	15,79	19,10	65,24	15,67	20,47	63,82	15,72
DI. Yogyakarta	29,35	54,97	15,68	27,20	62,01	10,78	28,47	57,85	13,68
Jawa Timur	22,14	63,27	14,58	20,75	64,65	14,60	21,30	64,11	14,60
Banten	16,91	64,72	18,36	16,91	63,93	19,16	16,91	64,36	18,72
Bali	19,54	64,96	15,50				17,43	68,23	14,35
Nusa Tenggara Barat	22,41	55,77	21,82	23,09	54,60	22,31	22,84	55,03	22,13
Nusa Tenggara Timur	41,47	42,14	16,39	47,64	38,32	14,03	46,67	38,92	14,40
Kalimantan Barat	21,97	60,08	17,96				18,16	66,39	15,45
Kalimantan Tengah	17,01	68,41	14,57	13,85	74,48	11,67	14,77	72,71	12,52
Kalimantan Selatan	14,25	67,57	18,18	12,50	71,40	16,10	13,17	69,94	16,89
Kalimantan Timur	23,48	57,88	18,64	20,61	63,85	15,54	22,08	60,79	17,13
Sulawesi Utara	17,23	64,69	18,08				12,66	73,28	14,06
Sulawesi Tengah	24,68	61,22	14,10	20,04	63,42	16,54	20,90	63,01	16,09
Sulawesi Selatan	33,98	48,70	17,33	33,33	49,12	17,54	33,53	48,99	17,48
Sulawesi Tenggara	33,47	48,37	18,16	30,21	51,80	17,99	30,87	51,10	18,03
Gorontalo	15,16	74,59	10,25	17,02	69,41	13,57	16,59	70,60	12,81
Sulawesi Barat	46,55	42,13	11,32	38,36	44,63	17,01	39,39	44,32	16,29
Maluku	32,58	48,36	19,07	59,43	30,85	9,72	51,95	35,72	12,32
Maluku Utara	30,50	52,32	17,18	36,84	45,90	17,26	35,41	47,34	17,25
Irian Jaya Barat	36,45	42,96	20,59	62,74	24,01	13,25	54,35	30,05	15,59
Papua	36,56	43,42	20,02	57,96	27,86	14,18	52,60	31,76	15,64
INDONESIA	21,56	61,31	17,13	21,42	62,76	15,82	21,48	62,16	16,36

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Keterangan : 1. Belum Pernah Ikut KB 2. Sedang Ikut KB 3. Tidak Ikut KB lagi

Tabel 6.7.1 Persentase Pemuda Perempuan Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Provinsi dan Jenis Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan									Jumlah
	MOW Tubektomi	MOP Vasektomi	AKDR/ IUD	Suntik KB	Susuk/ Impalnt	Pil KB	Kondom/ Karet KB	Intravag	Tradi- sional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nanggroe Aceh Daruss	1,06	1,24	7,93	57,16	0,65	30,42	0,83	0,13	0,59	100,00
Sumatera Utara	3,34	0,92	5,75	47,92	3,29	34,40	1,59	0,10	2,70	100,00
Sumatera Barat	0,51	1,84	8,44	60,90	5,36	19,82	2,06	0,43	0,65	100,00
Riau	1,67	0,93	7,73	58,93	2,18	24,49	1,75	0,37	1,94	100,00
Jambi	1,72	0,18	2,85	58,55	4,33	30,02	1,69	0,33	0,33	100,00
Sumatera Selatan	0,76	0,73	1,17	70,37	4,76	20,50	0,20	-	1,50	100,00
Bengkulu	1,16	0,07	4,03	63,42	6,88	20,60	1,53	0,53	1,78	100,00
Lampung	1,01	-	6,05	64,60	2,38	24,13	1,29	-	0,55	100,00
Bangka Belitung	0,51	0,29	2,09	54,42	1,28	38,34	1,95	-	1,11	100,00
Kepulauan Riau	1,29	0,52	5,24	49,70	2,39	36,14	3,22	-	1,49	100,00
DKI. Jakarta	1,06	0,41	5,80	63,76	1,97	24,92	0,97	0,15	0,98	100,00
Jawa Barat	0,81	0,71	7,11	61,79	1,61	27,03	0,42	0,11	0,41	100,00
Jawa Tengah	2,18	1,14	5,69	71,67	2,78	14,59	1,10	0,25	0,60	100,00
DI. Yogyakarta	2,40	0,24	17,12	54,18	1,65	14,10	4,02	-	6,30	100,00
Jawa Timur	1,38	0,66	5,84	61,21	2,71	25,93	1,06	0,01	1,20	100,00
Banten	0,76	0,92	4,55	68,59	0,87	23,27	0,14	0,14	0,78	100,00
Bali	1,23	0,33	27,44	49,17	0,53	17,66	1,38	-	2,25	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,04	-	9,41	67,40	5,53	15,56	0,59	-	0,48	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,31	1,51	11,61	55,54	5,53	18,86	0,78	-	5,87	100,00
Kalimantan Barat	0,56	1,10	4,78	59,13	0,67	32,71	0,52	0,23	0,28	100,00
Kalimantan Tengah	0,32	0,52	0,71	55,18	1,81	41,28	-	0,12	0,07	100,00
Kalimantan Selatan	0,91	1,07	1,28	48,48	1,90	45,58	0,67	-	0,12	100,00
Kalimantan Timur	1,44	0,95	6,75	47,98	2,95	38,05	1,14	0,02	0,72	100,00
Sulawesi Utara	1,18	1,72	4,48	54,29	6,69	31,15	0,03	-	0,46	100,00
Sulawesi Tengah	1,80	0,35	3,80	46,88	3,64	41,60	-	-	1,93	100,00
Sulawesi Selatan	0,75	0,75	3,63	60,66	3,43	28,90	0,49	-	1,38	100,00
Sulawesi Tenggara	0,56	1,31	5,19	46,15	7,36	37,73	-	-	1,69	100,00
Gorontalo	0,70	0,92	12,30	41,03	8,20	36,26	-	-	0,59	100,00
Sulawesi Barat	1,97	0,80	3,71	47,23	4,29	42,00	-	-	-	100,00
Maluku	-	0,18	4,71	62,85	1,91	30,18	-	0,18	-	100,00
Maluku Utara	-	1,84	2,97	69,41	5,89	19,27	0,27	-	0,34	100,00
Irian Jaya Barat	-	-	1,02	58,93	2,62	36,12	-	-	1,31	100,00
Papua	0,75	0,54	2,43	64,11	1,70	29,29	0,28	-	0,91	100,00
INDONESIA	1,27	0,75	6,46	61,82	2,40	25,32	0,89	0,11	0,99	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 6.7.2 Persentase Pemuda Perempuan Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Provinsi dan Jenis Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan, Tahun 2007

Provinsi	Perdesaan									Jumlah
	MOW Tubektomi	MOP Vasektomi	AKDR/ IUD	Suntik KB	Susuk/ Impalnt	Pil KB	Kondom/ Karet KB	Intravag	Tradi- sional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nanggroe Aceh Daruss	0,47	1,01	0,81	67,60	0,88	26,58	1,29	0,16	1,20	100,00
Sumatera Utara	1,46	1,38	1,82	54,56	4,13	33,90	0,86	0,11	1,79	100,00
Sumatera Barat	0,72	0,44	5,20	66,97	9,04	16,09	0,53	0,22	0,80	100,00
Riau	0,15	0,61	0,71	63,58	2,82	31,09	0,57	-	0,48	100,00
Jambi	0,36	0,20	2,53	63,08	5,77	27,81	0,13	0,05	0,07	100,00
Sumatera Selatan	0,36	0,73	0,84	73,89	7,65	15,78	0,30	0,01	0,44	100,00
Bengkulu	0,35	0,48	1,25	70,65	8,53	18,20	0,22	-	0,32	100,00
Lampung	0,58	0,34	0,75	71,47	5,57	20,81	0,08	-	0,40	100,00
Bangka Belitung	1,03	0,94	0,22	57,76	2,53	37,28	0,24	-	-	100,00
Kepulauan Riau	0,41	2,11	-	55,22	1,66	40,41	-	-	0,20	100,00
DKI. Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	0,67	0,72	2,06	67,57	2,05	26,52	0,18	-	0,23	100,00
Jawa Tengah	1,67	0,64	2,63	78,28	5,70	10,73	0,12	0,05	0,18	100,00
DI. Yogyakarta	2,09	0,77	10,58	62,03	7,49	12,20	0,93	-	3,90	100,00
Jawa Timur	1,33	0,56	3,69	67,42	4,54	21,78	0,14	0,02	0,52	100,00
Banten	0,45	0,55	0,82	84,09	2,65	11,21	0,24	-	-	100,00
Bali	1,17	0,72	29,60	55,13	1,73	10,72	0,56	0,06	0,30	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,14	0,73	1,50	77,98	6,35	11,63	0,23	-	0,43	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,12	0,64	4,99	70,92	3,97	15,72	0,18	0,13	2,33	100,00
Kalimantan Barat	0,86	0,68	0,80	67,14	1,99	28,01	0,23	0,07	0,22	100,00
Kalimantan Tengah	0,80	0,46	0,41	55,77	4,75	37,37	0,14	-	0,31	100,00
Kalimantan Selatan	0,59	0,32	0,62	48,64	2,91	46,71	-	0,04	0,18	100,00
Kalimantan Timur	0,43	0,67	1,43	45,48	2,55	47,80	0,23	1,00	0,42	100,00
Sulawesi Utara	0,84	0,13	3,21	49,98	9,91	35,33	0,15	-	0,45	100,00
Sulawesi Tengah	0,34	0,33	2,12	47,58	5,75	43,28	0,15	0,03	0,42	100,00
Sulawesi Selatan	0,38	0,49	0,99	60,17	4,63	31,71	0,06	0,04	1,53	100,00
Sulawesi Tenggara	0,48	0,78	0,79	48,78	9,20	38,40	0,10	-	1,46	100,00
Gorontalo	0,50	0,62	3,52	47,13	17,26	30,66	0,16	-	0,16	100,00
Sulawesi Barat	0,63	0,76	1,25	44,95	7,46	44,57	-	-	0,37	100,00
Maluku	0,69	0,42	1,74	73,93	5,31	17,06	-	-	0,84	100,00
Maluku Utara	0,59	1,27	1,47	69,29	7,12	19,28	-	-	0,98	100,00
Irian Jaya Barat	0,58	0,67	0,29	61,82	5,72	22,03	-	-	8,89	100,00
Papua	0,61	0,94	0,80	32,07	4,96	10,90	0,59	-	49,12	100,00
INDONESIA	0,93	0,63	2,60	67,25	4,54	23,00	0,23	0,04	0,77	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007

Tabel 6.7.3 Persentase Pemuda Perempuan Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Provinsi dan Jenis Alat/Cara KB yang Sedang Digunakan, Tahun 2007

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan									Jumlah
	MOW Tubektomi	MOP Vasektomi	AKDR/ IUD	Suntik KB	Susuk/ Impalnt	Pil KB	Kondom/ Karet KB	Intravag	Tradi- sional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Nanggroe Aceh Daruss	0,61	1,06	2,47	65,18	0,82	27,47	1,18	0,15	1,06	100,00
Sumatera Utara	2,30	1,17	3,58	51,58	3,75	34,12	1,18	0,11	2,20	100,00
Sumatera Barat	0,66	0,84	6,12	65,23	7,98	17,16	0,97	0,28	0,76	100,00
Riau	0,58	0,70	2,70	62,26	2,64	29,22	0,91	0,10	0,89	100,00
Jambi	0,69	0,20	2,61	62,00	5,43	28,33	0,50	0,12	0,13	100,00
Sumatera Selatan	0,47	0,73	0,93	72,96	6,88	17,03	0,27	0,01	0,72	100,00
Bengkulu	0,53	0,39	1,86	69,07	8,17	18,73	0,50	0,12	0,64	100,00
Lampung	0,65	0,29	1,66	70,30	5,02	21,37	0,29	-	0,43	100,00
Bangka Belitung	0,85	0,71	0,88	56,58	2,09	37,66	0,84	-	0,39	100,00
Kepulauan Riau	1,08	0,90	4,00	51,00	2,21	37,15	2,46	-	1,19	100,00
DKI. Jakarta	1,06	0,41	5,80	63,76	1,97	24,92	0,97	0,15	0,98	100,00
Jawa Barat	0,74	0,71	4,55	64,72	1,83	26,78	0,30	0,06	0,32	100,00
Jawa Tengah	1,87	0,83	3,78	75,78	4,60	12,19	0,49	0,13	0,34	100,00
DI. Yogyakarta	2,27	0,47	14,25	57,62	4,21	13,27	2,67	-	5,25	100,00
Jawa Timur	1,35	0,60	4,53	65,01	3,83	23,39	0,50	0,01	0,78	100,00
Banten	0,62	0,75	2,87	75,57	1,67	17,84	0,18	0,08	0,43	100,00
Bali	1,20	0,53	28,51	52,11	1,12	14,23	0,98	0,03	1,29	100,00
Nusa Tenggara Barat	1,10	0,46	4,40	74,10	6,05	13,08	0,36	-	0,45	100,00
Nusa Tenggara Timur	0,98	0,79	6,12	68,30	4,24	16,25	0,28	0,11	2,93	100,00
Kalimantan Barat	0,80	0,77	1,64	65,44	1,71	29,01	0,30	0,10	0,23	100,00
Kalimantan Tengah	0,67	0,47	0,50	55,60	3,94	38,44	0,10	0,03	0,24	100,00
Kalimantan Selatan	0,70	0,59	0,87	48,58	2,54	46,29	0,25	0,02	0,16	100,00
Kalimantan Timur	0,92	0,81	4,03	46,70	2,75	43,04	0,68	0,52	0,56	100,00
Sulawesi Utara	0,95	0,62	3,60	51,31	8,92	34,04	0,12	-	0,45	100,00
Sulawesi Tengah	0,60	0,33	2,43	47,45	5,37	42,98	0,12	0,03	0,69	100,00
Sulawesi Selatan	0,50	0,57	1,81	60,32	4,26	30,84	0,19	0,03	1,48	100,00
Sulawesi Tenggara	0,50	0,88	1,64	48,28	8,85	38,27	0,08	-	1,50	100,00
Gorontalo	0,55	0,69	5,66	45,65	15,06	32,02	0,12	-	0,26	100,00
Sulawesi Barat	0,79	0,77	1,55	45,22	7,08	44,26	-	-	0,33	100,00
Maluku	0,43	0,33	2,86	69,75	4,03	22,00	-	0,07	0,53	100,00
Maluku Utara	0,44	1,41	1,84	69,32	6,81	19,27	0,07	-	0,82	100,00
Irian Jaya Barat	0,31	0,36	0,62	60,50	4,31	28,45	-	-	5,43	100,00
Papua	0,66	0,80	1,36	43,05	3,84	17,21	0,48	-	32,60	100,00
INDONESIA	1,07	0,68	4,18	65,02	3,66	23,95	0,50	0,07	0,86	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, Susenas 2007